

Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Pendekatan Rasio Penentu di Bursa Efek Indonesia

Andi Martias

Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika

Email : andi.aim@bsi.ac.id

Abstract - The research was conducted to analyze the financial ratios of Fixed Asset Turnover, Asset Turnover, Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio and Risk Based Capital to find the determinant ratio of financial performance of local insurance companies in Indonesia. The research method used is quantitative method. Population in this research is insurance company service company which listed in Bursa Efek Indonesia. The sample used is insurance company sector in Indonesia Stock Exchange year 2012-2016. The concluded that: Fixed asset turnover has no significant effect between fixed asset turnover to financial performance. Asset Turnover has positive and significant influence between asset turnover to financial performance. Current Ratio positively and significantly influence between current ratio to financial performance. Debt to Asset Ratio have positive and significant effect between debt to asset ratio to financial performance. Debt to equity ratio has an insignificant influence between debt to equity ratio to financial performance. Risk Based Capital has positive and significant effect risk based capital to financial performance.

Keywords: Fixed asset ratio, asset turnover, current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, risk based capital, return on equity.

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan perekonomian global sehingga sangat cepat menciptakan peluang bisnis serta semakin meningkatkan daya saing usaha. Perkembangan bisnis ini memerlukan perlindungan terhadap risiko kerugian dari proses bisnis tersebut. Berasuransi bagi para pelaku bisnis tersebut dapat memitigasi risiko kerugian dari bisnis yang dijalankan, karena kemungkinan risiko yang terjadi atas bisnis tersebut dialihkan kepada perusahaan asuransi yang merupakan penanggung risiko. Kebutuhan bisnis terhadap perlindungan asuransi memberikan dampak positif pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri asuransi kerugian.

Disisi lain, masyarakat sudah semakin mengerti dan merasakan manfaat asuransi yang memberikan jaminan/perlindungan terhadap berbagai macam resiko yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Keikutsertaan suatu pihak tertentu dalam berasuransi ditandai dengan pembayaran premi yang dilakukan. Besar kecilnya premi yang dibayarkan dipengaruhi oleh nilai dari obyek yang dipertanggungkan.

Pertumbuhan dalam jumlah perusahaan asuransi, maka dengan sendirinya akan meningkatkan daya saing antar perusahaan tersebut dalam hal menarik minat masyarakat untuk berasuransi pada perusahaan-perusahaan mereka masing-masing.

Persaingan yang terjadi adalah dalam hal memberikan fasilitas yang memberi nilai lebih kepada suatu perusahaan asuransi tertentu dibandingkan dengan perusahaan asuransi lainnya, antara lain seperti fasilitas *call center 2, towing car*, perbaikan mobil satu hari (*one day service*), *swipe card*, dan lain sebagainya. Disamping itu, dari beragam fasilitas yang diberikan, persaingan tarif (*rate*) premi juga kerap terjadi agar dapat memberikan harga premi yang paling murah kepada tertanggung dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asuransi lainnya.

Modal usaha yang cukup adalah hal yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan dan memperluas bisnis yang dilakukan suatu perusahaan. Untuk itu perusahaan memerlukan tambahan modal usaha untuk dapat semakin meningkatkan bisnisnya. Modal usaha dapat diperoleh dari dalam dan dari luar perusahaan. Salah satu cara untuk dapat memperoleh modal usaha dari luar perusahaan adalah dengan menjual saham. Dengan menjual saham, perusahaan emiten akan memperoleh modal usaha hasil dari penjualan saham perusahaannya.

Kesehatan keuangan sebuah perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Dengan menerapkan analisis rasio keuangan dapat terlihat bagian mana dari laporan keuangan perusahaan yang berhasil baik dengan melihat pengaruhnya dengan bagian yang lain, dan mana yang kurang

berhasil dengan baik. Hasil analisis tersebut kemudian dapat menjadi acuan bagi pihak manajemen perusahaan untuk dapat membenahi bagian laporan keuangan yang kurang baik, dan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan bagian yang sudah baik.

Selain analisa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat juga dianalisa melalui metode *Risk Based Capital* (RBC). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, *Risk Based Capital* atau dikenal juga dengan Batas Tingkat Solvabilitas merupakan salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi, khususnya yang terkait dengan solvabilitas atau kemampuan membayar kewajibannya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang juga dinamakan sebagai metode tradisional, *positivistik*, *scientific* dan metode *discovery*. Tradisional, karena metode sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian, disebut sebagai metode *positivistik* karena berlandaskan pada filsafat *positivisme*, disebut metode ilmiah/ *scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis, disebut metode *discovery*, karena dapat ditemukan dan dikembangkan berhadapan iptek baru, dan disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2013:7).

Penelitian ini menggunakan analisa kausal yaitu “menganalisis bagaimana satu atau lebih variabel mempengaruhi perubahan pada variabel lainnya, dan merupakan studi hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih” (Kothari, 2004:130). Penelitian ini menganalisa pengaruh *Fixed Asset Turnover* (X₁), *Asset Turnover* (X₂) *Current Ratio* (X₃), *Debt to Asset Ratio* (X₄), *Debt to Equity Ratio* (X₅) dan *Risk Based Capital* (X₆) terhadap kinerja keuangan (Y) perusahaan sektor Asuransi di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

Tabel 1 Data Perusahaan Asuransi

No	Perusahaan Asuransi
1	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
2	PT Asuransi Bintang Tbk
3	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
4	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
5	PT Asuransi Jasa Tania Tbk
6	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk

7	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
8	PT Asuransi Ramayana Tbk
9	PT Lippo General Insurance Tbk
10	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016 dan <http://www.idx.co.id/id/id/beranda/publikasi/ringkaskaninerjaperusahaantercatat.aspx>. Data-data yang diperoleh meliputi data *Fixed Asset Turnover*, *Asset Turnover*, *Current Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Risk Based Capital* dan *Return on Equity*.

2.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian. Definisi operasional ini bertujuan untuk membuat variabel menjadi lebih konkrit dan dapat diukur. Dalam mendefinisikan suatu variabel harus dijelaskan tentang apa yang harus diukur, bagaimana mengukurnya, apa saja kriteria pengukurannya, instrumen yang digunakan untuk mengukurnya dan skala pengukurannya (Dharma, 2011). Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat diringkas dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Operasional dan Pengukuran Variabel

VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR	SKALA
<i>Fixed Asset Turnover</i> (FATO)	Rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode.	$FATO = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aktiva Tetap}}$	Rasio
<i>Asset Turnover</i> (ATO)	Rasio untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva	$ATO = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aktiva}}$	Rasio
<i>Current Ratio</i> (CR)	Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek	$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	Rasio
<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR)	Rasio untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva	$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$	Rasio
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$	Rasio
<i>Risk Based Capital</i> (RBC)	Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat deviasi antara pengelolaan kekayaan dan kewajiban	$RBC = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{Solvabilitas Minimum}}$	Rasio
Kinerja Keuangan (Y) menggunakan Return on Equity (ROE)	Return on Equity adalah rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan modal sendiri.	$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Sth Pjk}}{\text{Ekuitas}}$	Rasio

2.4. Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk (dari) hubungan antar variabel-variabel. Tujuan pokok dalam penggunaan metode ini adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui. Analisis regresi berganda menggunakan rumus:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan :

- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X_1 = *Fixed Asset Turnover*
- X_2 = *Asset Turnover*
- X_3 = *Current Ratio*
- X_4 = *Debt to Asset Ratio*
- X_5 = *Debt to Equity Ratio*
- X_6 = *Risk Based Capital*
- Y = Kinerja keuangan (ROE)
- ε = Kesalahan acak

2. Analisis Korelasi Berganda

Analisa korelasi berganda adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menentukan kuat atau tidaknya hubungan garis lurus antara variabel terikat dan variabel bebas. Analisis korelasi berganda ini menggunakan program MINITAB.

3. Uji “t”

Uji “t” adalah suatu cara untuk membuktikan diterima atau tidaknya suatu hipotesis yang diberikan sebelumnya, dalam hal ini adalah menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2. Pada uji “t” ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ho ditolak apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti ada pengaruh
- b. Ho diterima apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti tidak ada pengaruh

4. Uji F

Untuk menguji hipotesis 3, digunakan uji F yaitu uji secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui nilai F_{hitung} digunakan program MINITAB. Sedangkan untuk mengetahui nilai F_{tabel} digunakan $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df=(k-1)$ dan $(n-k)$.

Nilai F_{hitung} dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada $\alpha = 5\%$, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ho ditolak apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti ada pengaruh

- b. Ho diterima apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, berarti tidak ada pengaruh

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan menggunakan program MINITAB.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif data penelitian digunakan untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel FATO, ATO, CR, DAR, DER, RBC dan kinerja keuangan (ROE) yang berupa nilai rata-rata data, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Data Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fixed Asset Turnover	60	1,38	4,73	2,7170	0,89997
Asset Turnover	60	0,20	0,67	0,4561	0,68457
Current Ratio	60	0,96	4,88	2,7754	5,36743
Debt to Asset Ratio	60	0,19	0,53	0,5231	0,64434
Debt to Equity Ratio	60	0,34	1,95	0,9674	0,56382
Risk Based Capital	60	4,75	6,74	4,9810	7,65412
Return on Equity	60	1,49	6,19	3,9768	7,85362
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil Perhitungan Minitab

Berdasarkan tabel 2, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016 diketahui rata-rata *Fixed Asset Turnover* (FATO) adalah 2,717, sedangkan nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi lebih rendah dari rata-rata FATO, ini menunjukkan stabilnya FATO yang dimiliki perusahaan. Rata-rata *Asset Turnover* (ATO) adalah 0,68457, sedangkan nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi lebih rendah dari rata-rata ATO, ini menunjukkan stabilnya ATO yang dimiliki perusahaan. Rata-rata *Current Ratio* (CR) adalah 5,36743, sedangkan nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi lebih rendah dari rata-rata CR, ini menunjukkan stabilnya CR yang dimiliki perusahaan. Rata-rata *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah 0,64434, untuk nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi lebih rendah dari rata-rata DAR, ini menunjukkan stabilnya DAR yang dimiliki perusahaan. Begitu pun dengan nilai rata-rata *Debt to Equity Ratio* (DER), *Risk Based Capital* (RBC), *Return on Equity* (ROE) lebih tinggi dibandingkan nilai minimum dan maksimum serta

standar deviasi, ini menunjukkan stabilnya DER, RBC dan ROE yang dimiliki perusahaan.

3.2. Analisis Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil output perhitungan pengolahan data MINITAB, berikut dibahas mengenai persamaan regresi berganda yang disajikan pada tabel Tabel 3. Output Persamaan Regresi Berganda.

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
(Constant)	-6,853	1,564		-3,111	0,002
Fixed Asset Turnover	0,265	0,208	0,716	1,534	0,125
Asset Turnover	2,507	0,443	0,511	2,583	0,017
Current Ratio	2,443	0,087	0,853	2,653	0,022
Debt to Asset Ratio	5,167	1,352	0,755	3,641	0,001
Debt to Equity Ratio	-0,073	0,453	-0,052	-0,361	0,819
Risk Based Capital	0,892	0,654	0,734	3,753	0,001

a. Dependent Variable: Return on Equity

Rumus persamaan regresi berganda :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

$$Y = -6,853 + 0,265X_1 + 2,507X_2 + 2,443X_3 + 5,167X_4 - 0,073X_5 + 0,892X_6$$

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia dengan persamaan ini dapat dijelaskan bahwa:

Apabila tidak ada perubahan variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 dan X_6 atau masing-masing nilainya 0 (konstan) maka kinerja keuangan (Y) perusahaan mengalami penurunan sebesar 6,853.

Apabila terjadi kenaikan terhadap variabel *fixed asset turnover* (X_1) sebesar satu satuan, maka variabel kinerja keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,265 kalinya dan atau sebaliknya dengan asumsi X_2 , X_3 , X_4 , X_5 dan X_6 tetap.

Apabila terjadi kenaikan terhadap variabel *asset turnover* (X_2) sebesar satu satuan, maka variabel kinerja keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2,507 kalinya dan atau sebaliknya dengan asumsi X_1 , X_3 , X_4 , dan X_5 tetap.

Apabila terjadi kenaikan terhadap variabel *current ratio* (X_3) sebesar satu satuan, maka variabel kinerja keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2,443 kalinya dan atau sebaliknya dengan asumsi X_1 , X_2 , X_4 , X_5 dan X_6 tetap.

Apabila terjadi kenaikan terhadap variabel *debt to asset ratio* (X_4) sebesar satu satuan, maka variabel kinerja keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 5,167 kalinya dan atau sebaliknya dengan asumsi X_1 , X_2 , X_3 , X_5 dan X_6 tetap.

Apabila terjadi kenaikan terhadap variabel *Debt to Equity Ratio* (X_5) sebesar satu satuan, maka variabel kinerja keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,073 kalinya dan atau sebaliknya dengan asumsi X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_6 tetap.

Apabila terjadi kenaikan terhadap variabel *Risk Based Capital* (X_6) sebesar satu satuan, maka variabel kinerja keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,892 kalinya dan atau sebaliknya dengan asumsi X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5 tetap.

3.3. Analisis Korelasi Berganda (R)

Korelasi menggambarkan keeratan hubungan antara variabel X dan Y atau dalam hal ini keeratan hubungan variabel *Fixed Asset Turnover* (X_1), *Asset Turnover* (X_2), *Current Ratio* (X_3), *Debt to Asset Ratio* (X_4), *Debt to Equity Ratio* (X_5) dan *Risk Based Capital* (X_6) dengan variabel *Return on Equity* (Y).

Tabel 4. Hasil Output Korelasi Berganda (R)

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	0,926 ^a	0,537	0,572	0,51047	

a. Predictors: (Constant), Risk Based Capital, Fixed Asset Turnover, Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Debt to Asset Ratio

b. Dependent Variable: Return on Equity

Berdasarkan hasil output pengolahan data, dapat dilihat bahwa point Mutipple R adalah 0,926, maka korelasi antara *Fixed Asset Turnover*, *Asset Turnover*, *Current Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan *Risk Based Capital* terhadap kinerja keuangan adalah 0,926. Korelasi sebesar 0,926 membuktikan bahwa antara variabel *Fixed Asset Turnover*, *Asset Turnover*, *Current Ratio*, *Debt to Asset Ratio* dan *Risk Based Capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor Asuransi di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 memiliki hubungan yang kuat dan signifikan atau R mendekati +1.

3.4. R Square (Koefisien Determinasi)

Karena penghitungan statistik memiliki variabel bebas lebih dari dua, maka akan sangat lebih akurat apabila menggunakan nilai *R Square* yang telah disesuaikan atau *Adjusted R Square*. Hasil output statistik regresi pada penelitian ini didapat angka 0,537 hal ini menjelaskan bahwa kontribusi yang diberikan variabel *Fixed Asset Turnover*, *Asset Turnover*, *Current Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan *Risk Based Capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan sebesar 53,7% sedangkan sisanya sebesar

52,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

3.5. Pengujian Hipotesis

1. Uji "t"

Tabel 5. Hasil Output Uji "t"

Model	Unstandardized	t	Sig.
	Coefficients		
B			
(Constant)	-5,461	-3,383	0,002
Fixed Asset Turnover	0,169	1,563	0,125
Asset Turnover	1,408	2,492	0,017
Current Ratio	0,227	2,367	0,022
Debt to Asset Ratio	5,167	3,590	0,001
Debt to Equity Ratio	-0,068	-0,231	0,819
Risk Based Capital	0,861	3,636	0,001

Dengan membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung} :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 tolak

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima

Dari tabel 4.4. terlihat bahwa variabel *fixed asset turnover* lebih kecil dari t_{tabel} maka *fixed asset turnover* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE), *asset turnover* lebih besar dari t_{tabel} maka *asset turnover* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE), *current ratio* lebih besar dari t_{tabel} maka *current ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE), variabel *debt to asset ratio* lebih besar dari t_{tabel} maka *debt to asset ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE), variabel *debt to equity ratio* lebih kecil dari t_{tabel} dengan arah negatif maka *debt to equity ratio* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja keuangan (ROE), variabel *risk based capital* lebih besar dari t_{tabel} maka *risk based capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE).

2. Uji Kesesuaian Keseluruhan (Uji F)

Tabel 6. Output Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Regression	13,006	6	2,168	8,319	0,000 ^a	
Residual	11,205	43	0,261			
Total	24,211	49				

a. Predictors: (Constant), Risk Based Capital, Fixed Asset Turnover, Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Debt to Asset Ratio

b. Dependent Variable: Return on Equity

Dengan membandingkan F_{tabel} dan F_{hitung}

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 tolak

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima

Berdasarkan tabel di atas diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak atau H_1 diterima, berarti variabel *Fixed Asset Turnover*, *Asset Turnover*, *Current Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity*

Ratio dan *Risk Based Capital* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3.6. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan sektor Asuransi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016 diperoleh hasil bahwa:

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_1 (*fixed asset turnover*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan). Secara teori *fixed asset turnover* (FATO) adalah rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimal kapasitas aktiva tetap yang digunakan. Tinggi rendahnya rasio ini tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena dibandingkan dengan menggunakan aktiva tetap nilainya terlalu kecil sehingga kurang begitu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_2 (*asset turnover*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan). *Asset turnover* (ATO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah pendapatan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rasio ini menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengukur tingkat kinerja keuangan karena melibatkan semua aktiva yang dimiliki. Rasio ini juga menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan investasinya ke perusahaan.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_3 (*current ratio*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan). Secara teori *Current Ratio* (CR) adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Tinggi rendahnya rasio ini mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, semakin tinggi rasio ini maka semakin cepat perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo dan juga menunjukkan kemampuan modal perusahaan semakin baik.

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_4 (*debt to asset ratio*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan). *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Tinggi rendahnya *Debt to Asset ratio* yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya dengan aktiva dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan dengan arah negatif antara variabel X_5 (*debt to equity ratio*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan). Semakin rendah rasio *Debt to Equity Ratio* akan semakin baik

pula kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. DER yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat pinjaman sehingga akan meningkatkan resiko perusahaan yang semakin tinggi dengan adanya beban pengembalian yang tinggi sehingga DER yang tinggi akan menurunkan kinerja keuangan.

6. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_6 (*risk based capital*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan). *Risk Based Capital* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat deviasi antara pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik karena rasio ini digunakan sebagai ukuran kesehatan bagi perusahaan asuransi. RBC yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan yang sangat baik dalam menanggung risiko yang mungkin terjadi akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

7. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan variabel yang lain adalah *risk based capital* (RBC).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_1 (*fixed asset turnover*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan).
Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2014) yang memberikan kesimpulan bahwa *fixed asset turnover* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_2 (*asset turnover*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan).
Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2015) dan Pongrangga (2015) yang memberikan hasil penelitian bahwa *total asset turnover* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_3 (*current ratio*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan).
Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Srimindarti (2009) dan Pongrangga (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *current ratio* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_4 (*debt to asset ratio*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan).

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ludijanto (2014) yang memberikan hasil bahwa *debt to asset ratio* (DAR) secara simultan dan parsial memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan.

5. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel X_5 (*debt to equity ratio*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan).

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh yang memberikan hasil bahwa *debt to equity ratio* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

6. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_6 (*risk based capital*) terhadap variabel Y (kinerja keuangan).

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2014) yang menyatakan bahwa *risk based capital* (RBC) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

Referensi

- Agnes Sawir. (2009). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bastian, Indra dan Suhardjono. (2006). *Akuntansi Perbankan*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Brigham, Eugene F and Joel F.Houston. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, alih bahasa Ali Akbar Yulianto, Buku satu, Edisi sepuluh, Jakarta : PT Salemba Empat.
- Darsono, Azhari. (2005). *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi.
- Fahmi, Irham. (2011). *Analisa Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2006). *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kuswandi. 2004. *Memahami Rasio Rasio Keuangan Orang Awam*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Mulyadi. (2007). *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Selemba Empat.
- Republik Indonesia. (2003). Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syamsuddin. (2009). *Manajemen Keuangan Perusaha*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Weston, J. Fred dan Thomas, E. Copeland. (2003). *Manajemen Keuangan*, Edisi-8, Penerjemah Kirbrandoko, A. Jaka Wasana M, dan Supranoto Dipokusumo. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Melalui Analisis Profitabilitas

Slamet Heri Winarno

Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta
e-mail : slamet.smh@bsi.ac.id

Abstract - This research aims to determine the financial performance of an expedition company based on company profitability analysis. Indicators of profitability used include the ratio of Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) and Return On Equity (ROE) in 2014 to 2016. Assessment of company performance is done by comparing the rentability ratio with the average ratio Industry and Bank Indonesia standards. The data used are financial statement data that is balance sheet and income statement report for year 2014 until 2016. Result of research indicate that overall rentability performance show good value, but compared with industry average performance of NPM year 2014 show less result Good, while ROA and ROE performance during 2015 and 2016 has not shown satisfactory results because it is below the industry average. Overall financial performance of the company can be said good.

Keywords: Performance, Finance, Profitability

I. PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi dewasa ini sedikit banyak telah membawa perubahan-perubahan dalam berbagai macam sendi kehidupan, tak terkecuali pada dunia usaha. Dunia usaha saat ini dihadapkan pada bagaimana mampu bersaing secara global, serta di tuntut agar lebih profesional dalam mengelola manajemen usahanya agar memiliki kemampuan *survive* ditengah persaingan. Untuk itu tiap-tiap perusahaan harus berusaha menampilkan yang terbaik dalam segi kinerja perusahaan termasuk dalam segi manajemen keuangan .

Diyakini bahwa pengelolaan terhadap keuangan perusahaan merupakan sesuatu yang dianggap sangat krusial dan penting karena akan berdampak pada kelangsungan kegiatan dan eksistensi suatu perusahaan, dan juga berpengaruh pada setiap individu yang ada dalam perusahaan tersebut. Seorang manajer keuangan dituntut untuk dapat menjalankan fungsi keuangan dengan baik, agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu dibutuhkan pula analisis terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah keuangan agar mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Melalui analisis tersebut, akan dapat diketahui posisi keuangan, kinerja keuangan dan kekuatan keuangan yang dimiliki perusahaan (Komala, 2013). Begitu pentingnya analisis laporan keuangan ini, sehingga perlu adanya kajian tersendiri tentang bagaimana mengukur keberhasilan dan kinerja perusahaan dalam mengelola sektor keuangannya. Tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) untuk mengetahui bagaimana perhitungan dari *Net Profit Margin*, *Return On Asset* dan *Return On Equity*, (2) untuk mengetahui perbandingan *Net Profit Margin*, *Return On Asset* dan *Return On Equity* dalam kurun waktu tertentu, dan (3) untuk mengetahui kinerja

keuangan berdasarkan indikator keuangan (Warren, 2017).

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang , PT Angkasa Jaya Sejatra memiliki tujuan yaitu menjadi perusahaan yang ternama dan mampu menghasilkan keuntungan (laba) yang optimal. Diperlukan upaya penetapan strategi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan jasa ekspedisi lainnya. Selain bertujuan untuk memperoleh laba, perusahaan jasa ini juga memiliki tujuan menjadi sektor usaha yang dapat menghasilkan penilaian yang bermutu tinggi dan profesional.

Dalam konteks pemasaran jasa tidak mudah untuk menghasilkan laba yang besar, hal inilah yang menyebabkan pihak manajemen di tuntut untuk mampu menilai kondisi dan perkembangan perusahaan melalui analisis kinerja laporan keuangan agar dapat mempertahankan keberadaan perusahaan dan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan di tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan persaingan usaha yang semakin ketat.

1.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan adanya keinginan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila dianalisa lebih lanjut, sehingga di peroleh informasi yang dapat mendukung kebijakan yang akan di ambil.

Menurut Myer dalam (Munawir, 2007), mengatakan bahwa Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak di bagikan (laba yang di tahan).

Menurut Kasmir (Kasmir, 2008) berpendapat bahwa: “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu pada periode tertentu”. Analisa atas laporan keuangan pada hakikatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat dan perubahan posisi keuangan atau kemajuan-kemajuan suatu perusahaan melalui laporan keuangan yang bersangkutan.

Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak di capai terutama bagi pemilik usaha, manajemen perusahaan, maupun stakeholder lainnya guna mengetahui kondisi keuangan perusahaan (Sutrisno, 2007)

(Kasmir, 2008) mengungkapkan bahwa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi tentang: (1) jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini, (2) jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang di miliki perusahaan pada saat ini, (3) jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, (4) jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu, (5) perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva dan modal perusahaan, (6) kinerja perusahaan dalam suatu periode, (7) catatan-catatan atas laporan keuangan..

Namun demikian, suatu laporan keuangan juga memiliki keterbatasan, seperti yang disampaikan (Munawir, 2007), antara lain: (1) pada dasarnya merupakan *interim report* (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan tidak menunjukan nilai likuidasi atau realisasi; (2) angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (*book value*) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya; (3) hasil pencatatan transaksi keuangan belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar; (4) tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan

Selanjutnya, laporan keuangan terbagi atas berbagai bentuk, yaitu: (1) neraca, laporan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal pada saat tertentu (Harahap, 2010); (2) laporan laba/rugi, laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan (Kasmir, 2012); (3) laporan perubahan modal, laba ditahan, laporan yang menunjukkan perubahan modal akibat adanya laba/rugi (Munawir, 2007).

Menurut (Harahap, 2007) para pemakai laporan keuangan beserta kegunaannya dapat dilihat sebagai berikut: (1) pemegang saham, (2) investor, (3)

analisis pasar modal, (4) manajer, (5) karyawan dan serikat pekerja; (6) instansi pajak, (7) pemberi dana (kreditur), (8) supplier, (9) pemerintah atau lembaga pengatur resmi; (9) langganan atau lembaga konsumen; (10) lembaga swadaya masyarakat, (11) peneliti/akademi/lembaga peringkat

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan memerlukan suatu ukuran tertentu untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja dari suatu perusahaan (Munawir, 2007). Rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Sehingga kita dapat membeberkan informasi dan memberikan penilaian.

Menurut (Munawir, 2007), “Rasio yaitu angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos yang lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan”. Selanjutnya menurut Sutrisno (2007:214), “Analisis rasio keuangan adalah menghubungkan elemen-elemen yang ada dilaporan keuangan agar bisa di interpretasikan lebih lanjut”.

Dengan demikian analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan atau kinerja keuangan perusahaan baik pada sekarang maupun dimasa yang mendatang, sehingga sebagai alat untuk menilai posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu.

1.2. Rasio Profitabilitas

Analisis terhadap profitabilitas atau kemampuan perusahaan menjadi sesuatu yang amat strategis, karena menyangkut bagaimana perusahaan mampu menghasilkan return dari setiap kegiatan operasionalnya. Setiap kegiatan bisnis mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Alat analisis yang dapat digunakan yaitu dengan mengukur rasio profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mengukur seberapa besar tungkat keuntungan yang dapat diperoleh (Sutrisno, 2007).

(Munawir, 2007) menambahkan bahwa rasio profitabilitas dapat disimpulkan, yaitu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan memperoleh laba. Rasio profitabilitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih), merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan

dibandingkan dengan penjualan (Harahap, 2007), dan dirumuskan :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

2. *Return On Asset* (Pengembalian Aktiva), mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dari pajak, hasil pengembalian total aktiva menunjukkan kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan labab (Sugiono, 2009), dirumuskan :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. *Return On Equity* (Pengembalian Ekuitas), memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sugiono, 2009), dirumuskan :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik, maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dijadikan dasar acuan untuk melihat badan usaha tersebut menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (*strategic planning*) suatu organisasi". (Bastian, 2006). Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Kinerja setiap perusahaan berbeda-beda karena ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Menurut (Fahmi, 2011), terdapat lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan, yaitu: (1) *review* terhadap terhadap laporan keuangan, dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, (2) perhitungan, penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang sedang dilakukan sehingga

hasil perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan, (3) perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh dari berbagai perusahaan lainnya.

Untuk menilai kinerja keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan yang merupakan tolak ukur yaitu menggunakan rasio yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan dan prestasi perusahaan. Dengan menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar.

Hasil pengukuran kinerja kerja dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba kedepan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat kinerja manajemen (Kasmir, 2008).

Salah satunya yang digunakan sebagai pembanding untuk menilai kondisi suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yaitu melalui analisis profitabilitas. (Kasmir, 2008) menyatakan bahwa standar pengukuran kinerja keuangan untuk menilai profitabilitas menurut rata-rata industri, yaitu: (1) NPM diatas 20%, (2) ROA diatas 30%, (3) ROE lebih dari 40%.

Sedangkan jika mengacu pada standar kinerja keuangan dari sisi probalitas yang dikeluarkan oleh

Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia nomor : 6/10/PBI/2004 terlihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Standar Rasio Bank Indonesia

Rasio	Standar Bank Indonesia
Net Profit Margin (NPM)	3% - 9.5% (standar AJS)
Return On Asset (ROA)	0.5% - 1.25%
Return On Equity (ROE)	5% - 12.5%

Sumber: Peraturan Bank Indonesia

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis kuantitatif yang mencoba menunjukkan pengukuran kinerja keuangan melalui analisis profitabilitas yang meliputi rasio NPM, ROA dan ROE. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang (ekspedisi), yaitu PT Angkasa Jaya Sejatra sebagai sampel penelitian.

Pengukuran variabel penelitian menggunakan teknik analisis perbandingan guna mengetahui tingkat kinerja masing-masing variabel, jika dibandingkan dengan suatu standar pengukuran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perhitungan Indikator Profitabilitas

Pada pengukuran kinerja keuangan berdasarkan analisis profitabilitas maka digunakan laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan laba/rugi yang diperoleh dari annual report perusahaan. Berdasarkan data-data pada kedua laporan tersebut akan diperoleh nilai dari total asset, total modal serta total laba bersih untuk beberapa periode. Periode yang digunakan pada penelitian ini yaitu data keuangan untuk tahun 2014 hingga 2016, seperti pada tabel 2.

Tabel 2.
Ringkasan Laporan Keuangan 2014-2016 (dalam rupiah)

Uraian	2014	2015	2016
Total Aktiva	806.353.635,38	833.940.514,33	871.809.390,57
Total Modal	642.547.642,38	726.028.269,33	838.374.429,57
Pendapatan Bersih	5.185.059.500,00	3.822.256.800,00	3.385.541.650,00
Laba Bersih	122.997.524,62	133.480.626,95	112.346.160,24

Sumber: Laporan Neraca Dan Rugi Laba

Berdasarkan Tabel 2, pada pos total aktiva terjadi kenaikan selama 3 tahun terakhir dengan tingkat kenaikan rata-rata 3,5% tiap tahunnya. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh kenaikan disisi current asset perusahaan, yaitu banyak uang tunai (kas) yang ada di perusahaan. Di sisi lain, modal perusahaan menunjukkan trend yang positif dimana terjadi kenaikan sebesar 13% tahun 2015 dan 15,5% tahun 2016.

Sedangkan dari sisi tingkat net income, perusahaan mengalami penurunan dalam 3 tahun tersebut, penurunan ini disebabkan karena perbandingan antara pendapatan bruto dan seluruh pengeluaran perusahaan menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini ulu yang menyebabkan jumlah laba bersih (profit) juga mengalami trend yang turun naik dari tiga periode tersebut. Berdasarkan data keuangan tersebut, tahap selanjutnya adalah melakukan

perhitungan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio *Net Profit Margin*, *Return On Asset* dan *Return On Equity* seperti pada bagian sebelumnya. Hasil dari perhitungan ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3.
Rasio Profitabilitas

Rasio	Tahun		
	2014	2015	2016
NPM	2.37%	3.49%	3.32%
ROA	15.25%	16.01%	12.89%
ROE	19.14%	18.39%	13.40%

Sumber : data diolah (2017)

Net Proffit Margin (NPM) adalah merupakan keuntungan penjualan setelah perhitungan biaya dan pajak penghasilan (Warren, 2017) Marjin ini menunjukkan perbandingan laba setelah pajak dengan penjualan. Semakin tinggi NPM, semakin baik operasi suatu perusahaan. Berdasarkan tabel 3, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 nilai NPM sebesar 2.37%, hal ini mengindikasikan bahwa setiap Rp. 1 penjualan akan menghasilkan keuntungan neto yaitu Rp. 0.0237, sedangkan pada tahun 2015 NPM meningkat menjadi 3.49%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1 penjualan akan menghasilkan keuntungan neto yaitu Rp. 0.0349. Namun pada tahun 2016 terjadi turun menjadi 3.32%, ini berarti bahwa setiap Rp. 1 penjualan akan menghasilkan keuntungan neto yaitu Rp. 0.0332. Kemampuan dari perusahaan dalam meningkatkan jumlah pendapatannya di tiap periode sedikit banyak akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari NPM.

Sedangkan *Return On Asset* (ROA), merupakan kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia didalam perusahaan (Komala, 2013). Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan. Pada tabel 3, hasil perhitungan analisis ROA, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 nilai ROA sebesar 15.25%, tahun 2015 sebesar 16.01% dan pada tahun 2016 sebesar 12.89%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan seluruh aktiva oleh perusahaan telah berhasil menghasilkan laba bersih secara optimal walaupun pada tahun 2016 terjadi penurunan. Angka rasio ini puka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan aktiva perusahaan belum sepenuhnya efisien dan naik turunnya tingkat

laba yang dihasilkan oleh keseluruhan penggunaan aktiva.

Disisi lain, *Return On Equity* (ROE) merupakan suatu pengukuran dan penghasilan yang tersedia bagi para pemihak maupun perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh semakin baik keadaan perusahaan. Dari hasil perhitungan, maka dapat dilihat *Return On Equity* pada tahun 2014 sebesar 19.14%, tahun 2015 sebesar 18.39% dan pada tahun 2016 sebesar 13.4%. Hal ini berarti bahwa penggunaan seluruh kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan neto selama tiga periode tersebut dapat dikatakan optimal walaupun terdapat penurunan pada tahun 2016, hal ini biasanya disebabkan oleh terjadinya penurunan investasi pada modal perusahaan.

3.2. Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat pertumbuhan dan potensi perkembangan perusahaan yang baik. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan antara rasio profitabilitas yang dihasilkan dengan rasio dari rata-rata industri dan standar yang berlaku dari Bank Indonesia, seperti tersaji pada tabel 4. Dari hasil penelitian, kinerja keuangan terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi ini dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Kinerja Keuangan

Rasio	Tahun			Rata-rata Industri	Standar BI
	2014	2015	2016		
NPM	2.37%	3.49%	3.32%	3.06%	3% - 9.5%
ROA	15.25%	16.01%	12.89%	14.72%	0.5% - 1.25%
ROE	19.14%	18.39%	13.40%	16.98%	5% - 12.5%

Sumber : data diolah (2017)

Penilaian kinerja keuangan dapat dianalisis dengan metode komparasi antara kinerja keuangan yang dihasilkan dengan standar kinerja yang berlaku baik yang berasal dari rata-rata industri dan yang berasal dari standar Bank Indonesia. Pada tabel 4, kita dapat membandingkan nilai dari masing-masing variabel atau indikator keuangan (NPM, ROA dan ROE) untuk tiap-tiap tahunnya.

Dari sisi NPM, terlihat bahwa nilai-nilai yang dihasilkan tiap tahunnya mengalami fluktuasi, jika nilai dari kinerja indikator profitabilitas ini dibandingkan dengan kinerja rata-rata industri didapati kinerja tahun 2015 dan 2016 dinilai baik (sehat) dengan nilai 3.49% dan 3.32% diatas nilai rata-rata industri 3.06%. Hanya pada tahun 2014 kinerja keuangan perusahaan dinilai kurang baik karena nilai NPM sebesar 2.37% dibawah rata-rata industri 3.06%. Jika dibandingkan dengan standar kinerja dari Bank Indonesia, kinerja keuangan tahun 2015 dan 2016 dapat dikatakan baik/sehat karena berada dikisaran 3% - 9.5%. Sedangkan untuk tahun 2014, nilai kinerja keuangan masih dikatakan belum baik karena dibawah kisaran 3% - 9.5%. Kurang baiknya kinerja keuangan ditahun 2014 ini dapat disebabkan oleh faktor jumlah laba yang diperoleh dibandingkan dengan pendapatan.

Kinerja keuangan ROA selama tahun 2014 dan 2015 dapat dikatakan cukup baik/sehat karena berada diatas rata-rata industri sebesar 14.72%, namun disisi lain nilai ROA tahun 2014 berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 12.89%. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya perusahaan dalam management asset yang berdampak pada jumlah laba yang diperoleh pada tahun tersebut. Namun kinerja secara keseluruhan dari indikator ROA selama 2014-2016 jika dibandingkan dengan standar BI menunjukkan hasil yang sangat baik karena berada diatas kisaran 0.5% - 1.25%.

Penilaian kinerja yang menyangkut bagaimana pengelolaan terhadap setiap investasi modal perusahaan dalam menghasilkan laba (ROE) menunjukkan trend yang baik sepanjang tahun 2014-2015. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan nilai ROE pada dua tahun tersebut yang berada diatas rata-rata industri dan standar BI, yang menunjukkan pula bahwa upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan terbukti telah efektif dalam menghasilkan keuntungan. Hanya pada tahun 2016 kinerja keuangan ROE dapat dikatakan kurang baik jika dibandingkan dengan rata-rata industri namun jika dibandingkan dengan standar BI nilai yang dihasilkan angka 13.40% berada diatas kisaran 5% - 12.5%. Dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2014-2016 keseluruhan kinerja keuangan khususnya kinerja profitabilitas dinyatakan baik/sehat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penilaian kinerja keuangan NPM, ROA dan ROE selama tahun 2014-2016 dapat dikatakan baik, hal ini tercermin dari nilai masing-masing indikator kinerja keuangan tersebut. Nilai-nilai NPM menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja kemampuan yang baik, sedangkan nilai-nilai ROA dan ROE juga menunjukkan keoptimalan perusahaan dalam pengelolaan asset dan modalnya dalam menghasilkan keuntungan.

Penilaian kualitas dari kinerja keuangan dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai-nilai dari NPM, ROA dan ROE dengan rata-rata industri serta standar pengukuran Bank Indonesia. Hasil penilaian memperlihatkan bahwa NPM pada tahun 2014 menunjukkan kinerja yang kurang baik karena berada dibawah rata-rata industri 3.06% dan dibawah standar BI pada kisaran 3% - 9.5%. Untuk kinerja ROA dan ROE sepanjang tahun 2014-2015 dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik karena nilai yang dihasilkan berada diatas rata-rata industri dan standar BI, tidak demikian halnya pada tahun 2016 kinerja ROA dan ROE dikatakan kurang baik karena dibawah rata-rata industri, namun jika dibandingkan dengan standar BI dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.

Perlu adanya upaya dari pihak perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pendapatan dengan meningkatkan kapasitas produksi atau aktivitas operasional, agar kinerja keuangan di masa mendatang.

REFERENSI

- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, I. (2011). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, S. S. (2007). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Edisi Kesatu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, S. S. (2010). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, Bank. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Diambil dari : http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PBI_6-10-2004_sist-Penilaian-TKS-Bank.pdf (diakses tanggal 13 Juni 2017).
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke 1-5*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komala, L. A. (2013). The Effects of Profitability Ratio, Liquidity, and Debt towards

- Investment Return. *Journal of Business and Economics* ISSN 2155-7950, USA November 2013, Volume 4, No. 11, 1176-1186.
- Munawir, S. (2007). *Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat*. Jogjakarta: Liberty.
- Sugiono, A. (2009). *Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Sutrisno. (2007). *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Konosia.
- Warren, Hans. (2017). Profitability Ratio: Definition, Formula, Analysis & Example. 2017. Diambil dari :
<http://study.com/academy/lesson/profitability-ratio-definition-formula-analysis-example.html> (diakses tanggal 22 Mei 2017)

Analisis Kinerja Keuangan BCA Periode 2011-2015 Dengan Rasio Profitabilitas

Dian Indah Sari

Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Akademi Manajemen Informatika & Komputer Bina Sarana Informatika
AMIK BSI Bekasi
Jl. Cut Mutiah No.88 Bekasi
dian.dhr@bsi.ac.id

Abstract - Financial statement analysis will help the company to estimate the level of risk, uncertainty and result in the formulation of a better plan. Financial statement analysis aims to determine the extent to which the achievement of work has been achieved by all divisions in the company. One of the financial statement analysis is Profitability ratio. Profitability ratios are used to measure the company's ability to earn profits. The purpose of this study is to determine and identify financial performance at Bank Central Asia Tbk period 2011 to 2015. In this study, the authors use three types of data collection methods is library research Reading literature and books that examine theories about profitability ratios and the theoretical basis of the content of writing. Observations of non-behavioral methods of observation of financial statements published by BCA Tbk during the period of 2011 and 2015. The method of taking the conclusion that after the analysis process has been completed, then the conclusion is drawn by drawing conclusions from the data analysis done before. Based on the results of the discussion can be summarized as follows based on the financial statements of BCA there is a decrease in OM from 2011 to 2015. Based on the financial statements of BCA there is a decreased NPM from 2011 to 2015. Based on BCA's financial statements there is an increase of ROI value from 2011 to 2015. Based on financial statements BCA there is a decreased the value of ROE from 2011 to 2015. Based on BCA's financial report, there is an increase of ROA value from 2011 to 2015.

Key words : Ratio Analysis, Financial Performance, Profitability

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia tersedia bank yang melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan contohnya BNI, BRI, BTN, Mandiri, Bukopin, Mega, BJB dan BCA. BCA adalah bank yang membantu masyarakat di bidang keuangan seperti menyediakan dana untuk usaha dan lain-lain. Dalam menjalankan bisnis perusahaan harus memiliki rencana bisnis yang baik agar tetap memperoleh keuntungan. Rencana bisnis tidak terlepas dari resiko dan ketidakpastian. Perusahaan memiliki kinerja baik jika mampu memperoleh keuntungan. Untuk dapat memperoleh keuntungan perusahaan harus memahami analisa laporan keuangan. Analisis laporan keuangan akan membantu perusahaan untuk mengestimasi tingkat resiko, ketidakpastian dan menghasilkan perumusan rencana yang lebih baik.

Analisa laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana prestasi kerja yang telah tercapai oleh semua divisi yang ada di perusahaan tersebut. Salah satu analisa laporan keuangan adalah rasio Profitabilitas. Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Rasio Profitabilitas terdiri dari

Operating Income (OM), Net Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Return On Asset (ROA).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi kinerja keuangan pada Bank Central Asia Tbk periode 2011 sampai 2015 menggunakan rasio profitabilitas.

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Munawir, 2007) mengatakan bahwa "laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan".

Menurut (Sugiono dan Untung, 2008) mengatakan bahwa "laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan".

Menurut (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) mengatakan bahwa "laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Dari pendapat beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Jenis Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca

Menurut (Hery, 2012) "Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Hubungan antara aktiva, kewajiban dan ekuitas dapat dirumuskan kedalam sebuah persamaan akuntansi : Aktiva = Kewajiban + Ekuitas.

Menurut (Prihadi, 2012). Elemen Neraca sebagai berikut :

Aktiva Lancar (*Current Asset*)

- a. Kas/bank
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang usaha
- d. Piutang lain
- e. Persediaan
- f. Biaya dibayar dimuka
- g. Uang muka pajak
- h. Pendapatan masih harus diterima

Aktiva Tidak Lancar

- a. Aset tetap dengan umur terbatas
- b. Aset tetap dengan umur tidak terbatas
- c. Aset lain-lain

Hutang (*Liabilities*) Jangka Pendek

- a. Utang usaha
- b. Biaya yang masih harus dibayar
- c. Pendapatan diterima dimuka
- d. Utang pajak
- e. Utang cerukan
- f. Utang bank
- g. Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun

Hutang (*Liabilities*) Jangka Panjang

- a. Utang obligasi
- b. Utang sewa
- c. Utang bank
- d. Utang lain-lain

Ekuitas

- a. Modal dasar
- b. Modal disetor
- c. Agio saham
- d. Saldo laba
- e. Cadangan

2. Laporan Rugi Laba

Menurut (Kasmir, 2012) "Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu". Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi menurut (Kasmir, 2012), meliputi jenis-jenis pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Kemudian laporan laba rugi juga melaporkan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan berikut jumlahnya (nilai uangnya) dalam periode yang sama. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan terdapat selisih jika dikurangkan. Selisih dari jumlah pendapatan dan biaya ini disebut laba atau rugi.

Bentuk Laporan Laba Rugi menurut (Munawir, 2010) yaitu :

1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikutidengan harga pokok dari barang yang dijual sehingga diperoleh laba kotor.
2. Bagian yang menunjukkan biaya –biaya operasional yang terdiri dari Biaya Penjualan dan biaya Umum/Administrasi.
3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi pokok perusahaan (*Non operating/financial income dan expenses*)
4. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang *insidental (extra ordinary gain or loss)* sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

Bentuk Laporan Laba Rugi menurut (Kasmir, 2012) yaitu :

1. Bentuk tunggal (*single step*)
Bentuk tunggal atau *single step* merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan, baik pokok (operasional) maupun diluar pokok (non operasional) dijadikan satu, kemudian jumlah biaya pokok dan diluar pokok dijadikan satu.
2. Bentuk majemuk (*multiple step*)
3. Bentuk majemuk atau *multiple step* merupakan pemisahan antara komponen usaha pokok (operasional) dengan diluar pokok (non operasional). Artinya terlebih dahulu dikurangi antara penghasilan pokok dengan biaya pokok, kemudian baru ditambahkan dengan hasil pengurangan penghasilan di luar pokok dengan biaya di luar pokok.

3. Laporan Perubahan Modal

Menurut (Kasmir, 2012), Laporan Perubahan Modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal. Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan modal menurut (Kasmir, 2012), meliputi jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini, jumlah rupiah tiap jenis modal, jumlah rupiah modal yang berubah, sebab-sebab berubahnya modal dan jumlah rupiah modal sesudah perubahan.

4. Laporan Arus Kas

Menurut (Kasmir, 2012) "Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan dimana arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan".

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2012) "Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu". Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menaksirkannya.

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2012) Tujuan Laporan Keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Pengertian Analisa Rasio

Menurut (Sugiono dan Untung, 2008) "analisa rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan".

Jenis Analisis Rasio

Menurut (Prihadi, 2012) ada beberapa cara mengelompokkan rasio keuangan sebagai berikut :

1. *Aktivitas (Activity)*
Rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memutar dana.
2. *Likuiditas (Liquidity)*
Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
3. *Profitabilitas (Profitability)*
Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. *Solvabilitas (Solvability)*
Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
5. *Ukuran Pasar (Market Measure)*
Rasio ini mengaitkan antara kondisi internal perusahaan dengan persepsi pasar.

Pengertian Rasio Profitabilitas

Rasio *profitabilitas* menurut kasmir adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. (Kasmir, 2012). Menurut (Prihadi, 2012) Rasio *profitabilitas* adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Tujuan Rasio Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2012) Tujuan penggunaan Rasio Profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan antara lain :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut (Werner, 2013) terdapat 5 jenis rasio profitabilitas antara lain :

1. *Operating Income (OM)*

Menurut Werner (2013 :62) Operating Income merupakan kemampuan manajemen mengubah aktivitasnya menjadi laba. Operating income sering juga disebut laba sebelum bunga dan pajak dengan catatan bahwa di perusahaan tersebut tidak terdapat pendapatan non operasional.

$$OM = \frac{EBIT}{Revenue}$$

2. Net Profit Margin (NPM)

Menurut (Werner, 2013) Net Profit Margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan

$$NPM = \frac{Net\ Profit\ Margin}{Revenue}$$

3. Return on Investment (ROI)

Menurut (Kasmir, 2012) Return on Investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

$$Return\ On\ Investment\ (ROI) = \frac{Earning\ After\ Interest\ and\ Tax}{Total\ Assets}$$

4. Return on Equity (ROE)

Menurut (Kasmir, 2012) Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio inimenunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

$$Return\ on\ Equity\ (ROE) = \frac{Earning\ After\ Interest\ and\ Tax}{Equity}$$

5. Return On Asset (ROA)

Menurut (Werner, 2013) Return On Asset mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset.

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$$

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu studi pustaka (library research) dengan membaca literatur dan buku-buku yang mengkaji teori tentang rasio *profitabilitas* dan landasan teori dari isi penulisan. Observasi non perilaku berupa metode pengamatan laporan keuangan yang diterbitkan oleh BCA Tbk selama periode 2011 dan 2015. Metode pengambilan kesimpulan yaitu setelah proses analisa telah selesai dilakukan, maka dilakukan pengambilan kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari analisa data yang dilakukan sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Data Keuangan Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan hasil penelitian pada BCA Tbk, penulis memperoleh data keuangan BCA pada tahun 2011 sampai 2015 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Asset, Ekuitas, Penjualan, Laba Sebelum Pajak, Laba Setelah Pajak, Laba Per Lembar Saham BCA Per 31 Desember 2011- 2015

Ket	2011	2012
Jumlah Asset	381,908,353	442,994,197
Jumlah ekuitas	42,027,340	51,897,942
Penjualan	24,048,708	27,613,956
Laba Sebelum Pajak	13,618,758	14,686,046
Laba Setelah pajak	10,770,209	11,718,460
Laba Per Lembar Saham	Rp 444	Rp 480
Sumber : idx.co.id		
	2013	2014
	2015	

496,304,573	553,155,534	594,372,770
63,966,678	75,725,690	89,624,940
33,725,807	41,372,709	47,876,172
17,815,606	20,741,121	22,657,114
14,256,239	16,364,508	17,691,505
Rp 579	Rp 669	Rp 731

Sumber : idx.co.id

Data keuangan yang diperoleh dari Neraca dan Laporan Laba Rugi BCA Tbk periode 2011 sampai 2015 menunjukkan bahwa Asset mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015. Ekuitas mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015. Penjualan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015. Laba sebelum pajak mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015. Laba setelah pajak mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015. Laba per lembar saham mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015.

3.2. Rasio Profitabilitas Bank Central Asia Tbk

Rasio *profitabilitas* adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (*profitabilitas*) berikut ini diberikan beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut.

1. OM

$$\begin{aligned} 2011 &= \text{EBIT} : \text{Revenue} \\ &= 13.618.758 : 24.048.708 \\ &= 0,5663 \\ &= 56,63 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2012 &= \text{EBIT} : \text{Revenue} \\ &= 14.686.046 : 27.613.956 \\ &= 0,5318 \\ &= 53,18 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2013 &= \text{EBIT} : \text{Revenue} \\ &= 17.815.606 : 33.725.807 \\ &= 0,5282 \\ &= 52,82 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2014 &= \text{EBIT} : \text{Revenue} \\ &= 20.741.121 : 41.372.709 \\ &= 0,5013 \\ &= 50,13 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 &= \text{EBIT} : \text{Revenue} \\ &= 22.657.114 : 47.876.172 \\ &= 0,4732 \\ &= 47,32 \% \end{aligned}$$

2. NPM

$$\begin{aligned} 2011 &= \text{Net Profit Margin} : \text{Revenue} \\ &= 10.770.209 : 24.048.708 \\ &= 0,4478 \\ &= 44,78 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2012 &= \text{Net Profit Margin} : \text{Revenue} \\ &= 11.718.460 : 27.613.956 \\ &= 0,4244 \\ &= 42,44 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2013 &= \text{Net Profit Margin} : \text{Revenue} \\ &= 14.256.239 : 33.725.807 \\ &= 0,4227 \\ &= 42,27 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2014 &= \text{Net Profit Margin} : \text{Revenue} \\ &= 16.364.508 : 41.372.709 \\ &= 0,3955 \\ &= 39,55 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 &= \text{Net Profit Margin} : \text{Revenue} \\ &= 17.691.505 : 47.876.172 \\ &= 0,3695 \\ &= 36,95 \% \end{aligned}$$

3. ROI

$$\begin{aligned} 2011 &= \text{Earning After Interest and Tax} : \text{Total Assets} \\ &= 10.770.209 : 381.908.353 \\ &= 0,0282 \\ &= 2,82 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2012 &= \text{Earning After Interest \& Tax} : \text{Total Assets} \\ &= 11.718.460 : 442.994.197 \\ &= 0,0265 \\ &= 2,65 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2013 &= \text{Earning After Interest and Tax} : \text{Total Assets} \\ &= 14.256.239 : 496.304.573 \\ &= 0,0287 \\ &= 2,87 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2014 &= \text{Earning After Interest \& Tax} : \text{Total Assets} \\ &= 16.364.508 : 553.155.534 \\ &= 0,0296 \\ &= 2,96 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 &= \text{Earning After Interest and Tax} : \text{Total Assets} \\ &= 17.691.505 : 594.372.770 \\ &= 0,0298 \\ &= 2,98 \% \end{aligned}$$

4. ROE

$$\begin{aligned} 2011 &= \text{Earning After Interest and Tax} : \text{Equity} \\ &= 10.770.209 : 42.021.885 \\ &= 0,2563 \end{aligned}$$

= 25,63 %

2012 = Earning After Interest and Tax : Equity
 = 11.718.460 : 51.897.520
 = 0,2258
 = 22,58 %

2013 = Earning After Interest and Tax : Equity
 = 14.256.239 : 63.958.004
 = 0,2229
 = 22,29 %

2014 = Earning After Interest and Tax : Equity
 = 16.364.508 : 75.726.553
 = 0,2161
 = 21,61 %

2015 = Earning After Interest and Tax : Equity
 = 17.691.505 : 89.622.619
 = 0,1974
 = 19,74 %

5. ROA

2011 = Net Income : Total Asset
 = 24.048.708 : 381.908.353
 = 0,063
 = 6,30 %

2012 = Net Income : Total Asset
 = 27.613.956 : 442.994.197
 = 0,0623
 = 6,23 %

2013 = Net Income : Total Asset
 = 33.725.807 : 496.304.573
 = 0,068
 = 6,80 %

2014 = Net Income : Total Asset
 = 41.372.709 : 553.155.534
 = 0,0748
 = 7,48 %

2015 = Net Income : Total Asset
 = 47.876.172 : 594.372.770
 = 0,0806
 = 8,06 %

Berdasarkan data pada tabel 1, maka diperoleh hasil perhitungan nilai OM, NPM, ROI, ROE, ROA BCA sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai Rasio OM

Tahun	EBIT	Revenue	%
2011	13.618.758	24.048.708	56,63 %
2012	14.686.046	27.613.956	53,18 %
2013	17.815.606	33.725.807	52,82 %
2014	20.741.121	41.372.709	50,13 %
2015	22.657.114	47.876.172	47,32 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2016)

Tabel 3. Nilai rasio NPM

Tahun	Net Profit Margin	Revenue	%
2011	10.770.209	24.048.708	44,78 %
2012	11.718.460	27.613.956	42,44 %
2013	14.256.239	33.725.807	42,27%
2014	16.364.508	41.372.709	39,55 %
2015	17.691.505	47.876.172	36,95 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2016)

Tabel 4. Nilai Rasio ROI

Tahun	Earning After Interest and Tax	Total Assets	%
2011	10.770.209	381.908.353	2,82 %
2012	11.718.460	442.994.197	2,65 %
2013	14.256.239	496.304.573	2,87 %
2014	16.364.508	553.155.534	2,96 %
2015	17.691.505	594.372.770	2,98 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2016)

Tabel 5. Nilai Rasio ROE

Tahun	Earning After Interest and Tax	Equity	%
2011	10.770.209	42.021.885	25,63 %
2012	11.718.460	51.897.520	22,58 %
2013	14.256.239	63.958.004	22,29 %
2014	16.364.508	75.726.553	21,61 %
2015	17.691.505	89.622.619	19,74 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2016)

Tabel 6. Nilai Rasio ROA

Tahun	Net Income	Total Asset	%
2011	24.048.708	381.908.353	6,30 %
2012	27.613.956	442.994.197	6,23 %
2013	33.725.807	496.304.573	6,80 %
2014	41.372.709	553.155.534	7,48 %
2015	47.876.172	594.372.770	8,06 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2016)

Tabel 7. Nilai Rasio OM, NPM, ROI, ROE, ROA BCA Periode 2011 – 2015

Nilai Rasio	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
OM	56,63	53,18	52,82	50,13	47,32
NPM	44,78	42,44	42,27	39,55	36,95
ROI	2,82	2,65	2,87	2,96	2,98
ROE	25,63	22,58	22,29	21,61	19,74

ROA	6,30	6,23	6,80	7,48	8,06
-----	------	------	------	------	------

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2016)

Berdasarkan hasil perhitungan analisa rasio *profitabilitas* laporan keuangan pada BCA Tbk pada tahun 2011 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. OM

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa pada tahun 2011, Rp.1 penjualan yang dimiliki perusahaan akan mampu memberikan laba operasi sebesar Rp. 0,566. Pada tahun 2012, Rp.1 penjualan yang dimiliki perusahaan akan mampu memberikan laba operasi sebesar Rp. 0,532. Pada tahun 2013, Rp.1 penjualan yang dimiliki perusahaan akan mampu memberikan laba operasi sebesar Rp. 0,528. Pada tahun 2014, Rp.1 penjualan yang dimiliki perusahaan akan mampu memberikan laba operasi sebesar Rp. 0,501. Pada tahun 2015, Rp.1 penjualan yang dimiliki perusahaan akan mampu memberikan laba operasi sebesar Rp. 0,473. Berdasarkan nilai OM tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat OM BCA semakin menurun, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA mengalami penurunan.

2. NPM

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa pada tahun 2011, Rp 1 penjualan akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp. 0,448. Pada tahun 2012, Rp 1 penjualan akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp. 0,424. Pada tahun 2013, Rp 1 penjualan akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp. 0,423. Pada tahun 2014, Rp 1 penjualan akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp. 0,396. Pada tahun 2015, Rp 1 penjualan akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp. 0,369. Berdasarkan nilai NPM tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat NPM BCA semakin menurun, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA mengalami penurunan.

3. ROI

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa pada tahun 2011, Rp 1 aset yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan laba setelah bunga dan pajak sebesar Rp 0,028. Pada tahun 2012, Rp 1 aset yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan laba setelah bunga dan pajak sebesar Rp 0,027. Pada tahun 2013, Rp 1 aset yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan laba setelah bunga dan pajak sebesar Rp 0,029. Pada tahun 2014, Rp 1 aset yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan laba setelah bunga dan pajak sebesar Rp 0,029. Pada tahun 2015, Rp 1 aset yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan laba setelah bunga dan pajak

sebesar Rp 0,030. Berdasarkan nilai ROI tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat ROI BCA Assurance menurun kemudian meningkat, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA mengalami penurunan dan peningkatan.

4. ROE

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa pada tahun 2011, Rp 1 modal yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,256. Sedangkan pada tahun 2012, Rp 1 modal yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,226. Pada tahun 2013, Rp 1 modal yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,223. Pada tahun 2014, Rp 1 modal yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,216. Pada tahun 2015, Rp 1 modal yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,197. Berdasarkan nilai ROE tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat ROE BCA semakin menurun, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA tahun 2009 – 2013 mengalami penurunan.

5. ROA

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa pada tahun 2011, Rp 1 aset akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,063. Pada tahun 2012, Rp 1 aset akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,062. Pada tahun 2013, Rp 1 aset akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,068. Pada tahun 2014, Rp 1 aset akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,075. Pada tahun 2015, Rp 1 aset akan mampu memberikan laba neto sebesar Rp 0,081. Berdasarkan nilai ROA tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat ROA BCA semakin meningkat, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA mengalami peningkatan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kinerja keuangan pada Bank Central Asia Tbk periode 2011 sampai 2015 menggunakan rasio profitabilitas.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. OM

Berdasarkan nilai OM tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat OM BCA semakin menurun, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA mengalami penurunan.

2. NPM

Berdasarkan nilai NPM tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat NPM BCA semakin

- menurun, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA mengalami penurunan.
3. **ROI**
Berdasarkan nilai ROI tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat ROI BCA Assurance menurun kemudian meningkat, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA mengalami penurunan dan peningkatan,
 4. **ROE**
Berdasarkan nilai ROE tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat ROE BCA semakin menurun, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA mengalami penurunan.
 5. **ROA**
Berdasarkan nilai ROA tahun 2009 – 2013 menunjukkan tingkat ROA BCA semakin meningkat, hal ini menunjukkan kinerja keuangan BCA mengalami peningkatan.
 6. Manfaat dari perhitungan rasio *profitabilitas* ini untuk BCA adalah sebagai alat untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. serta mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
 7. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan tambahan rasio lain untuk menghitung *profitabilitas* dan kinerja keuangan perusahaan sehingga hasilnya akan semakin baik dalam mengambil keputusan.
 8. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode yang lebih lama untuk menghitung *profitabilitas* dan kinerja keuangan perusahaan sehingga perkembangan kemajuan kinerja keuangan perusahaan lebih terlihat jelas.

Prihadi, Toto. (2012). Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS dan PSAK. Jakarta: ppm.

Sugiono, Arief dan Edy Untung. (2008). Dasar Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Grasindo.

Syafri Harahap, Sofyan. (2008). Analistis kritis atas Laporan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

PROFIL PENULIS

DIAN INDAH SARI, SE.AK.MM, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan Akuntansi UNSRI Universitas Negeri Sriwijaya Palembang, lulus tahun 2000. Memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas BSI Bandung, lulus tahun 2014. Saat ini menjadi dosen AMIK BSI Cikarang.

REFERENSI

Hery. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara

Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1, Revisi 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Jumingan. (2009). Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasmir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press

Munawir, S. (2007). Analisa Laporan Keuangan. Edisi ke-4. Yogyakarta: Liberty.

Prastowo, Dwi. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat

Wangsit Supeno

Program Studi Komputer Akuntansi
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta
Jalan RS. Fatmawati No. 24 Jakarta, Indonesia
e-mail: wangsit.wss@bsi.ac.id

***Abstract** - Rural Bank (BPR) is a bank financial institution having intermediation function. Its main activity is to raise public funds and redistribute it in the form of credit to the community. Bank Perkreditan Rakyat in distributing credit must have a source of funds that can meet the operational needs, both for the purposes of lending, payment of liabilities to customers and other operations. The largest source of Rural Bank funds to date comes from public savings, in the form of time deposits and savings. The source of funds from this society is needed by Rural Bank in increasing the amount of credit distribution. With the increase in the number of loan disbursements, it can have an impact on the increase in the amount of income and profit. The results of research and data analysis sourced from the Financial Services Authority (OJK), from 2014 to June 2017 showed the performance of Rural Banks in fund raising and fund distribution in the form of credit is assessed to experience an ever-increasing growth, so Rural Banks can continue to improve cooperation dengan customers and can increase public confidence. Deposit Guarantee Program from Deposit Insurance Agency (LPS) is very helpful to increase public and customer trust to Rural Banks. With the increasing availability of funds, the People's Credit Bank has the potential to increase lending to the community in a healthy way.*

Key word : *Performance, Funds, Credit*

I. PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan perbankan yang memiliki fungsi intermediasi dengan kegiatan utama menghimpun dana simpanan dari masyarakat, berupa Tabungan dan Deposito berjangka, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Dengan semakin meningkatnya ekspansi penyaluran kredit BPR dengan jenis modal kerja, investasi dan konsumtif kepada masyarakat, maka kebutuhan akan dana untuk ketersediaan likuiditas operasional BPR juga semakin besar.

Sumber pendanaan operasional BPR terdiri atas dana intern dan Ekstern. Sumber dana sendiri atau intern berasal dari modal yang meliputi setoran modal para pemegang saham BPR yang besaran setoran modal minimalnya disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditambah dengan jumlah cadangan dan laba baik tahun lalu maupun tahun berjalan. Sedangkan sumber dana BPR dari eksternal berasal dari masyarakat atau disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Selain itu sumber dana eksternal bersumber dari Pinjaman baik dengan bank lain atau pihak lain non bank. Terdapat sumber dana lainnya yang berupa titipan sementara dari kegiatan transaksi yang belum selesai dan dananya masih mengendap seperti kewajiban segera.

Adanya kebutuhan dana operasional yang terus meningkat, maka manajemen beberapa BPR selain mengandalkan pada sumber dana dari simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), maka sumber penyediaan dana operasional BPR yang

cukup diandalkan adalah berasal dari pinjaman dengan bank lain. BPR mendapatkan fasilitas pinjaman Modal Kerja dari beberapa bank umum dalam bentuk program *linkage*. Kerjasama ini membantupenyediaan kebutuhan dana operasional BPR, terlebih BPR-BPR yang tergolong ekspansif dalam penyaluran kredit dan peningkatan asset, sebab jika bertumpu keseluruhannya pada dana sendiri dari Permodalan dan Simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga, BPR akan mengalami hambatan dalam penyediaan kebutuhan dana untuk penyaluran kredit.

Hal yang perlu mendapat perhatian manajemen BPR dalam penyediaan dana operasional adalah biaya dana yang akan menjadi beban BPR, yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional BPR dan suku bunga kredit yang akan ditawarkan. Selain itu, sesuai Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kegiatan utama BPR adalah menghimpun dana simpanan masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka. Kedua sumber dana simpanan tersebut merupakan bagian penting dalam struktur pendanaan BPR yang harus terus ditingkatkan agar operasional BPR lebih efisien dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu dalam penyaluran kredit BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko yang baik, sebab BPR harus bertanggung jawab atas penyediaan dana untuk kebutuhan pengembalian dana simpanan nasabah dan juga untuk pengembalian pinjaman kepada kreditur baik antar bank maupun non bank atas dana yang telah diterima BPR.

Maksud dari penulisan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis lebih jauh mengenai kinerja penghimpunan dana operasional BPR untuk

meningkatkan penyediaan dana penyaluran kredit yang merupakan studi kasus di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, di mana data penelitiannya digunakan bersumber dari Laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan penelitian sesuai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja penghimpunan Dana BPR secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017.
2. Untuk mengetahui kinerja penyaluran kredit BPR secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017.

Tujuan penelitian sesuai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja penghimpunan Dana BPR secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017.
2. Bagaimana kinerja penyaluran kredit BPR secara Nasional selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 ?

1.1. Penghimpunan Dana

Lembaga Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR konvensional sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana di maksud di atas.

Menurut (Triandanu, 2006) kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan

dengan cara-cara tertentu sehingga sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.

Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi antara lain hal-hal berikut :

1. Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Gambaran sebuah bank secara umum di mata masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Banyak faktor yang dapat memengaruhi gambaran sebuah bank di mata masyarakat, seperti pelayanan, keadaan keuangan, berita-berita di mass media tentang bank tersebut, dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat pada sebuah bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan bank tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan efisien dan sesuai rencana penggunaan dananya.
2. Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh (*expected rate of return*) oleh penyimpan dana lebih tinggi dibanding pendapatan dari alternatif investasi lain dengan tingkat risiko yang seimbang. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperkirakan oleh calon penyimpan dana ini, maka semakin rendah sebuah bank untuk menarik dana dari calon penyimpan dananya.
3. Risiko penyimpanan dana. Apabila sebuah bank dapat memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah diperjanjikan, maka masyarakat semakin bersedia untuk menempatkan dananya di bank tersebut.
4. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana. Pelayanan yang baik akan membuat penyimpan dana merasa dihargai, diperhatikan dan dihormati, sehingga merasa senang untuk terus bertransaksi keuangan dengan bank tersebut. Pelayanan ini bisa berupa pelayanan dari petugas bank, pemberian hadiah, atau pemberian fasilitas yang lain.

Menurut (Triandanu, 2006), pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk meng-himpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu :

1. Dana sendiri
Meskipun untuk suatu usaha bank proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivasnya, namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Begitu pentingnya proporsi dana sendiri dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR). Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*-CAR). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri akan dengan cepat habis untuk menutup

kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat sangat diragukan. Kemampuan bank untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat juga menjadi diragukan. Penurunan kemampuan ini sangat mungki untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap suatu bank ini selanjutnya sangat membahayakan kelangsungan usaha bank itu.

2. Dana dari Deposan

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan. Mengingat, menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, maka sumber dana masyarakat yang bisa diterima hanya tabungan dan deposito berjangka. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui antarbank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah tabungan. Cara-cara tersebut antara lain : hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, dan fasilitas kartu ATM. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas unjuk. Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangkanya diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (*automatic roll over – ARO*) atas deposito berjangka tersebut. Bunga atas deposito berjangka ini dapat ditarik tunai setiap jangka waktu tertentu ataupun ditransfer ke suatu rekening tabungan untuk menampung bunga atas deposito tersebut serta juga untuk menampung dana deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi. Bank-bank tertentu juga memberikan fasilitas agar bunga deposito yang tidak ditarik oleh pemiliknya dapat ditambahkan dalam simpanan pokok deposito, sehingga nilai deposito berjangkanya bertambah besar. Pada dasarnya sebelum jatuh tempo, simpanan ini tidak dapat ditarik, namun apabila deposan tetap menginginkan penarikannya sebelum jatuh tempo,

maka biasanya bank mengenakan denda atau biaya administrasi atas penarikan tersebut. Kelebihan dana deposito ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang kapan dana itu akan ditarik, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sebagai konsekuensi dari kelebihan tersebut, maka bank harus membayar dana ini dengan tingkat bunga yang relatif besar dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk yang lain. Dengan kata lain simpanan dalam bentuk deposito berjangka tidak bisa disebut sebagai sumber penghimpunan dana bagi bank yang murah. Di sisi deposan, nasabah cenderung lebih menyukai menyimpan kelebihan dananya dalam bentuk deposito berjangka sesuai jangka waktu yang diinginkan karena simpanan ini menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi.

3. Dana Pinjaman

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain berupa Pinjaman antar bank. Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

4. Sumber Dana Lain

Selain sumber dana dapat berasal dari dana sendiri, dana deposan dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana bank dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Menurut (Riyadi) sumber dana lain dapat berupa Kewajiban segera yang dapat dibayar, yaitu semua kewajiban rupiah yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso keluar yang belum dibayar dan semua kewajiban bank kepada Pemerintah Pusat, seperti Pajak Penghasilan yang belum disetor dan kewajiban pajak lainnya di mana bank yang bersangkutan bertindak sebagai Wajib Pungut Pajak (WAPU) yang harus segera disetorkan ke Kas Negara.

Menurut (Ali, 2004) Pertumbuhan aset bank pertama-tama akan ditentukan oleh keberhasilan bank dalam menghimpun dana, apakah dana dari permodalan bank sendiri atau sumber dana dari pihak ketiga (DPK). Makin besar modal suatu bank, maka makin tinggi pula *leverage* yang dimiliki oleh bank dalam menghimpun dana dari pihak ketiga yang memungkinkan bank memperbesar

earningasset-nya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank.

Namun demikian, perlu diwaspadai pula adanya berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank. Kelompok risiko berupa *financial risk* merupakan risiko yang dihadapi oleh bank dalam upayanya menghimpun dana tersebut. Berapa besar dan luasnya risiko yang dihadapi dalam menghimpun dana tersebut dipengaruhi oleh jenis sumber dana yang diterima bank. Sumber-sumber dana yang berbeda memberikan risiko yang berbeda pula. Sehingga, ada berbagai aspek perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh pemilik bank dalam upayanya menghimpun dana pihak ketiga itu, yang mencakup pertimbangan-pertimbangan dari segi likuiditas, tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko modal, risiko pasar serta risiko nilai tukar. Dalam kaitan itu, dikenal apa yang disebut dengan “operasi kredit pasif”, yaitu kiat-kiat yang dilakukan bank untuk menarik dana dari masyarakat dan “operasi kredit aktif” yaitu berupa kiat-kiat yang dilakukan oleh bank untuk mengelola dana yang berhasil dihimpunnya dengan melakukan penempatan dana secara aman dan menguntungkan.

1.2. Strategi Penghimpunan Dana

Menurut (Ali, 2004) dalam upaya untuk menghimpun dana, bank perlu menetapkan strategi dalam penghimpunan dana. Strategi pendanaan atau *funding strategy* ini dilaksanakan dengan menggunakan konsep-konsep pemasaran dana bank yang meliputi upaya untuk :

1. Menelusuri apa yang menjadi kebutuhan nasabah yang juga sejalan dengan strategi operasional bank.
2. Melakukan komunikasi yang efektif terhadap potensi nasabah bank, sehingga target pemasaran bank dapat dicapai.

Untuk itu bank perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan dan pengembangan produk-produk pendanaan, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan nasabah, penetapan jenis produk dan pengembangannya, baik yang merupakan *individual product* maupun yang merupakan *line product*. Gagasan dalam menetapkan dan mengembangkan produk yang didasarkan pada hasil identifikasi itu dapat diperoleh dari pemikiran karyawan bank sendiri, dari dewan direksi bank, modifikasi dari produk yang diluncurkan oleh bank-bank pesaing, media massa serta dari lembaga-lembaga keuangan lainnya.
2. Penetapan segmentasi pasar yang meliputi sektor-sektor pasar tertentu yang akan digarap, penciptaan produk-produk baru serta target waktu pemasaran yang dinilai paling efektif. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peniruan dari bank lainnya, maka bank harus telah menyiapkan pula diferensiasi atas produk.
3. Bank perlu melakukan pengembangan jasa

keuangan yang sejalan dengan pengembangan produk, dalam rangka menghadapi persaingan dari lembaga keuangan lainnya yang mungkin memasyarakatkan pula jenis produk yang sejenis. Dalam kaitan ini, penguasaan bank atas penerapan sistem teknologi informasi sebagai penunjang utama kegiatan operasional bank merupakan persyaratan mutlak yang harus dapat dipenuhi oleh bank.

4. Modifikasi atas produk bank dan pengembangan citra bank. Produk-produk bank baik menyangkut produk pendanaan maupun produk jasa layanan serta produk penempatan dana bank, tidak dapat dilakukan secara eksklusif mengingat cepatnya terjadi peniruan dengan berbagai cara modifikasi yang dilakukan bank pesaing. Dengan demikian bank harus senantiasa siap dengan modifikasi atas berbagai jenis produk yang diluncarkannya. Namun hendaknya dalam pengembangan dan modifikasi yang dilakukan itu sejalan dengan pengembangan citra bank secara spesifik. Artinya, bank tetap dapat dibentuk gambaran citra yang khas yang menjadi cirinya, apakah menyangkut trade mark atau brand name atas sesuatu produk yang diluncarkannya, semboyan atau slogan serta bentuk-bentuk layanan khas lainnya.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) umumnya konsumen dalam menyimpan uangnya di bank terdiri dari tiga alasan sebagai berikut :

1. Keamanan Menyimpan
Ini merupakan motivasi paling banyak dan paling penting dari nasabah ketika menyimpan dananya di bank. Dalam teori Maslow, ini merupakan motivasi untuk memenuhi kebutuhan safety. Motivasi ini muncul karena seseorang tidak mungkin menyimpan uangnya secara terus menerus di dalam rumah. Produk dana yang sering dipersepsikan dengan motivasi ini biasanya adalah Tabungan dan Giro.
2. Investasi
Alasan berikutnya adalah seseorang memerlukan produk dana dalam rangka untuk berinvestasi yang tentunya dengan harapan adanya imbal balik sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya konsumen dengan motivasi ini memiliki kelebihan dana yang relatif cukup besar sehingga mereka menginginkan sesuatu yang relatif lebih menghasilkan dibandingkan dengan hanya menyimpan saja. Produk dana yang biasanya sering ditawarkan bank untuk alasan ini adalah Deposito. Hal tersebut menjelaskan kenapa produk Deposito memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk dana yang lainnya namun juga memiliki konsekuensi persyaratan jangka waktu apabila nasabah ingin mengambil dananya di deposito.
3. Kenyamanan Transaksi Pembayaran
Selain kedua alasan tersebut di atas, motivasi lainnya yang terus berkembang adalah untuk alasan kenyamanan ketika konsumen harus melakukan transaksi pembayaran. Pengembangan

produk dan layanan dana untuk mengakomodasi kenyamanan transaksi tersebut terus dilakukan oleh bank saat ini seiring dengan perkembangan teknologi. Kenyamanan yang dimaksud di sini juga memiliki banyak dimensi seperti kemudahan, kecepatan, keleluasaan dan bahkan juga dimensi *prestige*. Produk yang dipersepsikan dengan kenyamanan transaksi ini biasanya adalah Tabungan Bisnis, Kartu Debit, Mobile Banking dan lain sebagainya.

1.3. Penyaluran Kredit

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut (Triandanu, 2006) salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalur-kan dana kepada masyarakat. Penerimaan yang utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung risiko yang relatif lebih tinggi daripada aktiva yang lain. Ditinjau dari segi likuiditasnya, penyaluran kredit mempunyai tingkat likuiditas yang lebih rendah daripada cadangan primer dan sekunder. Lebih lanjut likuiditas penyaluran kredit juga bervariasi tergantung pada jangka waktu kredit, dan kolektibilitas atau kemungkinan tertagihnya.

Menurut (Soedarto, 2007) usaha pokok bank adalah memberikan kredit tercermin dari hampir 70% - 80% assets bank berbentuk kredit yang diberikan. Demikian pula pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan perkreditan berupa pendapatan bunga dan provisi kredit. Bank yang menghadapi risiko kredit yang besar ditandai dengan besarnya kredit *non performing* atau kredit bermasalah akan menghadapi memburuknya *cash in flow* yang dampaknya dapat menimbulkan risiko likuiditas dan risiko lainnya. Penyebab timbulnya risiko kredit dapat terjadi karena faktor intern dan faktor ekstern. Kegagalan pemberian kredit BPR selama ini menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah lemahnya manajemen perkreditan di samping penyebab ekstern yang disebabkan oleh nakalnya nasabah, gagalnya usaha, dan tidak diketahuinya lokasi nasabah bersangkutan. Dengan meningkatnya persaingan yang dihadapi perbankan dewasa ini, membuat lingkungan perbankan menjadi risiko tinggi dalam pemberian kredit dan terbatasnya nasabah-nasabah yang layak untuk diberikan kredit. Beberapa manajemen bank mencari beberapa strategi antara lain dengan cara mengkonsentrasikan pada pangsa pasar tertentu yang dikenal pasarnya cukup baik, menghususkan pemberian kredit kepada sektor/sub sektor ekonomi tertentu sesuai dengan keahlian yang dimiliki bank; atau dengan cara membatasi pertumbuhan pemberian kredit agar

tidak terkena kewajiban menambah modal karena meningkatnya assets. Namun ada beberapa bank yang menganggap bahwa pemberian kredit merupakan bagian utama untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, secara agresif mencari nasabah-nasabah baru untuk kredit konsumsi dan kredit komersial yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi.

Menurut (Tohir, 2013), kemampuan bank untuk melempar kredit ke masyarakat merupakan kegiatan operasional bank diperoleh dari aktivitas tersebut. Apabila kita melihat sisi aktiva bank, maka akan dijumpai perkiraan pinjaman yang diberikan merupakan komponen terbesar. Demikian pula jika kita melihat sisi laporan rugi laba bank, maka sebagian besar pendapatan juga berasal dari bunga pinjaman yang telah kita berikan. Kredit sebagai perkiraan terbesar dalam harta bank bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia sebagai ciri umum penggunaan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh suatu bank. Oleh karena presentasinya yang sangat besar tersebut, kredit memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan baik buruknya operasi suatu bank. Bank yang berhasil biasanya dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan. Apabila pengelolaan kredit yang dilakukan salah, maka sebagian besar harta bank terancam bahaya besarnya kredit bermasalah. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemberian kredit yang akhirnya dapat merugikan bank bersangkutan, maka bank akan menyusun kebijaksanaan kredit dengan memperhitungkan segala faktor dan spek yang terintegrasi meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan penetapan perencanaan, proses pemberian kredit, pengaturan wewenang, penganalisisan kredit, pengadministrasian dan pengawasan kredit.

Menurut (Ali, 2004) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya jumlah Pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat yang dihimpun. Sesuai ketentuan dari Bank Indonesia dalam kaitan penilaian tingkat kesehatan bank, LDR yang berkisar antara 85% hingga maksimum 110% dinilai rasio LDR yang sehat. Bank dengan tingkat agresivitas yang tinggi (yang tercermin dari angka LDR-nya yang tinggi, di atas 110%) akan mengalami kesulitan likuiditas (sekali-gus penurunan rentabilitas). Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa loan dinilai sebagai *earning asset* bank yang kurang atau bahkan sangat tidak likuid. Dengan LDR yang tinggi, dapat diduga bahwa *cash in flow* dari pelunasan pinjaman dan pembayaran bunga dari debitur pada bank menjadi tidak sebanding dengan kebutuhan untuk memenuhi *cash outflow* penarikan dana-dana masyarakat dan deposito jatuh waktu.

Dapat diduga dengan LDR yang tinggi, bank secara potensial dapat mengalami kesulitan likuiditas.

Menurut (Riyadi, 2006), Rasio LDR adalah perbandingan antara Total Kredit yang Diberikan dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat

dihimpun oleh bank. LDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Maksimal LDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia sebesar 110%. Sebelum terjadi krisis moneter, jika menggunakan rumus seperti tersebut di atas dampaknya banyak bank yang akan LDR-nya mencapai di atas 110%, hal ini berakibat pada penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan menjadi tidak sehat. Untuk itu Bank Indonesia membuat kebijakan bahwa dalam perhitungan LDR murni sebagaimana tersebut di atas, digunakan perhitungan LDR *Extended* (LDR yang diperluas), di mana dana yang diterima bank terdiri atas Dana Pihak Ketiga ditambah dengan Kewajiban Segera Lainnya dan Modal Inti.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), salah satu faktor penilaian likuiditas menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) untuk menggambarkan berapa jumlah dana yang dimiliki telah disalurkan untuk kredit diukur dengan menggunakan parameter sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Kredit yang diberikan meliputi:

1. Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian sindikasi yang dibiayai bank lain.
2. Penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit yang diberikan jangka waktu lebih 3 bulan.
3. Penanaman kepada bank lain dalam bentuk kredit dalam rangka sindikasi.

Dana yang diterima:

1. Deposito dan Tabungan masyarakat
2. Pinjaman bukan dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan (di luar pinjaman subordinasi)
3. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan
4. Modal Inti
5. Modal Pinjaman

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode pustaka, dan pengkajian Data sekunder mengenai perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit BPR secara Nasional periode tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, bersumber dari Laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Volume 15 Nomor 07 bulan Juni 2017 yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan, dan regulasi yang berlaku. Penulis melakukan analisis *trend* berdasarkan data yang tersedia kemudian dilakukan interpretasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Penghimpunan Dana BPR Secara Nasional

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat untuk keperluan penyaluran kredit dan pemenuhan kebutuhan likuiditas lainnya, sehingga asset dan profit meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut, BPR harus memiliki struktur pendanaan dan sumber dana dari eksternal yang kuat dan cenderung stabil.

Kinerja penghimpunan dana BPR selama tiga tahun setengah terlihat pada tabel di bawah ini:

Dalam Miliar Rp.

Sumber Dana	Periode			
	2014	2015	2016	2017 *
Deposito	39,919	46,307	51,977	54,465
Tabungan	18,831	20,959	23,748	23,389
Antar Bank Pasiva	2,006	2,973	3,617	3,778
Pinjaman yang diterima	13,386	13,460	13,613	13,988
Kewajiban Segera	452	586	667	956
Jumlah	74,594	84,285	93,622	96,576
Pertumbuhan (Angka)		9,692	9,337	2,953
Pertumbuhan (%)		13.0%	11.1%	3.2%

* Posisi Juni 2017

Tabel 1. Kinerja Penghimpunan Dana BPR Tahun 2014 – Juni 2017

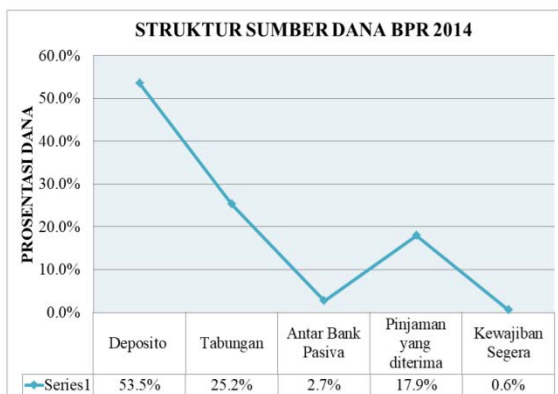
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dana BPR selama ini bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga berupa Deposito, Tabungan, dan didukung pendanaan dari Antar Bank Pasiva, Pinjaman yang Diterima serta Kewajiban Segera. Deposito berjangka BPR merupakan simpanan masyarakat yang memiliki tempo antara 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang bisa diambil setiap saat. Pendanaan Antar Bank Pasiva umumnya merupakan fasilitas pinjaman yang diterima BPR dari Bank Umum dalam bentuk *linkage*. Pendanaan dari Pinjaman yang diterima BPR dari lembaga pembiayaan di luar perbankan. Sedangkan sumber dana lain berupa kewajiban segera yang merupakan dana nasabah yang mengendap baik berupa Deposito yang jatuh waktu dan segera ditarik atau dana titipan pajak yang belum disetorkan ke kas negara.

Penghimpunan dana BPR yang bersumber dari eksternal secara jumlah dana keseluruhan *trend*-nya mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2014 jumlah dana sebesar Rp. 74.594 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp. 84.285 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 93.622 Miliar dan pada Juni tahun 2017 jumlah dana yang dapat dihimpun sebesar Rp. 96.576 Miliar.

Pertumbuhan kinerja penghimpunan dana BPR *trend*-nya cenderung menurun. Pada tahun 2015 dibanding penghimpunan dana tahun 2014 tumbuh sebesar 13,0%, sedang pada tahun 2016 dibanding penghimpunan dana tahun 2015 pertumbuhannya turun menjadi 11,1%, dan pada Juni 2017 dibanding penghimpunan dana tahun 2016 tumbuh 3,2%. Penurunan pertumbuhan dana keseluruhan pada tahun 2016 disebabkan dampak dari menurunnya pertumbuhan dana pihak ketiga deposito berjangka dari 16,0% pada tahun 2015, menjadi 12,2% pada tahun 2016. Selain itu juga terjadi penurunan pertumbuhan penggunaan fasilitas pinjaman antar bank dari 48,2% pada tahun 2015 turun menjadi 21,7% pada tahun 2016. Terdapat peningkatan pertumbuhan atas penghimpunan dana pihak ketiga tabungan dari 11,3% pada tahun 2015, tumbuh menjadi 13,3%. Sementara pada posisi Juni 2017 pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga deposito berjangka dibanding tahun 2016 hanya 4,8%. Sedang untuk pertumbuhan fasilitas pinjaman antar bank pasiva dibanding tahun 2016 tumbuh 4,4%. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada pos kewajiban yang segera dibayar, pada Juni tahun 2017 tumbuh 43,5% dibanding tahun 2016. Penghimpunan dana pihak ketiga tabungan, pada Juni 2017 turun 1,5% dibanding tahun 2016, hal ini bisa jadi dampak dari penarikan nasabah menjelang Idul Fitri. Penghimpunan dana pada tahun 2017 masih bisa mengalami perubahan pertumbuhan hingga akhir bulan Desember 2017.

Dalam hal struktur sumber dana BPR selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut ini:



Sumber : Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

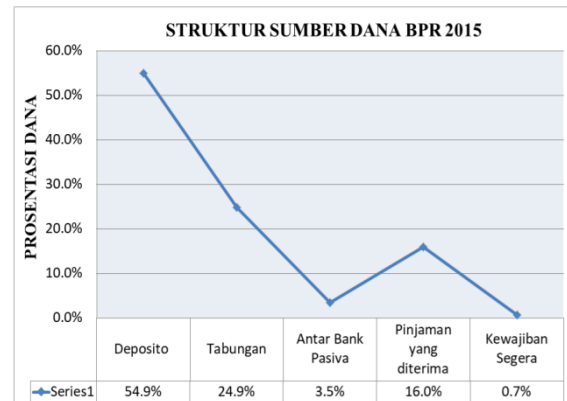
Gambar 1. Grafik Struktur Sumber Dana BPR Tahun 2014

Berdasarkan grafik pada Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa Struktur Sumber dana BPR pada tahun 2014 porsinya didominasi oleh dana masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu Deposito Berjangka di urutan pertama dan berikutnya Tabungan.

Deposito berjangka menempati porsi 53,5% dari

seluruh sumber dana. Tabungan menempati porsi 25,2% dari seluruh sumber dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi BPR telah berjalan dengan baik karena struktur dana BPR terbesar 78,7%, bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Selain dana pihak ketiga BPR didukung oleh dana dari pinjaman non bank yang porsinya menempati urutan ketiga yaitu 17,9% dari seluruh dana yang dihimpun.

Untuk memberikan gambaran struktur sumber dana BPR pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik



Sumber : Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

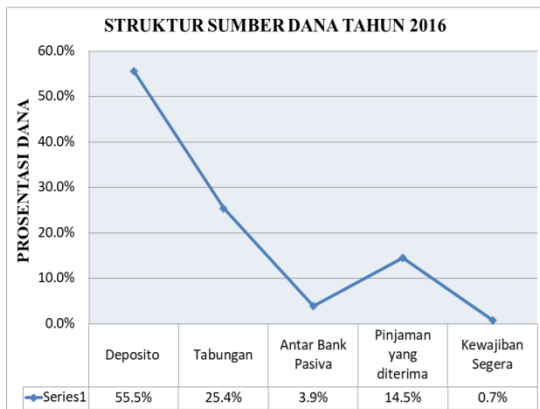
berikut ini:

Gambar 2. Grafik Struktur Sumber Dana BPR Tahun 2015

Berdasarkan grafik pada Gambar 2, Struktur Sumber dana BPR pada tahun 2015 porsi yang terbesar adalah dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu Deposito Berjangka di urutan yang pertama dan berikutnya adalah Tabungan.

Deposito berjangka menempati porsi 54,9% dari seluruh sumber dana yang dimiliki, dan ini jauh lebih besar dibanding tahun 2014 hanya 53,5%. Tabungan menempati porsi 24,9% dari seluruh sumber dana yang berarti mengalami penurunan yang mana sebelumnya adalah 25,2% dari seluruh sumber dana. Berdasarkan data tersebut telah terjadi pergeseran sumber dana, di mana BPR lebih mengandalkan dananya dari Deposito berjangka dibanding tabungan. Dari sisi stabilitas, simpanan deposito berjangka lebih stabil dibanding tabungan, sekalipun suku bunga deposito berjangka lebih tinggi dari tabungan. Kondisi ini menunjukkan fungsi intermediasi BPR masih berjalan dengan baik karena struktur dana BPR terbesar 79,8% bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Selain dana pihak ketiga BPR didukung oleh dana dari pinjaman non bank yang porsinya menempati urutan ketiga yaitu 16,0% dari seluruh dana yang dihimpun, yang artinya mengalami penurunan porsi dibanding pada tahun 2014 sebesar 17,9%.

Untuk memberikan gambaran struktur sumber dana BPR pada tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 3. Grafik Struktur Sumber Dana BPR Tahun 2016

Berdasarkan grafik pada Gambar 3, Struktur Sumber dana BPR pada tahun 2016 porsi yang terbesar masih dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu Deposito Berjangka di urutan yang pertama dan berikutnya adalah Tabungan.

Deposito berjangka menempati porsi 55,5% dari seluruh sumber dana yang dimiliki, dan ini jauh lebih meningkat dibanding tahun 2015 hanya 54,9%. Tabungan menempati porsi 25,4% dari seluruh sumber dana yang berarti mengalami peningkatan, di banding tahun 2015 adalah 24,9%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPR semakin meningkat, sehingga mereka bersedia menyimpan dananya di BPR. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa fungsi intermediasi BPR semakin baik karena struktur dana BPR terbesar 80,9% bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga. BPR juga menggunakan dana dari Pinjaman yang diterima dengan porsi dana sebesar 14,5% dari seluruh dana yang dihimpun, yang artinya mengalami penurunan porsi sumber dana dibanding tahun 2015 sebesar 16,0%.

Struktur sumber dana BPR pada tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber : Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 4. Grafik Struktur Sumber Dana BPR

Tahun 2017

Berdasarkan grafik pada Gambar 4, Struktur Sumber dana BPR pada tahun 2017 porsi yang terbesar masih dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu Deposito Berjangka di urutan yang pertama dan berikutnya adalah Tabungan.

Deposito berjangka menempati porsi 56,5% dari seluruh sumber dana yang dimiliki, dan ini jauh lebih meningkat dibanding tahun 2016 hanya 55,5%. Tabungan menempati porsi 24,2% dari seluruh sumber dana yang berarti mengalami penurunan, di banding tahun 2016 adalah 25,4%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPR semakin meningkat, sehingga mereka bersedia menyimpan dananya di BPR. Jika tabungan mengalami penurunan bisa jadi disebabkan karena adanya penarikan dana terkait Idul Fitri atau tahun ajaran baru. Kondisi ini masih menunjukkan bahwa fungsi intermediasi BPR semakin baik karena struktur dana BPR terbesar 80,7% bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga. BPR menggunakan dana dari Pinjaman yang diterima dengan porsi 14,5% dari seluruh dana yang dihimpun, sama dengan tahun 2016.

Berdasarkan uraian terkait penghimpunan dana BPR selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, dapat dijelaskan bahwa operasional BPR sumber dananya mayoritas berasal dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Fungsi intermediasi antar BPR dengan pemilik dana semakin baik, hal ini bisa disebabkan karena meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada BPR, dana mereka pun dijamin oleh LPS dan BPR memiliki produk-produk dana yang menarik, serta pelayanan BPR yang semakin baik. Kendala dalam hal IT tentu saja menjadi catatan tersendiri, namun BPR memiliki kekuatan dalam memberikan pelayanan terbaiknya melalui kualitas pelayanan personal dari seluruh SDM yang kompeten.

Dalam hal sumber dana BPR dari intern dalam bentuk Modal selama tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Kinerja Permodalan BPR Tahun 2014 – Juni 2017

Dalam Miliar Rp.

Sumber Dana	Periode			
	2014	2015	2016	2017 *
Modal Disetor	8,227	9,550	10,656	11,299
Cadangan	1,819	2,079	2,351	2,675
L/R Tahun Berjalan	2,682	2,755	2,936	1,523
L/R Tahun Lalu	978	1,289	1,755	2,394
Jumlah	13,706	15,673	17,699	17,891
Pertumbuhan (Angka)		1,967	2,026	193
Pertumbuhan (%)		14.4%	12.9%	1.1%

* Posisi Juni 2017

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pada data statistik di atas, menunjukkan bahwa permodalan BPR *trend*-nya dari tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 terus mengalami peningkatan. Modal disetor yang pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.227 Miliar, pada Juni 2017 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 17.891 Miliar. Hal ini dampak dari diperlakukannya peraturan tentang penyediaan modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah modal disetor yang terus mengalami peningkatan ditambah dengan jumlah laba yang terus meningkat menjadikan struktur permodalan BPR semakin kokoh, terlebih saat ini semakin kompleks risiko yang dihadapi BPR, di antaranya adalah risiko pemberian kredit, seiring dengan semakin ekspansifnya BPR menyalurkan kredit diberbagai sektor ekonomi. Semakin kuatnya struktur permodalan BPR menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan dana semakin meningkat dan dengan keikutsertaan dalam program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menjadikan nasabah terus tertarik untuk menyimpan dananya di BPR. Selain itu, semakin besar modal, tingkat pelayanan BPR juga semakin baik, sebab BPR memiliki kantor operasional sendiri yang memadai dengan dilengkapi fasilitas teknologi yang mumpuni sehingga pelayanan BPR semakin baik dari waktu ke waktu. Dengan semakin baiknya pelayanan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat, dapat berdampak pada meningkatnya sumber dana pihak ketiga dan penyaluran kredit, yang menjadikan BPR terus tumbuh secara sehat, secara efisien, sehingga memiliki daya saing yang kuat dalam era persaingan lembaga keuangan yang semakin kompetitif.

3.2. Kinerja Penyaluran Kredit BPR Secara Nasional

Kegiatan penghimpunan dana BPR tidak lain bertujuan agar BPR dapat melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga berperan dalam membangun perekonomian sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Selain untuk meningkatkan jumlah aktiva produktif dan asset keseluruhan, dengan menyalurkan kredit BPR dapat memperoleh pendapatan operasional dan profit yang terus meningkat.

Mengingat kredit merupakan asset BPR yang terbesar dan risikonya tinggi, maka setiap BPR harus menerapkan manajemen risiko yang baik. BPR harus memiliki kebijakan kredit, di antaranya mengatur mengenai proses pemberian kredit dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan proses analisa, pemantauan dan pembinaan nasabah serta melakukan pengawasan kredit secara konsisten. Hal ini dilakukan agar kredit yang diberikan terseleksi dengan baik sehingga kredit bermasalah yang dapat

merugikan BPR dapat dicegah sejak awal. Dengan melakukan proses kredit secara benar sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku, maka BPR akan memperoleh peningkatan pendapatan bunga dan profit usaha. Kondisi ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada semua nasabah, termasuk penyediaan likuiditas untuk pembayaran kewajiban kepada nasabah yang menyimpan di BPR. Pelayanan dan pembayaran kewajiban yang baik akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan nasabah penyimpan, dan akibatnya jumlah dana semakin meningkat, sehingga peluang menyalurkan kredit juga semakin besar.

Untuk mengetahui kinerja penyaluran kredit selama tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Kinerja Penyaluran Kredit BPR
Tahun 2014 sampai dengan Juni 2017

Dalam Miliar Rp.

Penggunaan Dana	Periode			
	2014	2015	2016	2017 *
Kredit yang diberikan	68,391	74,807	81,684	87,389
Jumlah	68,391	74,807	81,684	87,389
Pertumbuhan (Angka)		6,416	6,877	5,706
Pertumbuhan (%)		9.4%	9.2%	7.0%

* Posisi Juni 2017

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, jumlah penyaluran kredit BPR setiap tahun *trend*-nya terus mengalami peningkatan. Pertumbuhannya sedikit menurun pada tahun 2016 dibanding tahun 2015. Pada tahun 2017 sampai dengan bulan Juni penyaluran kredit tumbuh 7% dibanding tahun 2016. BPR masih memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan penyaluran kreditnya secara sehat.

Pada umumnya, BPR menyalurkan kredit untuk keperluan Modal Kerja, Konsumtif dan Investasi. Untuk bisa melakukan ekspansi kredit, BPR memiliki kiat-kiat menarik yang menjadikan masyarakat bersedia menjadi nasabah di BPR. BPR memiliki produk kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti untuk penambahan modal usaha kecil, baik disektor perdagangan dan jasa bahkan BPR di daerah juga menyalurkan kredit pada sektor pertanian dan perkebunan. BPR juga memberikan kredit untuk keperluan konsumtif seperti kredit renovasi rumah, kredit pemilikan rumah, kredit pembelian kendaraan dan kredit pendidikan. Kredit konsumtif sangat membantu masyarakat yang kondisinya sedang mendesak dengan sumber penghasilan dari gaji atau usaha lainnya. Di samping itu BPR juga memberikan kredit Investasi kecil untuk pengembangan tempat usaha atau pembelian

kendaraan operasional usaha. Proses kredit di BPR relatif cepat dengan proses yang praktis sehingga persyaratan mudah dipenuhi.

Kredit yang disalurkan BPR bersumber pada dana yang dihimpun baik dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman yang diterima serta Modal Inti yang dimiliki BPR. Untuk mengetahui berapa besar dana yang dimiliki BPR digunakan untuk penyaluran kredit, dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4. Kinerja Penyaluran Kredit berdasarkan Rasio LDR

Dalam Miliar Rp.

Keterangan	Periode			
	2014	2015	2016	2017 *
LDR	79.79%	77.81%	76.24%	79.03%
Total Kredit	68,391	74,807	81,684	87,389
Penghimpunan Dana	72,914	81,908	90,997	93,621
Modal Inti	12,801	14,232	16,147	16,963

* Posisi Juni 2017

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pada rasio LDR atau *Loan to Deposit Ratio* di atas, menunjukkan bahwa *trend*-nya cenderung stabil dikisaran 76% sampai dengan 79%. Rasio ini menunjukkan bahwa BPR masih memiliki dana yang cukup tersedia sebagai likuiditas untuk penyaluran kredit. BPR masih memiliki kesempatan untuk melakukan ekspansi kredit untuk meningkatkan jumlah pendapatan operasional. Pada tahun 2016 sedikit terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan, tetapi pada Juni 2017 mulai menunjukkan adanya peningkatan dan hampir menembus angka 80%.

Jika BPR tidak menggunakan dana yang dimiliki untuk penyaluran kredit secara maksimal, dengan ditandai rasio LDR di atas 85%, maka BPR akan terbebani biaya bunga atas dana yang dihimpun. Biaya dana yang tertinggi adalah dana atas pinjaman diterima antar bank atau bukan bank. Pada umumnya suku bunga pinjaman diterima, di atas suku bunga deposito berjangka dan tabungan. Meningkatnya penghimpunan deposito berjangka juga memiliki beban biaya dana yang cukup tinggi, sebab rata-rata suku bunga deposito BPR lebih tinggi dari bunga deposito di bank umum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka BPR harus menciptakan produk yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan proses yang mudah tetapi tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian. BPR harus memastikan kelancaran kredit agar saat dibutuhkan untuk membayar kewajiban kepada penyimpan dana atau kepada kreditur dapat berjalan lancar sehingga kepercayaan semakin meningkat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang melaksanakan fungsi intermediasi, dengan kegiatan usaha sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
2. Sumber dana eksternal BPR berasal dari dana pihak ketiga yaitu berupa deposito berjangka, tabungan, pinjaman antar bank berupa fasilitas *linkage*, pinjaman yang diterima non bank dan kewajiban segera dibayar.
3. Kinerja penghimpunan dana BPR *trend*-nya meningkat dari tahun 2014 sampai dengan Juni 2017 di mana mayoritas dana bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) antar bank.
4. Struktur dana BPR yang terbesar persentasenya adalah bersumber dari Deposito berjangka dan tabungan di mana keduanya adalah dana pihak ketiga masyarakat, sehingga BPR dinilai telah melaksanakan fungsi intermediasi sebagai lembaga keuangan bank dengan baik.
5. Kinerja penyaluran kredit BPR sejak tahun 2014 sampai dengan Juni 2017, *trend*-nya terus mengalami peningkatan, sehingga BPR memiliki peluang untuk meningkatkan aktiva produktif, pendapatan dan profit.
6. BPR pada tahun 2017 masih memiliki peluang yang besar untuk terus meningkatkan ekspansi kreditnya, sebab rasio LDR (*Loan to deposit ratio*) masih dibawah 85% di mana jumlah dana yang dimiliki BPR masih cukup tersedia.

REFERENSI

- Ali, Masyhud (2004). *Asset Liability Management*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ikatan Bankir Indonesia (2016). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). *Statistik Perbankan Indonesia Volume 15 Nomor 07 Juni 2017*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Riyadi, Selamat (2006). *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soedarto (2007). *Manajemen Risiko untuk BPR*. Jakarta: Palembang.
- Triandaru, Sigit (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tohir, Noel Chabannel (2012). *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Riwayat Penulis :

Wangsit Supeno, SE, MM, lahir di Jakarta, saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Akademi Manajemen dan Informatika (AMIK) BSI Jakarta.

Selain mengajar di kampus BSI Jakarta, saat ini saya sebagai seorang **Trainerpreneurship** dan juga menjadi Fasilitator Tamu untuk Pelatihan bidang BPR pada **Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta**.

Sebagai Trainer, saya memiliki Sertifikat Profesi dari **Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)** No.Reg. TRN 646-000033-2017. Saya juga seorang Pemerhati industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Saya telah menulis e-book berjudul "**Motivasi Pribadi Berkarakter**", yang telah dipublikasikan pada website wangsitsupeno.com.

Saya mendapatkan sertifikat sebagai Penulis 29 Naskah Terbaik Kompetisi Esai Hut BSI ke 29 dengan sertifikat Nomor 608/5.05/BSI/III/2017.

Saya telah menulis jurnal ilmiah pada majalah **Widyacipta** kampus BSI Jakarta sebagai berikut; **Analisis Dampak Risiko Kredit Bermasalah terhadap Return on Asset pada Bank Perkreditan Rakyat** (Vol. VII No. 1 Maret 2015), **Analisis Program Pencegahan Tindak Pidana pencucian uang (Money laundering) studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat** (Vol. VIII No. 1 Maret 2016), **Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pencegahan Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat** (Vol. VIII No. 2 September 2016), **Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat** (Vol. I No. 1 Maret 2017).

Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi

Wika Arsanti Putri
Universitas Airlangga
wikaarsanti@gmail.com

Abstract - This literature review discusses the effectiveness of tax incentives in attracting investment. The author analyzes the theory of investment that says that tax incentives reduce the use of capital stock can increase investment. However, there are still doubts over tax incentive policies that could increase investment. This is due to other factors considered by investors in investing such as ease of licensing, domestic market size, international market access, infrastructure, social and security conditions, and the availability of human resources. Taxes on a firm's profits or profits can affect investments even though they tend to be less impactful. Implementing tax incentives can also bring important costs to the country. Not only financial costs such as reduced revenue and increased administrative costs, but if not careful in the design and implementation, will also impact on welfare costs due to inefficient allocation of capital. A direct impact evaluation of tax regulations should be made in looking at the framework of the direct impact of tax regulations on the level of investment.

Key Words: Tax, tax incentives, tax holidays, investments.

I. PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya. Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pembangunan dan pendapatan. Salah satu fungsi regulerend ini adalah adanya kebijakan insentif pajak yang diharapkan dapat menarik minat investasi.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan nasional untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik yaitu dengan penanaman modal baik penanaman modal asing maupun modal dalam Negeri. Karena dengan penanaman modal tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat, serta merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan / atau daerah-daerah tertentu. Sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Perkembangan investasi di Indonesia cukup baik. Realisasi investasi pada 2016 sebesar Rp 159,4

triliun atau meningkat 9,6% dari tahun 2015 yang nilai realisasi investasinya sebesar Rp 145,4 triliun (bkpm.go.id). Hal ini membuktikan adanya kesuksesan pemerintah untuk menaikkan jumlah investasi di Indonesia melalui berbagai kebijakan yang diambil.

Kebijaksanaan ekonomi nasional dari pemerintah makin dirasa penting ketika Indonesia menghadapi persaingan yang lebih ketat. Hal ini disebabkan semakin banyak negara yang membuka diri terhadap penanaman modal asing. Kemudahan dan iklim penanaman modal yang lebih menarik terus diupayakan oleh banyak negara untuk dikembangkan, antara lain dengan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal serta kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat.

Kesuksesan menaikkan nilai investasi di Indonesia pada tahun 2016 ternyata masih perlu diwaspadai, karena data Bank Dunia pada 2016 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 91 dalam kemudahan melakukan bisnis, sementara Vietnam berada di posisi 82 dan Thailand di nomor 46 dan posisi nomor satu di ASEAN diduduki oleh Singapura yang juga terbaik se-Asia-Pasifik. Sementara itu Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Hal ini menjadi ancaman bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem serta kebijakan yang dapat menarik investasi di Indonesia.

Investasi merupakan faktor penting dalam perekonomian. Dalam pandangan teori ekonomi klasik, investasi ditentukan oleh tingkat suku bunga. Berbeda dengan pandangan teori ekonomi klasik, menurut teori neoklasik, investasi merupakan akumulasi kapital optimal. Teori neoklasik didasarkan pada pemikiran mengenai penentuan

keseimbangan faktor-faktor produksi oleh produsen atau perusahaan. Dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungannya, perusahaan akan menggunakan suatu faktor produksi hingga mencapai tingkat dimana nilai produksi marginalnya sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu unit faktor produksi tersebut.

Upaya menentukan lokasi penanaman modal, para investor biasanya mengevaluasi dalam dua tahapan. Tahap pertama adalah memilih negara yang didasarkan pada besarnya pasar, akses ke bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, dan sebagainya. Jika tahap pertama memenuhi semua kriteria, maka tahap keduanya adalah mengevaluasi tarif pajak, jaminan-jaminan, dan berbagai insentif yang akan di dapatkan. Pada tahap kedua ini pemerintahan suatu negara dapat dengan mudah merubah insentif pajaknya ketimbang mengubah faktor-faktor yang telah disebutkan di atas karena akan memakan waktu dan juga sulit, bahkan di luar kemampuan pemerintah (Nam & Radulescu, 2004).

Banyak negara berkembang menggunakan insentif pajak untuk mempromosikan investasi. Dengan menerapkan pengurangan tarif pajak penghasilan badan, pemberian pembebasan secara periodik pada pajak perusahaan (*tax holiday*), yang memungkinkan investasi tambahan dari pemotongan kewajiban pajak (melalui kredit pajak atau tunjangan investasi), dan lain-lain. Hal ini dilakukan pemerintahan tertentu dalam kegiatan ekonomi yang mencoba untuk mengalokasikan atau menarik investasi modal dari dalam dan luar negeri.

Penggunaan insentif pajak dan pembebasan pajak sangat banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Kinerja buruk dari administrasi pajak dan biaya kepatuhan yang tinggi bagi investor dapat mengganggu efektivitas insentif pajak. Kurangnya jaminan hukum bagi investor dan iklim investasi umum menjadi alasan untuk mengevaluasi efektivitas insentif pajak di negara-negara berkembang. Selain itu, kontribusi yang didapat dari investasi khususnya pertumbuhan *Foreign Direct Investment* (FDI) atau sering disebut sebagai penanaman modal langsung adalah adanya pembangunan di Negara berkembang. FDI tidak hanya merupakan sumber penting dari keuangan di Negara berkembang dengan tingkat pendapatan dan tabungan domestik rendah, juga dapat memberikan banyak *knowhow* dan teknologi ke wilayah tersebut.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi literature dan jenis data yang digunakan merupakan data sekunder berupa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dokumen yang mendukung dan hasil penelitian terdahulu dengan menganalisis beberapa jurnal dengan tema insentif pajak. Data literatur tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis

dengan memahami bagaimana interpretasi penulis dalam memberikan umpan balik terhadap permasalahan insentif pajak dan memberikan solusi pemecahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio. Investasi langsung merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan (*investor asing*). Sedangkan, investasi tidak langsung (*portofolio*) merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing.

Terdapat tiga sumber utama modal asing dalam suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu pinjaman luar negeri (*debt*) dimana pinjaman luar negeri dilakukan oleh pemerintah secara bilateral maupun multilateral. Kedua adalah FDI yaitu merupakan investasi yang dilakukan swasta asing ke suatu negara, berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, *joint ventura*. Ketiga adalah investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal.

Terdapat beberapa motivasi FDI masuk ke dalam suatu negara atau daerah, menurut UNCTAD (1998) terdapat 3 (tiga) alasan untuk melakukan investasi antara lain *market-seeking*, *resource-seeking* dan *efficiency-seeking*. Motivasi *market-seeking* FDI bertujuan untuk menembus pasar negara domestik dan umumnya dihubungkan dengan ukuran pasar dan pendapatan per kapita, pertumbuhan pasar, akses ke pasar global dan regional, struktur dan pilihan konsumen pasar domestik. Motivasi *resource-asset* dari FDI berdasarkan alasan harga bahan baku, menurunkan biaya tenaga kerja, angkatan kerja, tenaga kerja terampil, infrastruktur fisik (pelabuhan, jalan, dan telekomunikasi), dan teknologi. Sedangkan *efficiency-seeking* FDI karena dimotivasi untuk menciptakan sumber daya saing yang baru bagi perusahaan serta karena biaya-biaya produksi yang lebih rendah termasuk juga pertimbangan produktivitas.

Dalam ekonomi makro, investasi mempunyai arti yang lebih sempit secara teknis yang berarti investasi adalah arus pengeluaran yang menambah *capital stock* fisik (Dornbusch, Fisher dan startz,

2008). Investasi merupakan arus (flows), sedangkan capital merupakan modal. Capital stock meliputi fixed assets yang bukan hanya sehubungan dengan kapasitas produktif, misalnya pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan, persediaan, tetapi juga mencakup konsumsi.

Sebagian besar literatur pajak diperuntukkan bagi kebijakan pajak atas investasi. Kerangka yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi efek dari pajak atas investasi adalah teori investasi neoklasik, dipelopori oleh D. W. Jorgenson (1963). Model awal yang berdasarkan pada model nilai bersih perusahaan dari D. W. Jorgenson (1963) implementasinya kemudian dikembangkan kembali dalam penelitian selanjutnya oleh Jorgenson (1965) serta Robert E Hall and Jorgenson (1969) menunjukkan tingkat permintaan modal untuk investasi merupakan faktor penentu tingkat pendapatan perusahaan pada tingkatan pajak tertentu. Tingkat pendapatan merupakan hubungan neto antara penjualan output produksi terhadap biaya tenaga kerja dan capital stock. Sehingga optimasi laba perusahaan yang dikembangkan oleh Robert E Hall and Jorgenson (1969) dengan asumsi ekspektasi statis dipengaruhi oleh tingkat pajak, rasio penggantian (replacement) modal terhadap pendapatan, rasio biaya bunga terhadap pendapatan dan rasio kerugian terhadap pendapatan (capital losses). Berdasarkan tingkat modal optimum tersebut, maka investasi ditentukan oleh tingkat modal yang diharapkan serta tingkat depresiasi atau penyusutan.

Teori Jorgenson merupakan dasar teori investasi neo-klasik modern. Jorgenson mengembangkan model investasi sebagai suatu proses penyesuaian capital stock. Menurut Jorgenson bahwa investor yang rasional dan profit-maximizer akan memperhitungkan present value dari imbalan atas keputusan investasinya dan akan menyamakan marginal benefit dengan marginal cost dari investasi yang direncanakan. Jorgenson berasumsi bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang bersaing secara sempurna berlangsung seketika tanpa biaya penyesuaian antara perbedaan capital stock yang optimal di masa sekarang dengan di masa lalu. Pembentukan ekspektasi tentang masa depan juga tidak diperlukan karena para investor dapat melakukan respons secara cepat tanpa adanya biaya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi (D. Jorgenson, 1967).

Model makro investasi Jorgenson dibangun dari fondasi mikro yang menggambarkan perilaku perusahaan profit-maximizing firm yang mengakomodasikan sejumlah asumsi tentang ekspektasi yang bersifat statis, penyesuaian capital stock yang bersifat seketika, dan tidak adanya biaya-biaya penyesuaian. Sejumlah asumsi restriktif melandasi teori ini, antara lain ekspektasi yang statis, penyesuaian capital stock yang instan, tidak

terdapat biaya penyesuaian, dan keputusan investasi yang bersifat reversible.

Teori neoklasik menyebutkan bahwa nilai profit atau keuntungan haruslah dimaksimalkan secara periodik sehingga dapat menghasilkan capital stock yang optimal. Argumen dasar menyebutkan bahwa perusahaan mengakumulasi modal selama manfaat melebihi biaya. Perusahaan akan menginvestasikan sampai ke titik di mana nilai bersih sekarang dari arus kas akan sama dengan biaya. Akibatnya tarif pajak pra pengembalian investasi proyek marginal didefinisikan sebagai capital stock. Untuk menilai efek dari pajak terhadap investasi perusahaan, salah satu kebutuhan untuk menilai dampak dari pajak atas capital stock. Jika perubahan pajak menurunkan capital stock diasumsikan bahwa hal itu akan menimbulkan investasi. Menurut teori ini cukuplah untuk menghitung dampak perubahan pajak atas biaya. Dalam literatur hal ini telah menimbulkan perhitungan tarif pajak yang berlaku marjinal. Perhitungan tariff pajak yang berlaku marginal memungkinkan penilaian dampak dari beberapa parameter pajak (seperti tingkat hukum pajak, tunjangan investasi, kredit pajak dan lain-lain) dari capital stock.

Penelitian dengan landasan menggunakan kerangka teori ekonomika mikro selanjutnya dilakukan oleh King and Fullerton (1984). Pendekatan King and Fullerton (1984) dalam meneliti dampak perubahan sistem perpajakan terhadap keputusan investasi dengan menghitung tingkat pajak marjinal efektif. Pendekatan ini merupakan pendekatan deterministik. Pengembangan lebih lanjut penelitian dengan konsep tersebut kemudian disebut sebagai pendekatan tingkat pajak marginal efektif atau Marginal Effective Tax Rate (METR). Konsep ini mengimplementasikan konsep yang telah digunakan sebelumnya pada pengenaan pajak terhadap orang pribadi atau individu yaitu konsep tariff pajak marginal (Marginal Tax Rate).

Penelitian terhadap hubungan antara reformasi pajak dengan investasi yang sudah dilakukan sejauh ini menggunakan pendekatan model ekonomi yang beragam, yaitu model dengan kerangka teoritis atau data ekonomika mikro yang meliputi model neoklasik dan model METR.

Van Parys and James (2010) menganalisis perubahan kebijakan insentif pajak dan variabel iklim investasi lain untuk 12 negara CFA Franc Zona selama periode 1994-2006. Karena mata uang umum mereka (CFA Franc) dan bahasa umum (Perancis) negara-negara ini merupakan dasar yang luar biasa dari perbandingan untuk mengevaluasi kebijakan mereka. Penggunaan data panel ekonometrik dengan negara dan efek tahun tetap memungkinkan kita untuk mengisolasi dampak dari perubahan kebijakan investasi, seolah-olah dalam analisis perbedaan dengan beberapa perubahan

kebijakan. Van Parys and James (2010) tidak menemukan hubungan positif yang kuat antara tax holiday yang merupakan salah satu insentif pajak dengan investasi di zona CFA Franc. Namun, meningkatkan jumlah jaminan hukum bagi investor asing dan mengurangi kompleksitas sistem pajak dapat membantu untuk menarik investasi.

Beberapa karakteristik dari negara-negara berkembang akan mengakibatkan dampak perubahan pajak atas *capital stock* yang lebih kompleks. Salah satunya adalah penggunaan *tax holiday* yang luas di negara-negara berkembang. Penelitian Mintz (1990) menjelaskan dampak ambigu *tax holiday* atas *capital stock* tergantung pada durasi investasi, perubahan dari pendapatan dan sejauh mana modal yang diinvestasikan terjadi pengurangan.

Banyak penelitian menguji prediksi teori investasi neo-klasik dengan memperkirakan persamaan yang langsung berasal dari model. Mereka melanjutkan dalam dua langkah. Pertama, mereka harus menilai dampak dari pajak perusahaan pada *capital stock* dan yang kedua, mereka perlu memperkirakan dampak dari *capital stock* atas investasi.

Untuk negara-negara berkembang, hanya langkah pertama yang diambil melalui perhitungan METR sebelum dan setelah perubahan kebijakan pajak. Perhitungan dari METR sangat berguna karena mereka mengungkapkan apa yang memperpanjang insentif pajak mengurangi *capital stock* untuk berbagai insentif termasuk *tax holiday*. Hal ini telah dihitung untuk banyak negara. Namun kelemahan utama adalah penelitian tidak melanjutkan ke langkah kedua untuk mengukur dampak dari perubahan *capital stock* investasi. Sejalan dengan teori investasi neo-klasik mereka menganggap bahwa jika insentif pajak menurunkan biaya pengguna modal mereka secara otomatis meningkatkan investasi. Akibatnya mereka tidak dapat memberikan bukti hasil investasi yang sebenarnya.

Gary, Moore, Sisneros, and Terando (2011) meneliti bagaimana tingkat pajak akan berdampak pada investasi oleh perusahaan-perusahaan di pasar saham. Peneliti menemukan sebuah hubungan negatif signifikan antara perubahan individu atas *capital gain* dan METR.

Memperkirakan langkah kedua langsung dari model teoritis perlu adanya data perusahaan mulai dari perilaku memaksimalkan keuntungan perusahaan. Selain menguji teori neo-klasik langsung, banyak penelitian telah digunakan lebih spesifik untuk memperkirakan sensitivitas investasi untuk perubahan dalam sistem pajak di negara-negara industri. Investasi agregat paling populer adalah studi tentang perpajakan dan FDI. De Mooij and Ederveen (2003) meninjau literatur ini dan menemukan elastisitas tarif pajak rata-rata modal asing. Namun, mereka menemukan variasi

substansial dalam dalam studi yang tergantung pada spesifikasi yang dipilih, definisi FDI (merger dan akuisisi memiliki elastisitas lebih rendah maka investasi modal tetap), ukuran pajak (sensitivitas yang lebih tinggi dari FDI untuk tarif pajak efektif dari pada hukum tarif pajak), dan lain-lain hasil ini sangat berguna meskipun mereka tidak fokus pada efektivitas insentif pajak tertentu. Gondor and Nistor (2012) menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan penentu untuk FDI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan fiskal antara pemerintah untuk FDI belum tentu dari persaingan tarif pajak perusahaan, namun satu lingkungan bisnis, yang ditentukan terutama oleh kebijakan fiskal.

De Mooij and Ederveen (2003) menyebutkan dalam papernya mengungkapkan sejumlah wawasan yang relevan bagi para pembuat kebijakan. Rata-rata dari penelitian menemukan bahwa adanya elastisitas tarif pajak terhadap modal asing sekitar. Hal ini ada namun, adanya perbedaan substansial antara penelitian. Hal ini sebagian dapat dijelaskan oleh karakteristik penelitian yang mendasari. Misalnya, kita menemukan bahwa penelitian menggunakan data pada sejumlah lokasi asing menghasilkan elastisitas sistematis lebih kecil dibandingkan mereka yang menggunakan data pada modal asing. Hal yang sama berlaku untuk data pada merger dan akuisisi, dibandingkan dengan data gabungan FDI. Data pada tanaman baru dan perluasan tanaman, bagaimanapun, menghasilkan elastisitas sistematis lebih tinggi dari data yang FDI. Studi menggunakan data pada properti, pabrik dan peralatan tidak sistematis melaporkan elastisitas yang lebih tinggi atau lebih rendah dari studi menggunakan data FDI, meskipun elastisitas untuk studi pertama biasanya lebih sering signifikan. Temuan lain yang penting adalah bahwa perbedaan antara investasi dari negara-negara kredit pajak dan negara-negara pembebasan pajak tidak relevan untuk ukuran elastisitas. Hal ini sesuai dengan klaim bahwa kelebihan kredit pajak asing dan penangguhan pajak mengaburkan perbedaan antara sistem pembebasan dan sistem kredit.

Klemm and Van Parys (2009) memberikan bukti tentang efektivitas *tax holiday* dan tunjangan investasi atas investasi menggunakan dataset dari 47 negara-negara berkembang selama periode 1985-2004. Mereka menemukan bahwa *tax holiday* dalam beberapa kasus membantu untuk menarik FDI sementara tunjangan investasi tidak. Selain itu mereka menemukan bahwa negara-negara berkembang bersaing pada *tax holiday* dan bukan pada tunjangan investasi.

Pemberian insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam

pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Hasil yang kuat untuk mengurangi kompleksitas insentif pajak dan meningkatkan jaminan hukum bagi investor asing, dibandingkan dengan hasil yang ambigu untuk insentif pajak sendiri, menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara berkembang itu setidaknya penting untuk mengurangi biaya kepatuhan pajak dan untuk mengamankan treatment yang tepat dari investor seperti itu untuk menurunkan beban pajak itu sendiri. Hal ini bahkan jauh lebih murah karena mereka tidak dikenakan kerugian untuk pendapatan. Dengan meningkatkan investasi mereka bahkan meningkatkan pendapatan. Ini menegaskan kembali bahwa titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak.

Karena ambiguitas hasil dari *tax holiday* maka tidak ada kesimpulan umum yang dapat ditarik. Temuan Wells dan Allen (2001) untuk Indonesia menyebutkan bahwa *tax holiday* tidak efektif, begitu juga temuan Klemm dan Van Parys (2009) bahwa *tax holiday* hanya efektif dalam beberapa kasus yang dapat dikonfirmasi. Tapi tampaknya, *tax holiday* yang ditargetkan pada eksportir memiliki kesempatan lebih besar menjadi efektif daripada *tax holiday* yang berlaku lebih umum.

Sari, Dewi, and Sun (2015) menyebutkan pelaksanaan dan dampak dari kebijakan *tax holiday* dari perspektif investasi asing dan pendapatan pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax holiday* dianggap memberikan pengaruh terhadap peningkatan kegiatan investasi di Indonesia dan tidak akan memiliki efek negatif dalam bentuk hilangnya penerimaan pajak. Kebijakan *tax holiday* dianggap mampu memberikan dampak positif pada kegiatan investasi di Indonesia, namun Indonesia masih harus mengutamakan perbaikan infrastruktur dan birokrasi.

Beberapa argumen bisa dikemukakan untuk menjelaskan mengapa hubungan antara *tax holiday* dan investasi tidak kuat. Pertama, bisa jadi bahwa teori investasi neo-klasik tidak begitu relevan. Teori ini memprediksi bahwa jika (i) *tax holiday* menurunkan *capital stock*, (ii) *tax holiday* akan meningkatkan investasi.

Hall and Jorgenson (1967) telah menghitung dampak perubahan kebijakan pajak terhadap perilaku investasi untuk tiga revisi pajak besar pada masa pasca perang: (1) penerapan metode dipercepat untuk menghitung penyusutan di *Internal Revenue Code* 1954; (2) pengurangan masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan pada peralatan dan mesin pada tahun 1962; (3) kredit pajak investasi untuk peralatan dan mesin dalam UU Pendapatan dari tahun 1962. Efek dari penyusutan

dipercepat yang sangat besar, terutama untuk investasi dalam struktur. Efek dari pedoman penyusutan tahun 1962 adalah signifikan, tetapi efek ini terbatas untuk investasi peralatan. Efek dari kredit pajak investasi 1962 yang cukup dramatis dan meninggalkan sedikit ruang untuk keraguan tentang efektivitas kebijakan pajak dalam mempengaruhi perilaku investasi.

Penjelasan lain yang mungkin menjadi alasan mengapa kita tidak menemukan hubungan neo-klasik antara biaya pengguna modal dan investasi adalah bahwa biaya pengguna modal di negara-negara berkembang tidak dapat ditangkap oleh efektivitas sistem pajak sendiri. Faktor biaya lainnya, seperti tingkat tinggi rintangan pengembalian bagi investor karena risiko investasi dan biaya kepatuhan, mungkin lebih besar daripada *capital stock* biasa yang diukur di negara-negara industri dengan menghitung METR. Arti penting dari jaminan dan variabel kompleksitas pajak mendukung pandangan ini.

Penjelasan ketiga yang mungkin terletak pada sisi pemberian insentif pajak yaitu adanya pendapatan yang berkurang bagi pemerintah. Di negara-negara di mana barang-barang publik dasar seperti kualitas peraturan, aturan yang longgar, infrastruktur dan lainnya tidak tersedia, menyebabkan investor lebih memilih membayar pajak yang dikeluarkan untuk menyediakan fasilitas barang publik yang diperlukan sebagai keuntungan dari pembebasan pajak di negara di mana barang-barang publik yang diperlukan hilang.

Hartono and Setyowati (2011) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan pajak insentif tidak signifikan terkait dengan investasi iklim perusahaan investasi asing di industri tekstil di Indonesia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi investasi iklim, antara lain, ketersediaan murah, ahli profesional, stabilitas politik, kondisi pasar dan potensi, stabilitas makro-ekonomi, kondisi infrastruktur, kepastian hukum, dan kondisi birokrasi, serta tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan analisis hasil penelitian, bagaimanapun akses pasar tampaknya menjadi faktor signifikan yang menghasilkan investor asing di industri tekstil di Indonesia.

Mengukur hubungan antara *tax holiday* dan investasi kita dibatasi oleh ketersediaan data yang rinci. Akan menarik untuk memiliki data yang lebih rinci tentang variabel iklim investasi waktu yang bervariasi seperti beban administrasi, keterampilan angkatan kerja atau infrastruktur. Ini juga akan membantu untuk memiliki variabel investasi pada tingkat disagregat lebih dari pada yang kita miliki. Sebagai contoh, data tingkat sektor akan memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah *tax holiday* di sektor tertentu lebih efektif daripada yang di lain, seperti yang kita amati untuk ekspor. Disagregat investasi akan menjadi metodologi yang lebih optimal. Namun, insentif pajak di negara-

negara berkembang bertujuan untuk meningkatkan jumlah total investasi.

Fakta bahwa kebanyakan orang lain mensubsidi investasi asing adalah alasan penting mengapa semakin banyak negara yang ditarik ke dalam permainan subsidi. Selain insentif investasi dari jenis yang dibahas di atas, pemerintah juga harus mempertimbangkan upaya mereka untuk memodernisasi infrastruktur, meningkatkan tingkat keterampilan pendidikan dan tenaga kerja, dan meningkatkan iklim usaha secara keseluruhan sebagai bagian dari kebijakan promosi investasi mereka. Sebagaimana dibahas di atas, ini adalah komponen penting dari fundamental ekonomi yang menentukan lokasi FDI. Selain menarik FD, kebijakan ini juga akan mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan industri lokal.

Dalam dunia mobilitas modal internasional yang meningkat dan khususnya di pasar terintegrasi seperti Uni Eropa, pajak penghasilan badan dapat berdampak pada pertumbuhan pada tingkat yang berbeda. Menurut sebuah studi baru-baru ini dibuat oleh Uni Eropa, sistem pajak perusahaan dapat mempengaruhi (1) di mana perusahaan memilih untuk lokasi investasi mereka, (2) berapa banyak mereka berinvestasi, dan (3) di mana mereka memilih untuk mencari keuntungan mereka. Sebuah pertanyaan kenaikan keuntungan mereka melalui sistem pajak perusahaan yang menentukan keputusan investor, yaitu perusahaan akan memilih untuk mencari investasi mereka di negara-negara dengan pajak yang lebih rendah atau sebaliknya. (Gondor & Nistor, 2012)

Fochmann, Kiesewetter, and Sadrieh (2012) memberi bukti mengenai pengambil keputusan yang sering menunjukkan persepsi bias dalam perpajakan yang berisiko kompleks. Ketentuan hukum mengenai kerugian perpajakan dapat menyebabkan bias persepsi yang signifikan dan mempengaruhi perilaku pengambilan risiko individu.

Studi Badri (2007) menggunakan survei ke industri di 23 negara dan mendukung untuk memberikan instrumen yang valid dalam membantu studi dan dukungan untuk keputusan lokasi industri. Studi ini menghasilkan suatu instrumen untuk mengidentifikasi kumpulan 14 faktor kritis atas lokasi industri yang telah dikembangkan dan disintesis dari literatur. Faktor kritis yang tersebut antara lain faktor transportasi, tenaga kerja, raw materials, pasar, kawasan industri, ketersediaan utilitas, kondisi pemerintah, struktur pajak, iklim, dan masyarakat serta situasi politik, kompetisi global, regulasi dari pemerintah dan faktor-faktor ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Pajak atas keuntungan atau laba perusahaan dapat mempengaruhi investasi meskipun hal tersebut cenderung tidak signifikan. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam

pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia. Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga hubungan antara *tax holiday* dan investasi tidak begitu kuat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi investasi iklim, antara lain, ketersediaan murah, ahli profesional, stabilitas politik, kondisi pasar dan potensi, stabilitas makro-ekonomi, kondisi infrastruktur, kepastian hukum, dan kondisi birokrasi, serta tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan analisis hasil penelitian, bagaimanapun akses pasar tampaknya menjadi faktor signifikan yang menghasilkan investor asing di Indonesia.

Meskipun adanya kebijakan insentif pajak di negara-negara berkembang masih kontroversial. Penerapan insentif pajak dapat membawa biaya yang penting bagi negara. Tidak hanya biaya keuangan seperti pendapatan yang berkurang dan biaya administrasi meningkat, tetapi jika tidak hati-hati dalam perancangan dan pelaksanaannya, juga akan berdampak pada biaya kesejahteraan karena adanya alokasi modal yang tidak efisien. Mengenai manfaat masih tidak jelas sampai sejauh mana insentif pajak yang efektif dalam menarik investasi.

Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif perekonomian Indonesia konsep yang menempatkan dampak perubahan peraturan perpajakan khususnya pajak Badan yang dilakukan pemerintah terhadap tingkat investasi di Indonesia menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Evaluasi dampak peraturan perpajakan secara langsung dilakukan dalam melihat kerangka dampak langsung peraturan perpajakan terhadap tingkat investasi. Asumsi dasar yang digunakan adalah produsen yang rasional secara ekonomi yaitu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan.

REFERENSI

- Badri, M. A. (2007). Dimensions of industrial location factors: review and exploration.
- De Mooij, R. A., & Ederveen, S. (2003). Taxation and foreign direct investment: a synthesis of empirical research. *International Tax and Public Finance*, 10(6), 673-693.
- Fochmann, M., Kiesewetter, D., & Sadrieh, A. (2012). Investment behavior and the biased perception of limited loss deduction in income taxation. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 81(1), 230-242.
- Gary, R., Moore, J. A., Sisneros, C. A., & Terando, W. D. (2011). *The Impact of Tax Rate Changes on Intercorporate Investment*. Paper presented at the 2011 American Accounting Association Annual Meeting-Tax Concurrent Sessions.

- Gondor, M., & Nistor, P. (2012). Fiscal policy and foreign direct investment: evidence from some emerging EU economies. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 58, 1256-1266.
- Hall, R. E., & Jorgenson, D. W. (1967). Tax Policy and Investment Behavior. *The American Economic Review*, 57(3), 391-414.
- Hartono, M., & Setyowati, M. S. (2011). Hubungan insentif Pajak dengan iklim investasi bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor industri tekstil di Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 16(1).
- Klemm, A., & Van Parys, S. (2009). *Empirical evidence on the effects of tax incentives*: International Monetary Fund.
- Mintz, J. M. (1990). Corporate Tax Holidays and Investment. *The World Bank Economic Review*, 4(1), 81-102.
- Nam, C. W., & Radulescu, D. M. (2004). Types of tax concessions for attracting foreign direct investment in free economic zones.
- Sari, N., Dewi, M. S., & Sun, Y. (2015). Indonesia: The Effect of Tax Holiday on Economic Growth Related to Foreign Investment. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 1008-1015.
- Van Parys, S., & James, S. (2010). The effectiveness of tax incentives in attracting investment: panel data evidence from the CFA Franc zone. *International Tax and Public Finance*, 17(4), 400-429.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor

Dede Suleman

Akademi Manajemen dan Keuangan BSI Jakarta

Dede.dln@bsi.ac.id

One tax restaurant tax contributing to local revenue. Local Taxes are divided into three types, Taxes levied by local government, taxes levied under national regulations, but tariff revenues are made by local governments Taxes levied and administered by the central government, but levies are distributed to local governments. local taxes included; hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, street lighting taxes, advertisement taxes, property and urban taxes, land and building rights, swiftlet nest taxes. Object of restaurant tax is service provided with payment, Service provided restaurant referred to include service of sale of food and / or beverage consumed by buyer, either consumed in place of service or elsewhere. Which is not the object of restaurant tax is catering service or catering and services provided by restaurants or restaurants whose sales value does not exceed ten million rupiah per month. The subject of restaurant tax is an individual or entity that makes payment to restaurants / restaurants, cafes, bars and the like, while taxpayers are individuals or entities that run the restaurant. restaurant tax revenues increased annually to contribute to local revenues, Bogor Regency revenue offices, restaurant tax contribution in 2014 was 1.06%, 1.17% in 2015 and 2016 was 1.48%. each year shows an increase and targets and realization, in 2014 its achievement target of 103.56%, in 2015 its target achievement of 110.12%, 2015 its achievement target of 102.35%. . The restaurant tax has already been set at a rate of ten per cent of the amount of payment the restaurant receives

Key Word: Restaurant Tax, Local Revenue

I. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian Daerah. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, daerah di beri kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seluas-luasnya. Secara umum, pajak diartikan sebagai pungutan dari negara kepada rakyatnya, yang sifatnya memaksa. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan bagi pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan, ini dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur terselenggaranya fungsi pemerintahan. Pajak merupakan salah satu cara dalam mengalihkan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik / pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

Pajak.

Sebagai salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah, dalam pemungutannya

pajak daerah juga harus mempunyai dasar hukum sehingga pungutan tersebut dapat dipaksakan. Sama halnya dengan pajak pusat, Pajak daerah juga memiliki unsur paksaan dalam pemungutannya sehingga diperlukan dasar hukum. Hanya saja, pajak daerah tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan dasar hukum yang berupa peraturan daerah. Restoran termasuk salah satu Pajak Daerah yang memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.1. Pajak Daerah

A. Pengertian Pajak Daerah

(mardiasmo, 2002) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Davey dalam (Adrian, 2008) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri
2. Pajak yang di pungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.

(Adisasmita, 2011) yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

1. Jenis Pajak Kabupaten / kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

b. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.

c. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan

1.2. Pendapatan Asli Daerah

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

(Siahaan, 2010) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Mardiasmo, 2002) "Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

B. Sumber Pendapatan daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh menurut (Warsito, 2001) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah"

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

C. Klasifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

B. Pengertian Pajak Restoran

Menurut perda No.5 Tahun 2010 kabupaten bogor pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak restoran, maka pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah atas pajak restoran itu sendiri. Dalam pemungutan pajak Restoran terdapat beberapa terminology yang perlu di ketahui, terminology tersebut menurut peraturan daerah no.5 Tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, cafe dan sejenisnya tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran. Untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai

pembayaran kepada pengusaha restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

4. Nota pesanan atau bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak saat mengajukan pembayaran atas pelayanan restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman termasuk penyediaan penjualan makanan dan/atau minuman yang diantar dan/atau dibawa pulang.

5. Objek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan no, 5 tahun 2010 pasal 1 objek pajak adalah :

1. Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
2. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

D. Bukan Objek Pajak Restoran.

Pada restoran , tidak semua pelayanan yang di berikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, menurut perda No.5 Tahun 2010 Pasal 3. Pengecualian tersebut yaitu :

1. Pelayanan jasa boga atau catering.
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per bulan).

E. Subjek Pajak Restoran.

Subjek pajak restoran menurut perda No.5 tahun 2010 pasal 4 dijelaskan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran /rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

Sedangkan Wajib Pajak restoran menurut perda No. 5 Tahun 2010 pasal 4 Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dengan demikian subjek pajak dan Wajib pajak restoran tidak sama.

E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1. Dasar pengenaan pajak restoran menurut perda No 5 tahun 2010 pasal 5 adalah jumlah pembayaran yang di lakukan kepada restoran, jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau harga pengganti dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman.
2. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran paling tinggi ditentukan sebesar sepuluh persen . dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan . hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran yang dipandang sesuai dengan kondisi kabupaten/kota masing-masing. Untuk kabupaten bogor ini bisa dilihat di perda No .5 tahun 2010 pasal 6 pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen) dan berlaku pula untuk pelayanan kepada instansi pemerintahan.

3. Pehitungan Pajak Restoran.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai perhitungan berikut (Siahaan, 2010)

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima Restoran} \end{aligned}$$

F. Masa Pajak dan saat pajak terutang

Menurut (Siahaan, 2010) masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dalam bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangk waktu yang lamanya satu tahun takwin, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim

Menurut perda No.5 tahun 2010 pasal 8 pajak yang terutang merupakan pajak restoran yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan daerah ini.berdasarkan pasal 9 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan di Restoran

II. METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian adalah Dinas pendapatan Daerah kabupaten, Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2014, 2015 dan 2016.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Data mengenai rekapitan penerimaan peranan pajak asli daerah dan pendapatan asli daerah dinas pendapatan Kabupaten Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Asli Daerah Tahun 2014-2016

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD Kab Bogor (Rp)	Prosentase
2014	57.316.411.640	5.378.094.139.799	1.06%
2015	71.008.270.360	6.032.958.906.738	1.17%
2016	88.857.747.868	5.973.280.044.956	1.48%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa presentase penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada tahun 2014, persentase penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor sebesar 1,06%, didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 57.316.411.640}{\text{Rp. } 5.378.094.139.799} \times 100\% \\ &= 1,06\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015, persentase penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor sebesar 1,17%, didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 71.008.270.360}{\text{Rp. } 6.032.958.906.738} \times 100\% \\ &= 1,17\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016, persentase penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor sebesar 1,487%, didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 88.857.747.868}{\text{Rp. } 5.973.280.044.956} \times 100\% \\ &= 1,48\% \end{aligned}$$

3.2 Perhitungan Persentase Pajak Restoran

Laporan persentase pajak restoran merupakan laporan yang dibuat penulis untuk mengetahui besarnya persentase dari pajak restoran pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

1. Data Pajak Restoran Tahun 2014 Target Pajak Restoran sebesar Rp. 55.333.928.000 dan Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 57.316.411.640

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Realisasi} - \text{Target} \\ &= \text{Rp. } 57.316.411.640 - \text{Rp. } 55.333.928.000 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp. } 1.982.483.640$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 57.316.411.640}{\text{Rp. } 55.333.928.000} \times 100\% \\ &= 103,58\% \end{aligned}$$

Hasil Persentase pajak Restoran pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar 103,58%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

2. Data Pajak Restoran Tahun 2015 Target Pajak Restoran sebesar Rp. 64.483.246.000 dan Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 71.008.270.360

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Realisasi} - \text{Target} \\ &= \text{Rp. } 71.008.270.360 - \text{Rp. } 64.483.246.000 \\ &= \text{Rp. } 6.525.024.360 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 71.008.270.360}{\text{Rp. } 64.483.246.000} \times 100\% \\ &= 110,12\% \end{aligned}$$

Hasil Persentase pajak Restoran pada tahun 2015 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar 110,12%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

3. Data Pajak Restoran Tahun 2016 Target Pajak Restoran sebesar Rp. 88.816.283.000 dan Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 88.857.747.868

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Realisasi} - \text{Target} \\ &= \text{Rp. } 88.857.747.868 - \text{Rp. } 88.816.283.000 \\ &= \text{Rp. } 2.041.464.868 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 88.857.747.868}{\text{Rp. } 88.816.283.000} \times 100\% \\ &= 102,35\% \end{aligned}$$

Hasil Persentase pajak Restoran pada tahun 2015 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar 102,35 %. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

3.3 Analisa Peranan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Selain itu penerimaan pajak restoran tiap tahun nya mengalami peningkatan, dilihat dari peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar 1.06 % pajak

restoran dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 target pajak restoran yang direncanakan Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 55.333.928.000 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 57.316.411.640. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 5.378.094.139.799. Penerimaan pajak Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 103,58%. Pada tahun 2015 peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah naik sebesar 0,11% dari 1.06% menjadi 1.17% pajak restoran dari pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2015 target pajak restoran yang direncanakan Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 64.483.246.000 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 71.008.270.360. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 6.032.958.906.738. Penerimaan pajak Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar 110,12 %. Pada tahun 2016 peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah naik sebesar 0,31% dari 1.17% menjadi 1.48% pajak restoran dari pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2016 target pajak restoran yang direncanakan Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 88.816.283.000 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 88.857.747.868. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 5.973.280.044.956. Penerimaan pajak Dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar 102,35 %. Pada tahun 2016 peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1.48%.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuatlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 1,06%, sedangkan pada tahun 2015 potensi pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar 0,11%, dan pada tahun 2016 Pajak Restoran juga mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar 0,31%.
2. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya ada Pajak Restoran saja tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan.
3. Pada Tahun 2014 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 57.316.411.640 , melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah

kabupaten Bogor sebesar Rp. 55.333.928.000 . Pada tahun 2015 realisasi pajak restoran sebesar Rp.71.008.270.360 ,melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 64.483.246.000 . Pada Tahun 2016 realisasi pajak restoran sebesar Rp.88.857.747.868, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar Rp.88.816.283.000.

REFERENSI

(n.d.).Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adrian, S. (2008). *Hukum Pajak dan retribusi daerah Bogor*. Bogor: Ghalia Indonesia.

mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Warsito, U. (2001). *Peranan dan Strategi Peningkatan PAD Dalam pelaksanaan otonomi daerah*.

Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat

Sabil
AMK BSI Jakarta
email: sabil.sbl@bsi.ac.id

Abstract- Ad tax is one part of the original revenue, the journal aims to find out the magnitude of the contribution of tax revenue against the original ad, the object of a study conducted in Bogor regency, this research method using the method qualitative, as well as the study of the library were sourced from a number of literature that includes reference books that can support the content of the writings, then a number of internet sites, data petrol from the year 2011 to 2016, the results achieved there is contribution to the Bill the original ad daerah but under 1%, only in the year 2011 to reach 1% more, the value of the money that the tax ad always exceeds the target above 100% average except for 2015 under 100%. In 2011, the target compared to the realization of the increase: the target is Rp. 429.547.509, 2012 compared increased realization: Rp. 545,280,964, in the year 2013 target compared to the realization of the increase: Rp. 497.536.478, in 2014 compared to the targeted realization of the increase: the target is Rp. 168.276.787,90, 2015 compared to the realization of the target compared with the realization of Reduced: Rp 1,199,622,317) in 2016 target compared to the increased realization: Rp. 2.985.371.706

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Menurut (Samudra, 2005), mengemukakan bahwa, Pajak Reklame adalah pajak daerah (kota/kabupaten) . Pajak Reklame berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 dalam (Siahaan, 2010). Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Menurut (Priantara,2013:543), menyimpulkan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau

didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah. (Purwanto, 2016) Reklame Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Kabupaten Bogor secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. (Purwanto, 2016) Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor pajak perlu mendapatkan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut (Siahaan ,2010:9) menyimpulkan bahwa : Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Davey dalam (Sutedi, 2008) Pajak Daerah adalah :

(1) pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri, (2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, (3) pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.

Menurut Adisasmita (2011:77), mengemukakan bahwa "Pajak Daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum". Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Reklame telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian adalah di Kabupaten Bogor.

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif perbandingan, serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2011 s.d 2016.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Reklame

1. Bagi Hasil Pajak Reklame

Hasil penerimaan Pajak Reklame merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antar desa.

2. Biaya Pemungutan Pajak Reklame

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Reklame semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara professional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Marihot (2010:13), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menurut (Nurcholis, 2007), "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan dan lain-lain yang sah". Sedangkan menurut (Halim, 2010), menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.

yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan Pajak Reklame ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

3.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar Pengenaan, tarif, dan cara perhitungan Pajak Reklame yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame di selenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan kepala daerah.

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame.
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- c. Lama pemasangan reklame.
- d. Nilai strategis lokasi.
- e. Jenis reklame.

3.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangun daerah dan sebagainya.

Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja diebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lainnya, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah (*tax sharing*), penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (secara global). Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
Hasil pajak daerah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai hukum publik.
2. Hasil Retribusi Daerah
Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetorkan ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan

kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain.

3.4. Objek Pajak Daerah

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah keadaan peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul secara objektif apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

3.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Seperti telah dikemukakan pada terminologi yang digunakan dalam pajak daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

3.6. Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pengalaman selama ini, dapat dikemukakan sebagai upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah misalnya:

1. Melakukan pendataan secara lengkap dan akurat
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola dan pelaksana di bidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan

3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antar instansi terkait) dan koordinasi internal (antar bagian/unit dalam instansi)
4. Memperbaiki sistem pengelolaan selain tunggu bola harus pula secara aktif jemput bola.
5. Memberi hadiah kepada wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah terbesar dan yang melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Penguatan kelembagaan
7. Meningkatkan rasio cakupan (coverage ratio) mendekati potensi
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan
9. Peningkatan pengawasan melekat, fungsional dan masyarakat
10. Pemberian insentif (perangsang) bagi petugas pemungut yang berprestasi
11. Pemberian sanksi pada petugas penagih pajak dan retribusi yang melakukan kesalahan
12. Melakukan kampanye, antara lain melalui spanduk dan pamflet
13. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat.
14. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

3.7. Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan data mengenai rekapitan penerimaan peranan pajak asli daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 s.d. 2016.

Tabel 1
Rekapitan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	Bertambah (Rp)
1	2011	9.500.000.000	9.924.574.509	104,47	429.547.509
2	2012	9.500.000.000	10.045.280.964	105,74	545.280.964
3	2013	11.778.862.000	12.276.398.478	104,22	497.536.478
4	2014	13.673.865.000	13.842.141.787	105,23	168.276.787,90
5	2015	14.973.318.000	13.773.695.683	91,99	(1.199.622.317)
6	2016	15.473.316.000	18.458.678.706	114,29	2.985.371.706

Sumber :Data Olahan Penulis

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi penerimaan pajak reklame selalu melebihi target , yaitu tahun 2011 realisasi mencapai 104,47 % (bertambah : Rp.429.547.509), dari target tahun 2012 realisasi mencapai 105,74 % (bertambah : Rp. 545.280.964), dari target 2013 realisasi mencapai 104,22 % (bertambah : Rp. 497.536.478), dari target 2014 realisasi mencapai 105,23 % (bertambah : Rp. 168.276.787,90), dari target 2015 realisasi tidak

mencapai target 91,99% (berkurang : Rp. 1.199.622.317), dari target 2016 realisasi mencapai 114,29 % (bertambah : Rp. 2.985.371.706). dari tabel ini secara keseluruhan bahwa hanya tahun 2015 target pajak reklame tidak tercapai, akan tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan penerimaan yang cukup signifikan karena paling tinggi penerimaannya dibandingkan dengan dengan tahun 2011-2015.

Tabel 2
Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016

No	Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Prosentase
1	2011	9.924.574.509	685.121.399.928	1,449 %
2	2012	10.045.280.964	1.068.548.454.269	0,940 %
3	2013	12.276.398.478	1.262.034.564.121	0,972 %
4	2014	13.842.141.787	1.712.037.376.136,16	0,809 %
5	2015	13.773.695.683	2.002.320.991.117,9	0,688 %
6	2016	18.458.678.706	2.293.175.034.011	0,805 %

Sumber : Data Olahan Penulis

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa presentase penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3.8. Analisa Peranan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Selain itu penerimaan pajak reklame tiap tahun nya mengalami peningkatan, dilihat dari peranan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sebesar 1,449 % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2011 target pajak reklame sebesar Rp.9.500.000 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp.9.924.574.509. secara prosentase 104,47 % , pada tahun 2012 sebesar 0,940 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2012 target pajak reklame sebesar Rp.9.500.000 dengan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp 10.045.280.964. secara prosentase 105,74 % , pada tahun 2013 sebesar 0,972 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2013 target pajak reklame sebesar Rp. 11.778.862.000 dengan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp. 12.276.398.478 secara prosentase 104,22 % , pada tahun 2014 sebesar 0,809 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 target pajak reklame sebesar Rp. 13.673.865.000 dengan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp. 13.842.141.787. secara prosentase 105,23 % , pada tahun 2015 sebesar 0,688 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2015 target pajak reklame sebesar Rp. 14.973.318.000 dengan realisasi tercapai Rp. 13.773.695.683 secara prosentase 91,99 % , pada tahun 2016 sebesar 0,805 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2016 target pajak reklame sebesar Rp. 15.473.316.000 dengan realisasi tercapai sebesar Rp. 18.458.678.706 . secara prosentase 114,29 %

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota
2. Potensi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2016

mengalami kenaikan serta melewati target yaitu rata-rata diatas 100 % , , hanya tahun 2015 tidak mencapai target yaitu 91,99 %

3. Pajak Reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , masing sebesar 1,449 % , 0,940% , 0,972, 0,809 % , 0,688 % , 0,805 %

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adrian, S. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anonim. (2010). *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah*. Indonesia: Dirjen Pajak.
- Nurcholis. (2007). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Samudra, A. A. (2015.). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers PT. Rajagrafindo Persada.
- Sayugo, A. P. (2016). Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Manajemen* , Vol 10 No.1.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Watini Sri, I. S. (2010). Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung,. *Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November* , 181-201.

Analisis Return On Assets (ROA) dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk

Rani Kurniasari

ASM BSI Jakarta
Jl. Jatiwaringin Raya No. 18, Jakarta Timur
Email : rani.rku@bsi.ac.id

Abstract - Companies are always trying to get maximum results by using the capital they have optimally included in banking activities. A healthy bank can generate optimal returns. Appropriate capital management by upholding the principle of banking should be done so that Profit can be optimal. In addition, the Bank should also be keen to see the needs of customers to be trusted by customers so that the Bank's profitability can be maximized. The health of a bank can be seen from the use of capital to generate profit after tax. In this study the authors use the quantitative method that is through annual financial statements of PT Bank Sinar Mas TBK contained in Bank Indonesia. The analytical tool used in this study is Multiple Linear Regression using the application of IBM SPSS Statistics 22. The financial statements used are the financial statements of tubes in 2011 until 2015. The calculation results between ROA and ROE to CAR simultaneously there is a very strong relationship that is of 0.935. Between ROA and ROE to CAR simultaneously there is a significant influence or contribution of 87%. The multiple regression equation that is formed is $Y = 13,971 + 11,717 X_1 - 1,248 X_2$

Keyword : ROA, ROE, CAR

I. PENDAHULUAN

Modal merupakan dana yang ditanamkan pemilik untuk memulai dan menjalankan usahanya. Besar kecilnya modal dapat menentukan seberapa besar laba yang akan diperoleh. Jadi, keuntungan suatu perusahaan dapat diperkirakan dengan adanya pengelolaan modal yang tepat. Setelah berjalannya suatu usaha maka laba yang diperoleh dapat dialokasikan untuk memperluas usaha.

Dalam dunia perbankan ada standar untuk kepemilikan modal atau disebut dengan kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) yang didasarkan kepada standar yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Penyediaan modal minimal ini dihitung dengan menggunakan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR dilakukan untuk menutup segala risiko kerugian yang mungkin terjadi, baik risiko kredit, risiko operasional, maupun risiko pasar.

Modal selain sebagai penyangga dari kemungkinan adanya suatu risiko kerugian, modal juga berperan untuk menjaga kepercayaan deposan terhadap aktivitasnya. Sehingga keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari bagaimana bank tersebut menggunakan modal untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dan menghasilkan keuntungan bagi bank.

Kemampuan modal bank dalam menghasilkan keuntungan inilah yang disebut dengan rentabilitas. Dan sebaliknya, rentabilitas sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank.

Rentabilitas adalah salah satu aspek penilaian kesehatan bank dilihat dari kemampuannya dalam menciptakan laba, dua diantaranya adalah *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). ROA merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak atas kepemilikan aset. Sedangkan, ROE adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah pajak atas pengelolaan modal.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui pengaruh rentabilitas dengan menggunakan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) terhadap rasio permodalan dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR) Pada PT. Bank Sinarmas.

1.1 Rasio Rentabilitas

Ada beberapa pengertian kompensasi yang dikemukakan oleh para ahli. Rentabilitas rasio sering disebut profitabilitas usaha atau rasio keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2014:196).

Rentabilitas atau profitabilitas adalah pengukuran keuntungan yang diperoleh dari modal atau dana yang berasal dari pinjaman dan dari modal sendiri yang telah digunakan dalam operasi perusahaan (Jumingan, 2014:141).

Sedangkan, menurut Fahmi (2014:135) “rasio profitabilitas ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi”.

Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut (Slamet Riyadi dalam Pandia (2012:64)).

Menurut Pandia (2012:65) “rentabilitas (*earnings*) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Rentabilitas

Tujuan dan manfaat Rasio Rentabilitas Menurut Hampton dalam Jumingan (2014:122) adalah mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Weston dan Brigham dalam Jumingan (2014:122) rasio profitabilitas bertujuan mengukur efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan dana. Berdasarkan dua pendapat di atas maka Jumingan (2014:243) menyimpulkan bahwa “tujuan penggunaan rasio rentabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank”.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2014:197), yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

6. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.

1.3 Return On Assets (ROA)

Return on total assets atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2014:202).

Pengertian *Return on Assets* (ROA) menurut Rivai,dkk (2013:480) adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.

Untuk menghitung rasio ROA menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Seblm Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Semakin besar ROA, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan aset.

1.3.1 Return On Equity (ROE)

Menurut Sutrisno (2013:229) “*Return on Equity* ini sering disebut dengan *rate of return on Net Worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki,

sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai *rentabilitas modal sendiri*”.

Return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian sebaliknya (Kasmir 2014:204).

Menurut Pandia (2012:71) “*return on equity* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat presentase yang dapat dihasilkan. Untuk menghitung rasio ROE menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Inti (rata-rata)}} \times 100 \%$$

1.4 Rasio Permodalan

1.4.1 Pengertian Rasio Permodalan

Menurut Kasmir (2014:232) “*capital ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih”.

Menurut Pandia (2012:224) “modal adalah faktor penting bagi suatu perusahaan dalam rangka pengembangan usaha serta untuk menampung risiko-risiko yang mungkin terjadi”.

Bagi bank, modal juga merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank. Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “*senior capital*” yakni modal yang diperoleh dari saham *preferen* dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/ simpanan masyarakat (Pandia, 2012:28).

1.5 Tujuan dan Fungsi Rasio Permodalan

Rasio permodalan memiliki tujuan penggunaan untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien (Jumingan, 2014:243).

Adapun fungsi modal menurut Pandia (2012:224) adalah:

1. Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat diharapkan.
2. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai usaha.
3. Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank atau kekayaan para pemegang saham.
4. Dengan modal yang mencukupi memungkinkan bagi manajemen bank untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi.

1.6 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Wardiah (2013:295) “CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.

Sementara itu menurut Pandia (2012:31) bagi bank yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* yang didasarkan pada ketentuan *Bank for International Settlements* (BIS) yaitu sebesar 8% (delapan persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Cara menghitung CAR dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 dalam Pandia (2012:33) yang didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements*, modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:

1. Modal Inti
Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:
 - a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor efektif oleh pemiliknya.
 - b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank.
 - c. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
 - d. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
 - e. Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - f. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditentukan penggunaannya oleh RUPS.

- g. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak.
 - h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan.
2. Modal Pelengkap
- Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:
- a. Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan direktor jenderal pajak.
 - b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali aktiva produktif maksimal 1,25% dari jumlah ATMR.
 - c. Modal kuasi yang menurut BIS disebut *hybrid (debt/ equity) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.
 - d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat yang dibentuk oleh bank dengan pemberi pinjaman dan mendapat persetujuan Bank Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari laporan keuangan PT Bank Sinar Mas Tbk. . Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulasi

regresi berganda (*Multiple Linear Regression*) menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 22.

III. PEMBAHASAN

3.1 Data Penelitian

3.1.1 Rasio Return On Assets (ROA)

Berdasarkan publikasi laporan keuangan yang terdapat pada *website* PT Bank Sinarmas Tbk diperoleh data meliputi laporan neraca dan laba rugi untuk memperhitungkan rasio rentabilitas yaitu *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) untuk periode triwulan 2011 sampai dengan 2015. Data yang digunakan adalah data triwulan, sehingga untuk dapat mengukur *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) komponen yang berasal dari laporan laba rugi harus disetahunkan terlebih dahulu.

1. Data Return On Assets (ROA)

Return on assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak atas kepemilikan aset. ROA didapat dengan cara membagi laba sebelum pajak (yang disetahunkan) dengan total aset. Berikut merupakan data dan hasil perhitungan ROA PT Bank Sinarmas Tbk periode triwulan 2011 sampai dengan 2015:

Tabel.1. Perhitungan ROA PT Bank Sinarmas Tbk Periode Triwulan Tahun 2011-2015

Keterangan Tahun		Laba Sebelum Pajak (Jt)	Total Aset (Jt)	ROA (%)
2011	Triwulan I	43.284	11.882.661	1,46
	Triwulan II	81.780	12.920.065	1,27
	Triwulan III	114.429	15.623.923	0,98
	Triwulan IV	155.077	16.658.656	0,93
2012	Triwulan I	49.001	17.152.395	1,14
	Triwulan II	146.760	16.241.192	1,81
	Triwulan III	218.633	16.712.845	1,74
	Triwulan IV	285.479	15.151.892	1,88
2013	Triwulan I	70.780	15.175.635	1,87
	Triwulan II	143.356	15.623.674	1,84
	Triwulan III	215.421	17.684.314	1,62
	Triwulan IV	286.100	17.447.455	1,64
2014	Triwulan I	45.394	17.642.065	1,03
	Triwulan II	102.355	19.841.980	1,03
	Triwulan III	152.769	20.104.638	1,01
	Triwulan IV	200.895	21.259.549	0,94

Keterangan Tahun		Laba Sebelum Pajak (Jt)	Total Aset (Jt)	ROA (%)
2015	Triwulan I	59.319	21.389.953	1,11
	Triwulan II	93.271	24.200.267	0,77
	Triwulan III	205.715	28.261.513	0,97
	Triwulan IV	238.953	27.868.688	0,86

Sumber: Data olahan tahun 2016

Berdasarkan tabel perhitungan ROA di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya PT Bank Sinarmas Tbk selalu mendapatkan laba sebelum pajak tertinggi di periode triwulan IV atau di akhir tahun, serta berdasarkan rata-rata per tahun selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014 terjadi penurunan dan kembali meningkat di tahun 2015. Sedangkan berdasarkan rata-rata per tahun, total aset selalu meningkat setiap tahunnya.

3.1.2 Rasio Return On Equity (ROE)

Data Return On Equity (ROE)

Return on equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah pajak atas pengelolaan modal. ROE didapat dengan cara membagi laba setelah pajak (yang disetahunkan) dengan total modal inti. Berikut merupakan data dan hasil perhitungan ROE PT Bank Sinarmas Tbk periode triwulan 2011 sampai dengan 2015:

Tabel 2. Perhitungan ROE PT Bank Sinarmas Tbk Periode Triwulan Tahun 2011-2015

Keterangan Tahun		Laba Setelah Pajak (Jt)	Total Modal Inti (Jt)	ROE (%)
2011	Triwulan I	32.494	945.885	13,74
	Triwulan II	61.335	1.231.389	9,96
	Triwulan III	85.822	1.250.240	9,15
	Triwulan IV	112.650	1.287.028	8,75
2012	Triwulan I	39.201	1.309.396	11,98
	Triwulan II	117.408	1.323.648	17,74
	Triwulan III	174.906	1.691.224	13,79
	Triwulan IV	227.906	1.692.498	13,47
2013	Triwulan I	56.624	2.248.498	10,07
	Triwulan II	114.685	2.548.592	9,00
	Triwulan III	172.337	2.534.036	9,07
	Triwulan IV	221.100	2.528.077	8,75
2014	Triwulan I	36.315	2.656.602	5,47
	Triwulan II	81.884	2.677.810	6,12
	Triwulan III	122.215	2.700.525	6,03
	Triwulan IV	154.932	2.850.101	5,44
2015	Triwulan I	47.027	2.870.491	6,55
	Triwulan II	74.617	2.729.341	5,47
	Triwulan III	164.572	2.775.871	7,90
	Triwulan IV	185.153	3.073.385	6,02

Sumber: Data olahan tahun 2016

Sama halnya dengan laba sebelum pajak, berdasarkan tabel perhitungan ROE di atas laba setelah pajak PT Bank Sinarmas Tbk tertinggi setiap tahunnya juga terjadi di triwulan IV atau di akhir tahun, serta berdasarkan rata-rata per tahun juga selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014 terjadi penurunan dan kembali meningkat di tahun

2015. Sedangkan berdasarkan rata-rata per tahun, total modal inti selalu meningkat setiap tahunnya.

3.1.3 Data Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin terjadi, baik itu risiko kredit, risiko operasional maupun risiko pasar. CAR

atau rasio kecukupan modal didapat dengan membagi total modal inti dan modal pelengkap dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) ini didasarkan kepada standar yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) sebesar 8%.

Berikut merupakan data dan hasil perhitungan CAR PT Bank Sinarmas Tbk periode triwulan 2011 sampai dengan 2015:

Tabel 3. Perhitungan CAR PT Bank Sinarmas Tbk Periode Triwulan Tahun 2011-2015

Keterangan Tahun		Modal Inti (Jt)	Modal Pelengkap (Jt)	ATMR (Jt)	CAR (%)
2011	Triwulan I	945.885	77.193	8.177.216	12,51
	Triwulan II	1.231.389	83.114	8.682.057	15,14
	Triwulan III	1.250.240	83.514	9.131.142	14,61
	Triwulan IV	1.287.028	95.598	9.887.258	13,98
2012	Triwulan I	1.309.396	107.260	9.827.729	14,41
	Triwulan II	1.323.648	106.420	10.226.530	13,98
	Triwulan III	1.691.224	102.167	10.264.332	17,47
	Triwulan IV	1.692.498	97.637	9.897.087	18,09
2013	Triwulan I	2.248.498	95.417	10.130.075	23,14
	Triwulan II	2.548.592	98.734	11.015.442	24,03
	Triwulan III	2.534.036	98.795	11.576.142	22,74
	Triwulan IV	2.528.077	109.420	12.088.898	21,82
2014	Triwulan I	2.656.602	117.828	12.970.303	21,39
	Triwulan II	2.677.810	118.416	13.654.665	20,48
	Triwulan III	2.700.525	112.606	14.364.833	19,58
	Triwulan IV	2.850.101	126.838	16.197.119	18,38
2015	Triwulan I	2.870.491	137.801	16.996.191	17,70
	Triwulan II	2.729.341	140.916	19.061.485	15,06
	Triwulan III	2.775.871	174.688	21.367.226	13,81
	Triwulan IV	3.073.385	176.981	22.618.674	14,37

Sumber: Data olahan tahun 2016

Berdasarkan tabel perhitungan CAR di atas, rata-rata per tahun modal inti, modal pelengkap, dan ATMR selalu meningkat setiap tahunnya. Serta dapat dilihat bahwa

rasio kecukupan modal PT Bank Sinarmas Tbk memenuhi standar yang ditetapkan.

3.2 Uji Koefisien Korelasi Secara Parsial

Tabel .4. Korelasi Secara Parsial

Correlations				
		CAR	ROA	ROE
CAR	Pearson Correlation	1	,427	-,288
	Sig. (2-tailed)		,060	,217
	N	20	20	20
ROA	Pearson Correlation	,427	1	,705**
	Sig. (2-tailed)	,060		,001
	N	20	20	20
ROE	Pearson Correlation	-,288	,705**	1
	Sig. (2-tailed)	,217	,001	
	N	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel *correlations* di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Nilai korelasi secara parsial antara ROA (X_1)

terhadap CAR (Y).

a. Uji signifikansi:

1) Hipotesis:

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara ROA terhadap CAR.

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara ROA terhadap CAR.

2) Pengambilan keputusan:

Jika : $Sig < \alpha$, maka Ho ditolak.

Jika : $Sig > \alpha$, maka Ho diterima.

$$\alpha = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

$Sig = 0,060 > \alpha = 0,025$, sehingga Ho diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara ROA terhadap CAR. Berdasarkan tabel *correlations* dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara ROA terhadap CAR sebesar 0,427. Nilai ini menunjukkan, ROA berhubungan positif (searah) dan cukup kuat terhadap CAR. Artinya jika nilai ROA naik, maka nilai CAR juga akan naik cukup kuat, dan sebaliknya.

2. Nilai korelasi secara parsial antara ROE (X_2)

terhadap CAR (Y).

a. Uji signifikansi:

1) Hipotesis:

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara ROE terhadap CAR.

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara ROE terhadap CAR.

2) Pengambilan keputusan:

Jika : $Sig < \alpha$, maka Ho ditolak.

Jika : $Sig > \alpha$, maka Ho diterima.

$$\alpha = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

$Sig = 0,217 > \alpha = 0,025$ sehingga Ho diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara ROE terhadap CAR. Berdasarkan tabel *correlations* dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara ROE terhadap CAR sebesar -0,288. Nilai ini menunjukkan, ROE berhubungan negatif (berlawanan arah) dan lemah terhadap CAR. Artinya jika nilai ROE naik, maka nilai CAR akan turun secara lemah, dan sebaliknya.

3.3 Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Secara Simultan

Berikut hasil uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi secara simultan menggunakan SPSS 22:

Tabel.5. Korelasi dan Koefisien Determinasi Secara Simultan

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,935 ^a	,873	,859	1,370221	,873	58,665	2	17	,000

a. Predictors: (Constant), ROE, ROA

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel *model summary* di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Nilai korelasi secara simultan antara ROA

(X_1) dan ROE (X_2) terhadap CAR (Y).

a. Uji signifikansi:

1) Hipotesis:

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara ROA dan ROE terhadap CAR.

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara ROA dan ROE terhadap CAR.

2) Pengambilan keputusan:

Jika : $Sig F_{change} < \alpha$, maka Ho ditolak.

Jika : $Sig F_{change} > \alpha$, maka Ho diterima.

$$\alpha = 0,05$$

Sig $F_{change} = 0,000 < \alpha = 0,05$, sehingga H_0 ditolak.

Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara ROA dan ROE terhadap CAR. Berdasarkan tabel *model summary* dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara ROA dan ROE terhadap CAR sebesar 0,935. Nilai ini menunjukkan, ROA dan ROE berhubungan positif (searah) dan sangat kuat terhadap CAR. Artinya jika nilai ROA dan ROE naik, maka nilai CAR juga akan naik sangat kuat, dan sebaliknya.

2. Nilai koefisien determinasi secara simultan

antara ROA (X_1) dan ROE (X_2) terhadap CAR (Y).

a. Uji signifikansi:

1) Hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara ROA dan ROE terhadap CAR.

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara ROA dan ROE terhadap CAR.

2) Pengambilan keputusan:

3.5 Uji Persamaan Regresi

Uji signifikansi untuk persamaan regresi berganda yang terbentuk dapat dianalisis melalui tabel sebagai berikut:

Tabel .6. Uji Signifikansi Persamaan Regresi Berganda yang Terbentuk

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220,289	2	110,145	58,665	,000 ^b
	Residual	31,918	17	1,878		
	Total	252,207	19			

a. Dependent Variable: CAR

b. Predictors: (Constant), ROE, ROA

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel *anova* dapat dianalisis uji signifikansi persamaan regresi berganda yang terbentuk antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y .

1. Hipotesis:

H_0 : Persamaan regresi berganda yang terbentuk tidak signifikan.

H_a : Persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan.

2. Pengambilan keputusan:

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai H_0 di tolak sehingga nilai signifikan antara ROA dan ROE

Jika : $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika : $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

$$F_{hitung} = F_{change}$$

$$F_{tabel} = F_{(\alpha,k,dk)} = F_{(0,05)(2,17)} = 3,59$$

$F_{hitung} = 58,665 > F_{tabel} = 3,59$, sehingga H_0 ditolak.

Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara ROA dan ROE terhadap CAR. Berdasarkan tabel *model summary* dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi antara ROA dan ROE terhadap CAR sebesar 0,873 atau ROA dan ROE memberikan kontribusi sebesar 87,3% terhadap sedangkan sisanya 12,7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

a. Berdasarkan perbandingan antara F_{hitung} dan

F_{tabel} :

Jika : $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika : $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

$$\text{Nilai } F_{tabel} = F_{(0,05)(2,17)}$$

$F_{hitung} = 58,665 > F_{tabel} = 3,59$, maka H_0 ditolak.

terhadap CAR. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan ROA dan ROE terhadap CAR.

Model persamaan regresi berganda dapat dibentuk melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Model Persamaan Regresi Berganda yang Terbentuk

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,971	1,099		12,708	,000
	ROA	11,717	1,137	1,254	10,303	,000
	ROE	-1,248	,130	-1,173	-9,636	,000

a. Dependent Variable: CAR

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel *coefficients* dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara variabel ROA dan ROE terhadap CAR sebagai berikut:

$$Y = 13,971 + 11,717 X_1 - 1,248 X_2$$

Sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Jika nilai variabel ROA dan ROE sama dengan 0, maka nilai variabel CAR sebesar 13,971 atau 13,9%.
2. Jika nilai variabel ROA bertambah 1 %, maka akan menaikkan nilai variabel CAR sebesar 11,717 atau 11,71%.
3. Jika nilai variabel ROE bertambah 1%, maka akan menurunkan nilai variabel CAR sebesar 1,248 atau 1,24%.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Antara ROA dan ROE terhadap CAR secara parsial terdapat hubungan yang tidak signifikan, dimana antara ROA terhadap CAR memiliki hubungan searah sebesar 0,427 dengan nilai signifikansi sebesar $0,060 > 0,025$ dan antara ROE terhadap CAR memiliki hubungan berlawanan arah sebesar $-0,288$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,217 > 0,025$.
2. Antara ROA dan ROE terhadap CAR secara simultan terdapat hubungan yang sangat kuat sebesar 0,935. Antara ROA dan ROE terhadap CAR secara simultan terdapat pengaruh atau kontribusi yang signifikan sebesar 87% dengan nilai signifikansi

$$F_{hitung} = 58,665 > F_{tabel} = 3,59$$

3. Persamaan regresi berganda yang terbentuk yaitu $Y = 13,971 + 11,717 X_1 - 1,248 X_2$ signifikan, baik berdasarkan perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel}

maupun berdasarkan nilai probabilitas. Dimana nilai konstanta (*a*) adalah sebesar 13,971 menunjukkan jika nilai variabel ROA dan ROE sama dengan 0, maka nilai variabel CAR sebesar 13,971 atau 13,9%, dan diketahui bahwa besarnya nilai koefisien regresi variabel ROA sebesar 11,717 menunjukkan setiap penambahan 1% nilai variabel ROA, maka akan menaikkan nilai variabel CAR sebesar 11,717 atau 11,71%. Nilai koefisien regresi variabel ROE sebesar -1,248 menunjukkan setiap penambahan 1% nilai variabel ROE, maka akan menurunkan nilai variabel CAR sebesar 1,248 atau 1,24%.

REFERENSI

- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Perbankan dan Teori Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia, B. (2015, Januari 15). www.bi.go.id. Dipetik Januari 20, 2016, dari www.bi.go.id.
- Jumingan. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, P. A. (2013). *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta

Ratiah¹, Ariana Rachma²

¹Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
JL.Dewi Sartika No.289, Cawang, Jakarta Timur
Email: ratiah.rty@bsi.ac.id

²Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
JL.Dewi Sartika No.289, Cawang, Jakarta Timur
Email: arianarachma15@gmail.com

Abstract—State revenue is one of them derived from the tax sector. Taxes are a contribution from the people to the state coffers without direct reciprocal services used to finance government expenditures and the general public. Tax receipts of which are from Value Added Tax. Value Added Tax (PPN) has the second rank after Income Tax (PPh) in contributing revenue in the field of taxation. it is proper that Value Added Tax (PPN) get great attention from the Directorate General of Taxes in order to impose PPN (Value Added Tax) can be implemented effectively and efficiently. Value Added Tax is subject to activities related to the purchase or sale of Taxable Goods and / or Services subject to 10% of the sale price and / or purchase price. And The purpose of this study is to determine the effect of the application of Value Added Tax to income statement at PT Consistel Indonesia. While the type of data used by the author is quantitative data ie data in the form of financial statements, especially income statement and the amount of Value Added Tax. The sampling technique in this study used purposive sampling where in the determination of the sample based on the criteria specified by the researchers and then analyzed using simple linear regression. And the result of this research shows that Value Added Tax has influence to Profit Loss equal to 41,1% and the rest 58,9% influenced by other factors outside of independent variable which mean Value Added Tax (PPN) have influence not significant to Profit Loss at PT .Consustel Indonesia

Keywords: Value Added Tax, Profit and Loss

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berkembang, untuk menjadi maju Indonesia harus menjalankan program untuk peningkatan diberbagai bidang. Dalam menjalankan tujuan tersebut, diperlukan dana dan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang jumlahnya tidak sedikit, untuk menuju pencapaian atas penggunaan dana dan pengeluaran biaya tersebut disusun sebuah rencana yang nantinya akan dijalankan dalam tahun yang akan datang, yaitu rencana yang memuat tentang anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara yang biasa disebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hal tersebut sesuai dengan fungsi dari pajak menurut Resmi (2014:3) mengemukakan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulierend (pengatur):

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas

negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi Regulierend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pendapatan negara salah satunya didapat dari pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat ke kas negara tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan masyarakat umum. Penerimaan pajak salah satunya dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai urutan kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) dalam menyumbang penerimaan di bidang perpajakan. Sudah selayaknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendapatkan perhatian yang besar dari Direktorat Jenderal Pajak agar pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas aktivitas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sebesar 10% dari harga jual dan atau harga beli. Dan aturan mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PT Consistel Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu Jasa Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Dilihat dari kegiatan usahanya PT Consistel Indonesia dikenakan PPN atas jasa. PT Consistel Indonesia menjual jasa kena pajak kepada PT Telekomunikasi Indonesia sebagai wajib pajak pungut. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Consistel Indonesia harus membuat suatu pembukuan atau pencatatan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan haruslah diperhatikan, karena hasil pembukuan tersebut berperan penting sebagai data untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Waluyo (2011:18) di dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif PPN, dan Faktur Pajak.

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang sebagai berikut:

a. Harga Jual

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 18, yang dimaksud dengan Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 19, yang dimaksud dengan Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut

Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

c. Nilai Impor

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 20, yang dimaksud dengan Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah:

$CIF + BEA \text{ MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$ (dalam nilai impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM).

d. Nilai Ekspor

Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 26, yang dimaksud dengan Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain

Ketentuan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.56/PMK.03/2015. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah:

- 1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 2) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata.
- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- 5) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- 6) Untuk BKP atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- 7) Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Perolehan.
- 8) Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- 9) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.

- 10) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus ditagih.
- 11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalance atas penyerahan jasa perantara penjualan, adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih.
- 12) Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, PPN dikenakan tarif sebesar:

- a. Tarif PPN sebesar 10%
- b. Tarif PPN 0% diterapkan atas:
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% yang perubahan tarif nya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Faktor Pajak

Faktor pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi lengkap, jelas, dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa laporan keuangan khususnya laporan laba rugi dan jumlah Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan sumber data yang digunakan diperoleh penulis dalam melakukan penelitiannya adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bagian *finance* dan *accounting* pada PT. Consistel Indonesia, literatur perpustakaan dan data-data pendukung lainnya.

Teknik sampling diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Populasi

Populasi dan sampel merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, menurut Riana

(2012:148), adalah: “Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah periode (tahun) waktu dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan laba rugi pada PT. Consistel Indonesia.

2. Sampel

Menurut Riana (2012:149) mendefinisikan sampel adalah “Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi, dalam arti sempit harus bersifat representasi. Tahapan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dalam memilih subyek berdasarkan kriteria spesifikasi yang ditetapkan peneliti dengan melakukan pengambilan sampel dari PT. Consistel Indonesia dan melakukan pengecekan ulang proses sampling dengan cara mencocokkan data dari PT. Consistel Indonesia dengan metode analisis regresi linier sederhana.

2.2. Variabel Pajak Pertambahan Nilai (X)

Data variabel X yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Consistel Indonesia dari tahun 2012-2015. Rekapitulasi data PPN sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai PT. Consistel Indonesia

No	Tahun	Pajak Pertambahan Nilai	Loan (LN)
1	2012	Rp 656.467.526	20,3
2	2013	Rp 872.026.606	20,59
3	2014	Rp 1.179.507.971	20,89
4	2015	Rp 375.738.721	19,74
Total		Rp 3.083.740.824	81,52

Sumber: hasil olah data

2.3. Variabel Laporan Laba Rugi (Y)

Data variabel Y dalam penelitian ini adalah laporan Laba Rugi PT. Consistel Indonesia dari tahun 2012-2015. Rekapitulasi laporan Laba Rugi sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Laporan Laba Rugi PT.
Consistel Indonesia

No	Tahun	Laba Rugi		Loan (LN)
1	2012	Rp	5.634.000.000	22,45
2	2013	Rp	1.237.000.000	20,94
3	2014	Rp	7.356.000.000	22,72
4	2015	Rp	893.000.000	20,61
Total		Rp	15.120.000.000	86,72

Sumber: hasil olah data

2.4. Tabel Penolong

Tabel penolong digunakan untuk mempermudah penulis menghitung dan menganalisa data melalui analisis statistik apakah adanya hubungan atau pengaruh dari Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Rugi perusahaan, maka penulis menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Tabel Penolong Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan Laba Rugi PT.Consistel Indonesia

No	Tahun	X	Y	X ²	Y ²	X.Y
1	2012	20,3	22,45	412,09	504	455,74
2	2013	20,59	20,94	423,95	438,48	431,15
3	2014	20,89	22,72	436,39	516,2	474,62
4	2015	19,74	20,61	389,67	424,78	406,84
Total		81,52	81,52	1662,1	1883,46	1768,35

Sumber: hasil olah data

2.5. Analisis Hipotesis

Analisis yang akan digunakan penulis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap variabel terikat yakni (Y) yaitu laba rugi PT. Consistel Indonesia adalah analisis korelasi, determinasi, regrasi. Untuk memudahkan dan mempercepat proses pengolahan data, penulis menggunakan program komputer pengolah angka yaitu software IBM *Statistikal Product & Service Solutions* (SPSS) *Versi 21* dengan menggunakan data sebagai berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai dan
Laba Rugi

No	Tahun	Pajak Pertambahan Nilai	Laba Rugi
1	2012	20,3	22,45
2	2013	20,59	20,94
3	2014	20,89	22,72
4	2015	19,74	20,61

Sumber: hasil olah data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Laba Rugi pada PT. Consistel Indonesia. Proses pengolahan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara manual dan menggunakan program *software Statistical Product & Service Solutios* (SPSS) *Versi 21*.

1. Pengolahan data secara manual berdasarkan table 3 diketahui data sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= 4 \\
 (\sum X) &= 81,52 \\
 (\sum X^2) &= 1662,10 \\
 (\sum X)^2 &= (81,52)^2 = 6645,51 \\
 (\sum Y) &= 86,72 \\
 (\sum Y^2) &= 1883,46 \\
 (\sum Y)^2 &= (86,72)^2 = 7520,36 \\
 (\sum XY) &= 1768,35 \\
 r &= \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2) - (\sum X)^2} \times \sqrt{(n\sum Y^2) - (\sum Y)^2}} \\
 &= \frac{4 \times 1768,35 - (81,52)(86,72)}{\sqrt{(4 \times 1662,10) - (81,52)^2} \times \sqrt{(4 \times 1883,46) - (86,72)^2}} \\
 &= \frac{7073,4 - 7069,41}{\sqrt{(6648,4 - 6645,51) \times (7533,84 - 7520,36)}} \\
 &= \frac{3,99}{\sqrt{2,89 \times 13,48}} \\
 &= \frac{3,99}{\sqrt{38,96}} = \frac{3,99}{6,24} = 0,639
 \end{aligned}$$

Berikut ini disajikan tabel hasil pengolahan data menggunakan program SPSS.

Tabel 5
Output Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		Pajak Pertambahan Nilai	Laba Rugi
Pajak Pertambahan Nilai	Pearson Correlation	1	,641
	Sig. (2-tailed)		,359
	N	4	4
Laba Rugi	Pearson Correlation	,641	1
	Sig. (2-tailed)	,359	
	N	4	4

Berdasarkan hasil output diatas maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha: Ada hubungan signifikan antara pajak pertambahan nilai terhadap laba rugi.

Ho: Ada hubungan tidak signifikan antara pajak pertambahan nilai terhadap laba rugi.

Dalam Sugiyono (2016:184) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi antara 0,60-0,799 dikategorikan pada tingkat hubungan yang kuat. Dilihat pada tabel III.5 kolom Pearson Correlation Sig nilai korelasi atau hubungan (R) antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Laba Rugi adalah sebesar 0,641. Artinya ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, makin besar nilai pajak pertambahan nilai maka makin tinggi pula nilai laba rugi, dalam kasus penelitian ini dilihat dari laporan laba rugi perusahaan mengalami kerugian selama 4 tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai 2015.

3.2. Uji Koefisien Determinasi

Analisis determinasi berfungsi untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Rugi pada PT. Consistel Indonesia dan seberapa besar faktor lain yang mempengaruhi. Dalam proses pengolahan data dilakukan secara manual dan menggunakan program software IBM Statistical Product & Service Solutions (SPSS) Versi 21.

1.Data diolah secara manual dengan hasil sebagai berikut:

Diketahui $r = 0,639$

$KD = r^2 \times 100\% = (0,639)^2 \times 100\% = 40,83$

2.Hasil pengolahan data menggunakan program SPSS.

Tabel 6
Output Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,641 ^a	,411	,116	,99586

a. Predictors: (Constant), Pajak Pertambahan Nilai

Pada tabel 6 diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,411 dilihat pada tabel R Square yang berarti

bahwa pengaruh variabel bebas (X) yaitu Pajak Pertambahan Nilai terhadap variabel terikat (Y) yaitu Laba Rugi adalah sebesar 41,1% yang sedangkan 58,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel bebas (X) seperti hutang usaha (*Account Payable*).

3.3. Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Laba Rugi pada PT. Consistel Indonesia. Dalam proses pengolahan data dilakukan secara manual dan menggunakan program software IBM Statistical Product & Service Solutions (SPSS) Versi 21.

1. Hasil pengolahan data secara manual

Dari tabel 3 diketahui data sebagai berikut:

$$n = 4$$

$$(\sum XY) = 1768,35$$

$$(\sum X) = 81,52$$

$$(\sum Y) = 86,72$$

$$(\sum X^2) = 1662,10$$

$$(\sum X)^2 = (81,52)^2 = 6645,51$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$= \frac{4 \times 1768,35 - 81,52 \times 86,72}{4 \times 1662,10 - 6645,5}$$

$$= \frac{7073,4 - 7069,41}{6648,4 - 6645,5}$$

$$= \frac{3,99}{2,89} = 1,381$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

$$= \frac{86,72 - 1,381 \times 81,52}{4}$$

$$= \frac{86,72 - 112,58}{4} = \frac{-25,86}{4} = -6,465$$

6,465

2. Berikut ini disajikan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS.

Tabel 7
Output Uji Persamaan Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	-6,567	23,921		-.275	,809
Pajak Pertambahan Nilai	1,386	1,173	,641	1,181	,359

a. Dependent Variable: Laba Rugi

Berdasarkan tabel.7 maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak artinya ada pengaruh secara signifikan.

H_0 : Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak artinya ada pengaruh secara tidak signifikan.

Tabel distribusi t dicari dengan ($\alpha = 5\%$) uji dua pihak jadi $5\% : 2 = 2,5\%$ atau (0,025) dengan derajat kebebasan ($df = n-2 = 4-2= 2$ sehingga didapat $t_{tabel} = 4,303$. Pada tabel diatas didapat nilai t_{hitung} sebesar 1,181. Ternyata nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $1,181 < 4,303$. Sedangkan nilai sig sebesar 0,359 kemudian dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05 ternyata nilai probabilitas 0,05 lebih kecil dari nilai sig yaitu sebesar 0,359 atau ($0,05 < 0,359$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pajak pertambahan nilai mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap laba rugi.

Sedangkan dari hasil uji persamaan analisis regresi di atas diperoleh nilai koefisien *constant*-nya adalah sebesar -6,567 dan nilai koefisien variabel yaitu Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 1,386 dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* B. Dari keterangan tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX$$

Keterangan : Y = Laba Rugi

α = konstanta

b = koefisien regresi

X = Pajak Pertambahan Nilai

$$Y = -6,567 + 1,386X$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- Jika besarnya pajak pertambahan nilai bernilai nol (0), maka profitabilitasnya akan bernilai -6,567.
- Koefisien regresi variabel X sebesar 1,386, artinya jika pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan sebesar Rp 1 maka laba rugi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1,386. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pajak pertambahan nilai dengan laba rugi, semakin naik

pajak pertambahan nilai maka semakin meningkat laba rugi perusahaan.

IV. KESIMPULAN

Menurut analisa yang dilakukan penulis dalam melakukan riset di PT. Consistel Indonesia Jakarta, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Besarnya hubungan antara variabel bebas (X) yaitu Pajak Pertambahan Nilai dengan variabel terikat (Y) yaitu Laba Rugi adalah sebesar 0,641 yang artinya bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y pada kategori korelasi kuat.
- Besarnya prosentase pengaruh variabel Pajak Pertambahan Nilai terhadap laporan Laba Rugi PT. Consistel Indonesia yang disebut koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,411 yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas (Pajak Pertambahan Nilai) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Laba Rugi) adalah sebesar 41,1% dan 58,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel bebas (Pajak Pertambahan Nilai) seperti hutang usaha.
- Pada uji persamaan analisis regresi linear sederhana atas variabel bebas (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap variabel terikat (Laba Rugi) dengan nilai thitung sebesar 1,181 lebih kecil dari ttabel sebesar 4,303 atau $1,181 < 4,303$ dengan nilai probabilitas sig sebesar 0,359 yang melebihi nilai probabilitas 0,05 atau ($0,05 < 0,359$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel X mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y.

REFERENSI

- Peraturan Menteri No.197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Riana, Dwisa. *Statistika Deskriptif Itu Mudah*. Tangerang: Jelajah Nusa. 2012.
- Sawono, Jonathan. *Model-Model Linier dan Non Linier Dalam IBM SPSS 21*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah No.42 Tahun 2009.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2007.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia Buku Sebelas*. Jakarta: Salemba Empat.2011

PROFIL PENULIS

Ratiah, SE, MM

Lahir di Cilacap Jawa Tengah dan saat ini berkarir sebagai staf pengajar di Akademi Manajemen Keuangan (AMK) BSI Jakarta sejak tahun 2008 sampai sekarang dan memiliki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli. Selain mengajar saya juga aktif dalam menghasilkan karya ilmiah baik berupa seminar-seminar maupun jurnal ilmiah. Beberapa tulisan pada jurnal ilmiah saya antara lain :

Pengaruh Return Dan Risiko Dalam Pengambilan Keputusan Investasi (Sekuritas Di Bursa Efek Indonesia), diterbitkan

pada Jurnal Perspektif Vol. V111 No. 1 Maret 2010, ISSN 1411-8637.

Peningkatan Partisipasi Sekretaris Profesional Dalam Pengembangan Citra Perusahaan, diterbitkan pada Jurnal Widya Cipta Vol. 1 No. 1 Maret 2010, ISSN 1411-8729. Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Pemakaian Jasa Kredit Pada Perum Pegadaian Pada Jurnal Perspektif Vol XIII No.2 September 2015, ISS 1411-8637. Pengelolaan Pembiayaan Keuangan Dan Pemberian Kredit Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia Pada Jurnal Moneter Vol III No.1 April 2016, Efisiensi Kinerja Keuangan, Permintaan Emas dan Kurs Terhadap Permintaan Saham PT.Indosat Ooredoo, Tbk Pada Jurnal Account Volume III No.2 Desember 2016, Faktor Biaya dan Efisiensi Kerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Mandiri, Tbk Pada Jurnal Moneter Volume IV No.1 April 2017. Seminar-seminar yang pernah diikuti: 1) Pembicara pada Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT): "Penerapan Portofolio Optimal Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Pada Saham Konvensional Dan Saham Syariah" (2016).

Strategi Membeli *Initial Public Offering* (IPO) di Pasar Modal Perdana Indonesia

Ida Hendarsih

Program Studi Manajemen Administrasi
Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Sarana Informatika Jakarta
Email: ida.idh@bsi.ac.id

Abstract - *Capital markets play an important role for economic development as one source of external financing for business and investment vehicles for the community. In the capital market investors can invest by means of ownership of securities for the company. In general, people can buy or as an investor on shares offered by the company. Buying IPO shares should use a certain strategy. The research method used qualitative descriptive analysis in data collection techniques. Collecting data by collecting information contained in newspaper articles, books, or scientific papers on previous research. Initial Public Offering (IPO) is a stock offering in the primary market conducted by a company that wants to go public. Through the capital market, a company may sell its Initial Public Offering (IPO) Initial Public Offering (IPO) to the public in order to obtain funding sources for expansion activities or company operations. Being an investor or buying shares in the capital market is not enough to understand the mechanism of buying and selling securities transactions, both stocks and bonds and profit-loss invest. Especially as inestos IPO must know a certain strategy to avoid loss when after buying IPO.*

Key Word: *Stategy Initial Public Offering(I PO), Capital Markets*

I. PENDAHULUAN

Penawaran Umum (*Public Offering*) lebih dikenal dengan istilah "*Go Public*" karena pihak perusahaan tersebut menjual efek atau surat berharganya kepada masyarakat luas. Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Saham Pertamakali/Perdana disebut juga Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO). Alasan perusahaan *Go Public* karena memerlukan dana untuk membayar utang, restrukturisasi, investasi, atau untuk mengembangkan usahanya. Secara umum awalnya perusahaan mencari sumber pendanaan yang konvensional, yakni dari Perbankan maupun dari Perusahaan Pembiayaan. Apabila Perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dari kreditur atau kreditur sendiri tidak dapat menyediakan dana yang diperlukan maka alternatif lain dapat mencoba melalui Pasar Modal dimana jumlah dana yang tersedia pada para investor jumlahnya sangat banyak atau dapat dikatakan tidak terbatas. Pasar modal merupakan salah satu sarana alternatif untuk mendapatkan sumber dana sehingga dapat membiayai kegiatan operasional perusahaan.

1.1. Pasar Modal

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pasal 1 butir 13)“Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik obligasi, saham, reksa dana, instrumen derivatif,

maupun instrumen lainnya” (Supramono, 2014). Menurut (Tandelilin, 2010)“ Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas”. Dengan demikian, pasar modal merupakan lembaga perantara yang menghubungkan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan diperjualbelikan dalam jangka panjang. Menurut (UU No21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan) Tentanng Otoritas Jasa Keuangan Menyatakan bahwa : “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menurut (Malinda, 2011) “Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belkan, baik surat utang (obligasi), *ekuity* (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya”.

1.2. Pengertian Saham dan IPO (*Initial Public Offering*)

Penjualan pertama saham umum (penawaran umum perdana) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada para invetor umum *diistilahkan Initial Public Offering* (IPO). Penawaran umum dilaksanakan melalui pasar perdana yang berlangsung relatif singkat hanya beberapa hari saja. Penawaran efek dalam pasar perdana dilakukan secara langsung oleh emiten kepada calon investor atas bantuan perusahaan efek selaku penjamin emisi efek dan dibantu oleh agen penjualan. Penentuan harga penawaran efek di pasar perdanan dilakukan

bersama-sama dengan penjamin emisi efek. Menurut (Fahmi, 2012.)“saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan, klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”. Menurut (Sutrisno, 2012) “Saham merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan atau penyertaan pada perusahaan yang berbentuk perusahaan terbatas”.

(Sunariyah, 2011) “Pasar Perdana adalah tempat penjualan surat berharga baru dari perusahaan (emiten) kepada masyarakat melalui sindikasi penjaminan, sebelum surat berharga tersebut diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan Pasar sekunder merupakan pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa, yang merupakan kelanjutan dari pasar perdana”. Pengertian pasar perdana menurut pendapat (Sunariyah, 2011) Pasar Perdana (*Primary Market*) adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan 6-7 hari oleh pihak sebelum saham tersebut dipasarkan di pasar sekunder. Penawaran Perdana Saham atau *Initial Public Offerings* (IPO) adalah penjualan saham kepada masyarakat untuk pertama kalinya oleh suatu perusahaan yang akango public (Bodie, Kane dan Marcus, 2008). Dengan melakukan penawaran umum saham perdana, suatu perusahaan akan berubah statusnya dari perusahaan tertutup (*private company*) menjadi perusahaan terbuka (*public company*). *Initial Public Offering* (IPO) merupakan sebuah aksi korporasi perusahaan dalam rangka mendapatkan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan *going concern*. Penjualan saham pertama ini dikenal sebagai penawaran publik perdana, atau IPO (Bodie, 2007), Sedangkan (Darmaji, 2011) mengungkapkan pengertian *initial public offering* adalah sebagai berikut: “Initial public

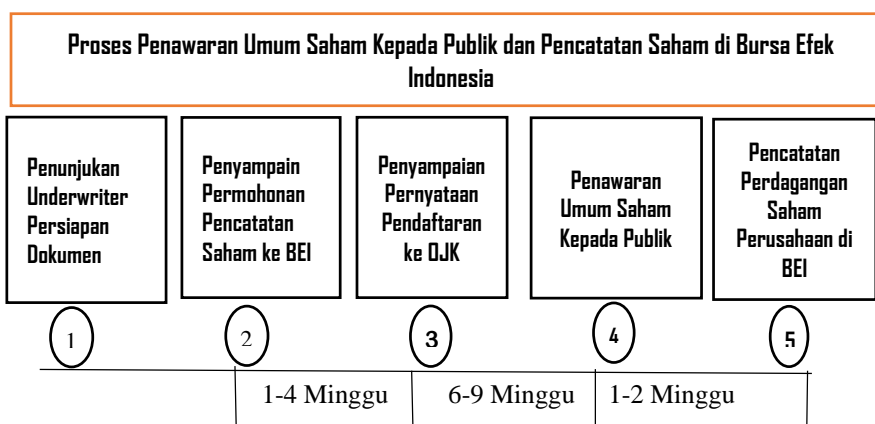
offering (IPO) adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat untuk pertama kalinya di pasar perdana oleh penjamin emisi melalui para agen penjual berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya”.

Dalam melakukan IPO, perusahaan membutuhkan bantuan dari banyak pihak agar proses yang dilakukan berjalan dengan lancar hingga pada saat sahamnya siap untuk dibeli oleh para investor. Pihak-pihak tersebut umumnya terdiri dari Penjamin Emisi, Notaris, Perusahaan appraisal, dan konsultan hukum. Semua pihak mempunyai tugasnya masing-masing untuk memperlancar dan menjamin keamanan dari proses hingga hasil berupa saham yang akan ditawarkan. Selain memperoleh pendanaan baru, perusahaan yang melakukan IPO memiliki banyak potensi keuntungan serta konsekuensi yang juga harus ditanggung olehnya.

1.3. Proses Penerbitan IPO Indonesia

Go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan go publik) untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya (UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)

Peraturan Pelaksanaannya. Terdapat dua metode utama untuk melakukan go public yang digunakan di seluruh dunia. Pertama, melakukan penawaran perdana (*initial public offering*) dengan penawaran pada harga tetap (*a fixed price offer*) atau penawaran melalui sistem tender, metode yang kedua yaitu dengan prosedur lelang (*auction procedure*), dimana penentuan harga saham berdasarkan penawaran tertinggi.



Sumber: (<https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>, 2016)

Gambar: 1. Proses Go Publik

Keterangan gambar

1. Penunjukan Underwriter dan Persiapan Dokumen

Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk underwriter dan lembaga serta

profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public, meminta persetujuan RUPS dan merubah Anggaran Dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2 Penyampaian Permohonan Pencatatan Saham ke Bursa Efek Indonesia

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dll.

Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif (*scripless*) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan akan mengundang perusahaan beserta underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan sertameminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam waktu maksimal 10 Hari Bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada perusahaan.

3 Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK

Setelah mendapatkan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham dari Bursa Efek Indonesia, perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus.

Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal (*book building*), perusahaan harus menunggu ijin dari OJK. Apabila Pernyataan. Pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan/tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham, serta melakukan penawaran umum.

4 Penawaran Umum Saham kepada Publik

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan (*over-subscribe*), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan (*refund*) kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI (tidak dalam bentuk sertifikat).

5 Pencatatan dan Perdagangan Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (ticker code). Kode saham ini akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. (<https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>, 2016)

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan analisa deskriptif kualitatif dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, web site, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Himpunan data yang sudah ada dianalisa yang memunculkan suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Membeli Saham Perdana (IPO).

Berikut ini adalah langkah-langkah atau cara membeli saham IPO, investor datang ke Perusahaan Sekuritas: <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/bagaimanamenjadiseoranginvestor.aspx> (data diolah)

1. Investor datang ke tempat IPO dilaksanakan.
2. Bagi Investor yang belum memiliki rekening efek maka wajib mengisi form pembukaan rekening efek & FPPS.

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan Sekuritas, yaitu formulir Pembukaan Sub Rekening Efek dan formulir Rekening Dana Investor (RDI).

Yang harus diketahui investor bahwa untuk satu formulir tercatat atas nama satu pemesan saja. Jadi satu KTP untuk satu formulir. Penawaran perdana saham perusahaan kepada investor public dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Prosedur tata cara pemesanan saham seperti, "harga penawaran", "jumlah saham yang ditawarkan", "masa penawaran", dan informasi lain yang penting harus dipublikasikan di surat

kabar berskala nasional dan diumumkan kepada masyarakat/publik dalam bentuk prospektus.

3. Perusahaan sekuritas kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang telah diisi sebelumnya dalam form pembukaan rekening efek & FPPS lengkap dengan paraf dan tanda tangan pada tempat yang telah ditentukan.
Setoran dana awal ke rekening di bank RDI atas nama calon investor saham. Masing-masing broker menentukan deposit berbeda-beda (dimulai dari Rp100.000,-).
4. Kemudian akan dilakukan validasi atas pemesanan saham investor
5. Menyerahkan lembaran berwarna hijau FPPS kepada investor
6. Setelah proses validasi pemesanan saham, maka investor kembali ke counter perusahaan sekuritas untuk menyerahkan lembaran FPPS yang berwarna hijau untuk di copy sebagai arsip perusahaan sekuritas.
7. Slip FPPS yang berwarna hijau selanjutnya disimpan oleh investor sebagai bukti pembelian saham.

Satu hal yang harus diingat oleh investor yang ingin membeli Saham melalui IPO adalah biasanya jumlah saham yang ditawarkan sudah dibatasi dalam prosentase tertentu. Misalkan sebuah perusahaan hanya ingin menjual maksimal 20% saham nya ke publik. Maka kepemilikan publik maksimal hanya 20%.

Hal ini berakibat pada terbatasnya lembar saham yang bisa di jual. Misalkan pemesanan saham publik secara keseluruhan telah mencapai 50% dari saham yang ada di perusahaan, maka perusahaan hanya dapat memenuhi sebagian dari permintaan tersebut. Ini artinya bisa saja memesan 100 lot saham tetapi hanya diberikan jatah saham sebesar 50 lot atau bisa terjadi lebih kecil lagi (1 lot = 100 lembar saham). Apabila investor hanya mendapat 50 lot, padahal total uang yang disetor adalah untuk sejumlah 100 lot maka sisa uang tersebut akan dikembalikan ke rekening bank yang telah ditunjuk, dikurangi biaya transfer / kliring(bila ada).

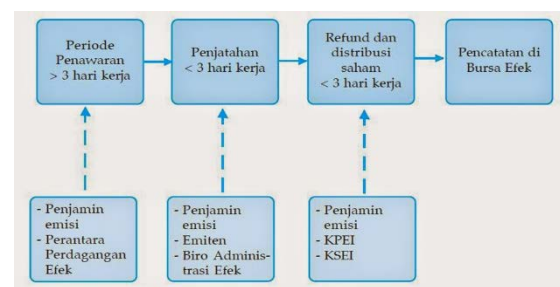
3.2. Proses Pembelian Saham IPO

Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang investor baru tentang proses pembelian IPO:

1. Proses penawaran saham IPO adalah sekitar 2-3 hari kerja pada saat itu harus membayar uang sebanyak saham yang dipesan. Pemesanan saham IPO adalah berdasarkan LOT, 1 Lot=100 Lembar dulu 500lembar saham jadi harus memesan jumlah saham kelipatan 100. Misalkan memesan saham ASTRA dengan harga 6.700 perlembar berarti $6.700 \times 100 \text{ lembar} = 670.000$. Kemudian tentang informasi penjatahan biasanya akan diumumkan 1-2 hari sebelum pencatatan di bursa/listing. Bisa saja membeli saham IPO dengan jumlah 100 Lot tapi

karena banyak peminat, hanya memperoleh 1 Lot-10 Lot hal itu wajar.

2. Mengembalikan formulir pemesanan untuk penawaran saham perdana (IPO) tersebut yang dilengkapi dengan bukti pembayaran ke agen penjualan tepat waktu. Hari terakhir masa penawaran umum merupakan hari terakhir pengembalian. Masa penawaran umum berlangsung selama minimal tiga hari. Kalau investor memang tidak sempat melakukan pembayaran ke rekening agen penjualan, maka dapat melakukan pembayaran secara tunai.
3. Tunggu pengumuman hasil penjatahan. Permintaan IPO tidak selalu semuanya dapat dipenuhi. Jika jumlah IPO yang tersedia sama atau lebih besar dari pada jumlah yang di pesan, pemesan akan menerima seluruh jumlah IPO yang dipesan. Sebaliknya, bila jumlah IPO yang dipesan melebihi jumlah yang tersedia, maka pemesan akan mendapatkan satu lot plus bagian yang teralokasikan dari sisa yang ada, atau penjatahan dilakukan secara undian.
4. Lamanya proses penjatahan paling lambat adalah 6 hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran. Hasil penjatahan dapat ditanyakan kepada agen penjual, atau bila investor berhubungan dengan agen penjual maka agen penjual yang akan menghubungi investor. Jika pemesanan IPO ditolak sebagian atau seluruhnya, atau terjadi pembatalan penawaran umum, uang pemesanan investor akan dikembalikan. Pastikan agen penjualan melakukan hal itu selambat-lambatnya 4 hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut.
5. Apabila jumlah saham yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan, atau telah terjadi "oversubscribed" maka kelebihan dana investor akan dikembalikan (proses ini sering disebut dengan *refund*).
6. Saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepada investor melalui Penjamin Emisi dan Agen Penjual. Investor akan mendapatkan Surat Saham Kolektif (SSK), yaitu bukti investasi. (<https://www.lots.co.id/education/basic/102/Penawaran-dan-Pemesanan-Saham-di-Pasar-Perdana>, 2016) data diolah



Sumber: (<https://www.lots.co.id/education/basic/102/Penawaran-dan-Pemesanan-Saham-di-Pasar-Perdana>, 2016)

Gambar 2: Bagan prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana

Menilai saham IPO, memang lebih sulit dibandingkan saham yang telah terjual di bursa. Pada saham IPO, tidak bisa digunakan analisa Teknikal dan berbagai indikatornya, karena grafiknya belum ada. Untuk mengetahui bagaimana kinerja rata-rata saham yang IPO di Bursa Efek Indonesia, dapat dilihat tabel 2 dengan contoh 25 saham terakhir yang terjual di bursa.

3.3. Perkembangan Saham IPO

Berdasarkan data BEI, hingga 19 Desember 2016 ada 16 perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Berikut adalah daftar perusahaan yang go public di tahun 2016:

Tabel 1 : Perkembangan IPO Tahun 2016

Perusahaan	Kode	Tercatat Di BEI	Terbit Saham	Harga Awal Rp	Harga Jual Rp	Perubahan (%)
PT Bank Artos Indonesia Tbk	ARTO	12/1/2016	1,19 miliar	132	141	6,82 +
PT Mitra Pemuda Tbk	MTRA	10/2/2016	170 juta	185	300	62,12 +
PT Mahaka Radio Integra Tbk	MARI	11/2/1016	105,05 juta	750	975	30 +
PT Bank Ganesha Tbk	BGTG	12/5/2016	5.372 miliar	103	75	27,18 -
PT Cikarang Listrindo Tbk	POWR	14/6/2016	1,60 miliar	1.500	1.285	14,33 -
PT Silo Maritime Perdana Tbk	SHIP	16/6/2016	500 juta	140	494	252,86+
PT Duta Inti Daya Tbk	DAYA	28/6/2016	478,04 juta	180	191	6,11 +
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk	JGLE	29/6/2016	2,3 miliar	140	398	184,2 +
PT Protech Mitra Perkasa Tbk	OASA	18/7/2016	160 juta	190	292	8,15 +
PT Capital Financial Indonesia Tbk	CASA	19/7/2016	5,5 juta	130	440	238,46 +
PT Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	20/9/2016	10,54 miliar	490	545	11,22 +
PT Indo Komoditi Korpora Tbk	INCF	27/9/2016	1,438 miliar	123	448	264,23+
PT Paramita Bangun Sarana Tbk	PBSA	28/9/2016	300 juta	1.350	1.290	4,44 -
PT Aneka Gas Industri Tbk	AGII	28/9/2016	766 juta	1.100	950	13,64 -
PT Prodia Widyahusa da Tbk	PRDA	7/12/2016	187juta	6.500	5.125	21,15 -
PT Bintang Oto Global	BOGA	19/12/2016	2,4 miliar	175	294	185,44+

(Sumber: (BEI, 2017) Data diolah

Dari tabel 1, diketahui selama tahun 2016 ada 16 saham IPO yang diterbitkan oleh perusahaan, dari ke 16 saham IPO ada 11 IPO perusahaan yang mengalami kenaikan harga jual, 5 saham IPO perusahaan yang mengalami penurunan nilai jual dari harga penawaran yaitu IPO: PT Bank Ganesha Tbk, PT Cikarang Listrindo Tbk, PT Paramita Bangun Sarana Tbk, PT Aneka Gas Industri Tbk, PT Prodia Widyahusada Tbk.

Penentuan harga saham perdana, sebelum ditawarkan ke publik atau investor, pihak penjamin emisi dan emiten terlebih dahulu melakukan kesepakatan (*due dilligence*) dan menentukan range atau kisaran harga.

Berdasarkan tabel 2 Saham IPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, ini menandakan semakin banyak perusahaan yang manajemen keuangannya sudah baik dan dengan Go public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur pemodal yang optimal

3.4. Strategi Membeli IPO

a. Pembeli saham investor pemula

Untuk melakukan investasi awal bagi yang belum pernah membeli saham atau investor pemula, sebaiknya memulai main saham-saham IPO dengan alasan berikut:

1. IPO biasanya marak dilakukan pada kondisi pasar *bullish*. Akibatnya, harga saham IPO mungkin akan naik pada waktu ditransaksikan di bursa.
2. Investor pemula tidak perlu menganalisa mendalam saham tersebut; hanya perlu tahu berapa besar animo pasar terhadapnya. Kalau minat beli saham tinggi, maka ikut IPO. Tetapi kalau minat beli rendah, jangan membeli.
3. Investor pemula tidak perlu menentukan harga beli karena harga sudah ditentukan penjamin emisi. (Berbeda dengan transaksi di bursa di mana investor harus menentukan sendiri di harga berapa yang akan dibeli.)
4. investor pemula tidak perlu memilih kapan harus membeli karena tanggal penawaran karena IPO sudah ditentukan. (Di bursa, pembeli yang harus menentukan kapan ingin membeli.)

Tabel 2. Mayoritas Saham Perdana (IPO) Juli 2017

Perusahaan	Kode	IPO Di BEI	Saham Terbit lembar	Harga Saham (RP)
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk	PORT	16-03-2017	576,85 juta	535
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk	CARS	10-04-2017	150 juta	1.750
PT Forza Land Indonesia Tbk	FORZ	28-04-2017	312,5 juta	220
PT Sanurhasta Mitra Tbk	MINA	28-04-2017	262,5 juta	105
PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEO	05-5-2017	450 juta	115
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk	CSIS	10-05-2017	207 juta	300
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk	TAMU	10-05-2017	750 juta	110
PT Terregra Asia Energy Tbk	TGRA	16-05-2017	550 juta	200
PT First Indo American Leasing Tbk	FINN	08-06-2017	766 juta	105
PT Alfa Energi Investama Tbk	FIRE	09-06-2017	300 juta	500
PT Totalindo Eka Persada Tbk	TOPS	16-06-2017	1.666 juta	310
PT Kirana Megatara Tbk	KMTR	19-06-2017	1.152 juta	458
PT Hartadinata Abadi Tbk	HRTA	21-06-2017	1.105 juta	300
PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD)	WOOD	21-06-2017	1.250 juta	260
PT MAP Boga Adiperkasa Tbk	MAPB	21-06-2017	22,17 juta	1.680
PT Armidian Karyatama Tbk (ARMI)	ARMI	21-06-2017	1.637 juta	300
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	HOKI	22-06-2017	700 juta	310
Mark Dynamics Indonesia Tbk	MARK	12-07-2017	760 juta	300
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	GMFI	29-09-2017	2.823 miliar	510
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	MTWI	29-09-2017	310 juta	100
PT Trisula Textile Industries Tbk	BELL	25-09-2017	300 juta	150
Emdeki Utama Tbk	MDKI	25-09-2017	1.807 miliar	600
PT Kapuas Prima Coal Tbk	(ZINC)	10-10-2017	550 juta	140

Sumber: (BEI, 2017) data diolah

Membandingkan kelebihan dan kekurangan IPO, maka ada baiknya investor pemula mulai belajar main saham dari membeli IPO, walau kemungkinan untung banyak sangatlah kecil, tapi sebaliknya, sangat kecil kemungkinan rugi banyak.

Harga saham penawaran perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dengan *underwriter* (penjamin emisi efek) yang ditunjuk oleh emiten, sedangkan harga di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Apabila penentuan harga saham saat IPO secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder di hari pertama, maka terjadi *underpricing*. Besarnya *underpricing* diukur dengan *initial return*. "*Initial return* yaitu *return* yang diperoleh pemegang saham di pasar perdana dan menjualnya di pasar sekunder hari pertama. Apabila pada penentuan harga saham saat IPO lebih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder di hari pertama,

maka terjadi *underpricing* (Kim, 1995) IPO (*Initial Public Offering*) pada umumnya memberikan *abnormal return* yang positif (*initial return*) bagi para investor segera setelah saham-saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat IPO harga saham relatif lebih murah dibandingkan harga saham pada saat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga para

investor akan memperoleh keuntungan yang relatif besar.

Kondisi *underpricing* tidak menguntungkan bagi perusahaan yang melakukan *go public*, karena dana yang diperoleh dari *go public* tidak maksimal. Sebaliknya bila terjadi *overpricing*, maka investor akan merugi, karena mereka tidak menerima *Initial Return* (return awal). Menurut (Ardiansyah, 2004) *Initial Return* (IR) adalah "keuntungan yang diperoleh pemegang saham karena perbedaan harga saham yang dibeli di pasar perdana (saat IPO) dengan harga jual saham yang bersangkutan di hari pertama di pasar sekunder" Untuk mendapatkan *Initial Return* (IR), investor dalam melakukan pembelian efek di pasar perdana biasanya menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melalui prospektus dan bonafiditas lembaga dan profesi yang menunjang penerbitan efek tersebut. Prospektus adalah gambaran umum perusahaan yang memuat keterangan secara lengkap dan jujur mengenai keadaan pemisahaan dan prospeknya dimasa mendatang serta informasi-informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penawaran umum. Informasi dalam prospektus memberikan gambaran tentang kondisi, prospek ekonomi, rencana investigasi, ramalan laba dan dividen yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan.

b. Cara memilih saham IPO yang potensial profit bagi investor

IPO dapat memberi peluang profit bagi investor. Tapi kenyataannya tidak semua saham IPO menguntungkan. Ada juga saham IPO yang menanjak pada hari pertama pencatatan saham, namun pada hari-hari berikutnya, saham tersebut dilanda aksi jual dan tak mampu bangkit lagi maka dikatakan saham tidur, yang mengakibatkan investor akan merugi. Untuk menghindari saham IPO yang bernilai rendah, ada beberapa ciri khusus yang perlu diwaspadai oleh investor yaitu: (Fariska, 2014-2015) data diolah

Ciri lainnya, bisnis dan nama perusahaan tidak jelas dan tidak pernah didengar sebelumnya. Ini adalah ciri saham IPO yang berbahaya. Salah satu cara untuk mencari kejelasan sebuah perusahaan adalah dengan mengecek langsung alamat perusahaannya. Jangan-jangan kantornya hanya berupa ruko atau garasi depan rumah saja. Ini patut dicurigai.

1. Yang harus dilakukan trader sebelum memilih dan membeli saham IPO:

Membeli saham IPO punya keuntungan sendiri bila dibandingkan dengan membeli di bursa efek. Namun, bermain saham, baik IPO maupun lewat bursa efek, tetap harus berpijak pada analisis. Sebab meski saham IPO punya kebaikan dari segi keuntungan saat pembukaan di perdagangan awal, tetapi sangat mungkin turun pada tengah perdagangan hingga tak lagi bangkit hingga penutupan dan hari selanjutnya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menilai saham IPO adalah dengan analisa fundamental dan mencari berbagai informasi yang penting. Informasi tentang saham IPO bisa didapatkan dari prospektus dan riset-riset terkait. Dapat dilihat dari aksi korporasi. Misalkan, pada saat mendapatkan dana baru dari IPO, perusahaan tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan prospektus. Biasanya prospektus/laporan keuangan tersebut dimuat di media cetak. Ada beberapa indikator penting yang bisa digunakan untuk menilai saham IPO:

a. Berapa banyak saham yang dilepas investor harus mengetahui terlebih dulu berapa banyak porsi saham yang akan dilepas. Jika saham yang dilepas porsinya sedikit, harus waspada karena bisa jadi saham ini tidak likuid. Lain halnya jika porsi saham yang ditawarkan besar. Biasanya kalangan pemodal lebih suka saham seperti ini karena likuiditasnya tinggi.

b. Bagaimana *track record* penjamin emisi/underwriter-nya.

Investor perlu memperhatikan *track record* penjamin emisi calon emiten. Investor harus membeli dengan melihat bagaimana perkembangan kinerja perusahaan pada waktu mendatang. "Kalau kinerja mereka bagus dan harga masuk akal, maka sebagai investor punya pilihan saham baru. Penilaian ini mungkin nampak, 2-3 tahun mendatang. Kalau banyak

permintaan, berarti bagus. Data realtime atau Informasi aktual mengenai perdagangan saham atau hal-hal yang mempengaruhinya merupakan hal mendasar yang harus dimonitor. Pilihlah perusahaan sekuritas yang menyediakan fasilitas mengakses data realtime secara gratis.

c. Bagaimana laporan keuangannya

Investor harus mengetahui emiten saham IPO tersebut bergerak pada sektor apa, memperhatikan laporan keuangannya dalam tiga tahun terakhir, serta membandingkan kinerja calon emiten dengan perusahaan lain yang sejenis. Ada beberapa indikator yang dapat dilihat salah satunya yang mudah dengan cara *price earning ratio* (PER) merupakan perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Semakin tinggi PER, semakin mahal pula harga sahamnya.

2. Siapa saja peminatnya.

Dalam memilih saham IPO, investor pemula perlu memperhatikan siapa saja peminat sahamnya. Jika hanya diminati oleh investor domestik, hal itu bisa menjadi sinyal bahwa saham tersebut kurang menarik. Lain halnya jika investor asing turut memburu saham IPO tersebut, di mana mereka melihat ada sesuatu yang berpotensi terhadap kinerja emiten. (Fariska, 2014-2015) data diolah

c. Biaya Transaksi IPO

Diperlukan biaya atas transaksi jual maupun beli yang dilakukan investor. Untuk pembelian dan penjualan saham, investor harus membayar biaya komisi kepada pialang/broker yang melaksanakan pesanan. Besarnya komisi ditentukan oleh Bursa.

Biaya untuk Transaksi Beli:

1. Komisi untuk pialang 0,3% dari transaksi
 2. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10%
- Biaya untuk Transaksi Jual:
1. Komisi untuk pialang 0,3 % dari transaksi
 2. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10% dari besarnya komisi
 3. Pajak Penghasilan atau PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi.

Sebagai ilustrasi, misalnya seorang investor melakukan transaksi pembelian atas saham Telkom (TLKM) sebanyak 20 (dua puluh) lot dimana harga saham Telkom matched pada posisi Rp 3.000 per saham.

Tabel 3. Perhitungan Pembelian Saham

Keterangan	Perhitungan	Nilai uang (RP)
Transaksi Beli	20 X 100 SAHAM X RP 3.000,-	6.000.000,-
Komisi untuk Broker (0.3% dari nilai transaksi)	0.3% x Rp 6.000.000,-	18.000,-
PPN 10% dari Komisi	10% X RP18.000,-	1.800,-
Total Biaya Pembelian Saham		19.800,-
Total Biaya Yang Dikeluarkan		6.019.800,-

Sumber:

(<https://www.lots.co.id/education/basic/102/Penawaran-dan-Pemesanan-Saham-di-Pasar-Perdana>, 2016) data diolah

Beberapa minggu kemudian, investor tersebut melakukan transaksi penjualan atas saham Telkomnya sebanyak 20 (dua puluh) lot dimana harga saham Telkom matched (terjadi) pada posisi Rp 3.300 per saham.

Tabel 4 : Perhitungan Penjualan Saham

Keterangan	Perhitungan	Nilai Uang (RP)
Transaksi Jual	20 X 100 SAHAM X RP 3.300,-	6.600.000,-
Komisi untuk Broker (0.3% dari nilai transaksi)	0.3% x Rp 6.600.000,-	19.800,-
PPN 10% dari Komisi	10% X RP 19.800,-	1.900,-
PPh atas Transaksi Jual (0,1% dari Nilai Transaksi)	0,1% X RP 6.600.000,-	6.600,-
Total Biaya Penjualan Saham		28.300,-
Total Uang Yang Diterima		6.571.700,-

Sumber:

(<https://www.lots.co.id/education/basic/102/Penawaran-dan-Pemesanan-Saham-di-Pasar-Perdana>, 2016) Data diolah

berarti telah terjadi capital gain sebesar:

Rp6.571.700,- - Rp6.019.800,- = Rp551.900

d. Keuntungan dan Risiko Saham IPO

Dapat dikatakan dengan mengamati kondisi saham IPO ada keuntungan ketika membeli IPO bagi investor atau pembeli

1.Saham IPO bersifat longgar karena harga sudah ada patokan. Berbeda dengan kondisi di pasar sekunder pembeli sendiri yang harus tahu akan beli di harga berapa. Karena itu kemungkinan

keuntungan saham IPO tinggi karena ditawarkan pada saat kondisi bullish. Ada kemungkinan keuntungan sebesar 10-30% pada hari pertama pembukaan perdagangan. Demikian berarti kemungkinan harga akan tinggi pada saat pembukaan.

- 2.Khusus saham IPO, analisis bisa dilakukan sebatas kisaran animo pasar saja, berbeda dengan saham di bursa efek, pembeli harus memahami betul analisis dan strategi apa yang akan diterapkan.
- 3.Memaksimalkan return (keuntungan)dari harga saham (jangka pendek dan jangka panjang)
- 4.Memperluas portofolio kepemilikan perusahaan dan mengakumulasi suatu posisi yang tidak mudah ditemukan dipasar sekunder

d. Risiko Saham IPO

1. Pembatasan lot atau pembelian saham IPO sudah ditentukan dari agen brokernya. Contohnya, seorang X membeli 100 lot saham IPO, tetapi ternyata hanya mendapatkan 1 lot, hal biasa sebab jumlah lot ditentukan penerbit, bukan pembeli.
- 2.Ada rentang seminggu sebelum *withdrawal* (penarikan dana). Artinya, investor harus menunggu lebih kurang sepekan sebelum waktu *refund*.

Saham IPO juga berpotensi *dorman* pada kelebihan saham IPO itu sendiri. Peminat tak perlu menganalisis. Cukup mengetahui mana saham yang sedang diminati. Atau saham menjadi saham tidur hal ini biasa dikenal dengan istilah saham IPO “bodong”. Karena perusahaan kinerjanya kurang baik dan masalah keuangan sehingga kurang mendapat perhatian pemodal.www.belajarinvestasi.net

IV. KESIMPULAN

1.Perusahaan yang bagus dan sedang berkembang memutuskan mengumpulkan dana tambahan dari menerbitkan IPO berarti dana tambahan tersebut dapat digunakan untuk perluasan/ekspansi perusahaan atau dapat juga digunakan untuk pembayaran utang. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk go public termasuk ringan jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya seperti meminjam dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga dapat menurunkan beban bunga dan pada akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan. Maka pengaruhnya laju perekonomian akan lebih baik.

2.Sebagai perusahaan publik, memungkinkan karyawan perusahaan untuk memiliki saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan motivasi

bekerja yang berahir menambah pendapatan. Hal ini akan berdampak positif memacu masyarakat berlatih mengubah pola pikir selaku investor sebagai bagian pemilik perusahaan agar melakukan keputusan secara cepat tepat bertanggungjawab terhadap eksistensi perusahaan dan pendapatan masyarakat meningkatkan

3. Semakin tinggi mobilitas investasi masyarakat melalui pasar modal dapat memberikan hasil yang tinggi dan pendapatan masyarakat dapat meningkat. Tetapi disamping itu juga mengandung risiko yang cukup besar. Risiko di pasar modal sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, politik dan sosial suatu negara. Hal ini menuntut para pemilik perusahaan/Owners bekerja sama dengan masyarakat dan pihak pemerintah bertanggungjawab atas stabilitas harga, kualitas produk dan kondisi politik.
4. Perusahaan publik akan lebih dipercaya dibandingkan dengan perusahaan non publik dalam persaingannya, karena perusahaan publik harus transparan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat, karena secara otomatis sebagai perusahaan publik akan lebih banyak diekspos media, analis, investor, dan lembaga lainnya. Maka hal ini mengurangi adanya kecurangan keuangan terhadap publik. Transformasi manajemen menjadi perusahaan yang lebih transparan, profesional, kredibel dan memenuhi tuntutan *Good Corporate Governance*. untuk mencegah terjadinya praktik – praktik bisnis yang tidak sehat.
5. Selain keuntungan ada resiko yang harus dihadapi seorang investor, semakin tinggi harapan penghasilan yang diharapkan maka semakin tinggi kemungkinan resiko yang akan dihadapi seorang investor. Investasi saham perdana IPO bisa memberikan resiko yang tinggi bila salah memilih IPO yang diterbitkan perusahaan. Hal ini menuntut masyarakat untuk mempelajari peraturan tentang saham dan perusahaan go publik .

Hasil pengamatan kegiatan penerbitan saham IPO, strategi membeli Initial *Public Offering* (IPO) di pasar modal perdana indonesia diharapkan perusahaan (*owners*) wajib untuk melakukan keterbukaan informasi secara penuh kepada publik (*full disclosure*). Semoga dengan telah diketahui strategi membeli saham IPO perusahaan publik animo masyarakat membeli saham lebih meningkat, konsekuensi perusahaan publik dimana perusahaan diwajibkan untuk memenuhi berbagai peraturan keterbukaan yang ditentukan Bapepam-Lembaga Keuangan, Lembaga Bursa dan berbagai kewajiban lainnya. Kewajiban membayar dividen sesuai dengan perjanjian. Diharapkan pengamatan tentang saham IPO akan lebih baik dalam pembelian saham manual

dan online. keterbukaan informasi secara penuh kepada publik (*full disclosure*).

REFERENSI

- Ardiansyah, M. (2004). Pengaruh Variabel Keuangan terhadap return Awal dan Return 15 hari Setelah IPO serta Moderasi Besaran Perusahaan Terhadap Hubungan antara Variabel Keuangan dengan Return awal dan Return 15 hari Setelah IPO di Bursa Efek Jakarta”. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol 7.No 2*, 125-153.
- Arif, W. (2017). *Mayoritas Saham IPO Juli,2017*, *Metrotvnews.com*.
- Athanasiu, t. (2012). *Panduan Berinvestasi Saham*. Jakarta: Gramedia.
- BEI, I. B. (2017). *Saham Perusahaan go publik*. <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>.
- Bodie, B. (2007). The Effect of stock Split in Efficient market. *Journal of Financial Economic(JFE).vol 6. Journal of Financial Economic(JFE).vol 6*, 414.
- Darmaji, T. d. (2011). *Pasar Modaldi indonesia, Edisi Ketiga*. jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2012.). *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta. .
- Fariska, N. (2014-2015). Retrieved from <http://www.edukasisaham.co.id/cara-investasi-saham/>.
- Hariyani Iswi, R. S. (1 Des 2010). *Buku pintar Hukum Bisnis pasar Modal*. Jakarta: Trans Media,2010.
- <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>. (2016).
- <https://www.lots.co.id/education/basic/102/Penawaran-dan-Pemesanan-Saham-di-Pasar-Perdana>. (2016).
- Kim, J.-B. I. (1995, December). The Role of financial Variable in The Pricing of Korean Public Offering. *Pasific-Basin Finance Journal.*, 449-464.
- Malinda, M. &. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.
- Samsul, M. (2006). *Pasar Modal dan Manajemen Fortopolio*. Jakarta: Erlangga.

- Sekuritas, P. I. (2017). *Pt Indo Premier Sekuritas.com*. Retrieved from IndoPremier.com.
- Sunariyah. (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*). Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Supramono. (2014). *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan*. Yogyakarta: Andi.
- Susanto, S. (2010). *Analisis Teknikal di Bursa Efek.*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sutrisno. (2012). *Manajemen Keuangan Teori Konsep & aplikasi*. Yogyakarta Edisi 1: Ekonisia.
- Tandelilin, E. (2010). *Eduardus Tandelilin. . Fortofolio dan investasi*. Yogyakarta: konisius.
- UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal* . (n.d.). Jakarta: UU Pasar Modal.
- UU No21 Tahun 2011 Tentannng Otoritas Jasa Keuangan*. (n.d.). Jakarta.
- Widioatmojo, S. (2008.). *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*. Jakarta: Elex MediaKomputindo.

Analisis Pemberian Kredit terhadap Pendapatan Bunga Bersih Pada PT Bank DKI

Yohana Marsaulina Manurung¹, Sofyan Marwansyah²

¹Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
e-mail: lhaph.lhuph.lhoph@gmail.com

²Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
e-mail: sofyan.smw@bsi.ac.id

Abstract – Credit is a bank product that provides greater benefits than other bank products. The amount of credit granted by the bank affects the income level earned in a period, one of which is net interest income. The purpose of this research is to know the relationship between crediting and net interest income of PT Bank DKI. The author uses quantitative analysis by using the correlation coefficient test method, test coefficient of determination, and test the regression equation processed using SPSS software. The data of credit disbursement and net interest income obtained from Annual Report in the form of balance sheet and income statement of PT Bank DKI for the period of 2005-2015. By doing the analysis, it can be seen the correlation relationship between the provision of credit and net interest income is significant because the value of Sig. Of $0.000 < 0.05$ and has a strong and unidirectional relationship to net interest income because the value of correlation coefficient formed at 0.980. The effect of lending and net interest income is significant because the value of Sig. Amounted to $0,000 < 0.05$ and net interest income was influenced by the lending of 96.1% and the remaining 3.9% influenced by other factors. And the regression equation that formed between giving credit to net interest income is significant because the value of Sig. Of $0.000 < 0.05$ with the formation that is $\hat{Y} = 7,131 + 0,685X$.

Keywords: *the Provision of Credit, Net Interest Income*

I. PENDAHULUAN

Sistem keuangan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian masyarakat dan negara karena dapat mengurangi dan mengatasi pengangguran sehingga menjadi penunjang proses pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membantu terwujudnya stabilitas nasional.

Setiap individu yang memiliki usaha maupun tidak pasti memerlukan uang/dana untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk memenuhi kebutuhan usaha yang dimilikinya. Namun, pada saat ini tersedianya uang/dana merupakan masalah serius yang sering kali dihadapi oleh masyarakat.

Kebutuhan dana masyarakat dapat dipenuhi dengan meminjam dana kepada pihak kreditur seperti bank, lembaga keuangan selain bank, atau dapat pula perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk ditawarkan kepada masyarakat.

Dari aktivitas pemberian kredit, bank akan memperoleh pendapatan operasional berupa pendapatan bunga, provisi dan komisi. Memperoleh laba merupakan tujuan utama berdirinya suatu lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga keuangan yang lainnya. Karena aktifitas terbesar bank adalah pada bidang pengkreditan, maka dari

aktifitas ini akan menentukan besarnya laba yang akan diperoleh dalam suatu periode.

Pengertian Kredit

Kredit merupakan dana bank yang paling produktif dibandingkan dengan alokasi dana bank yang lain. Pengertian kredit menurut Raymond dalam (Saputro, 2014) adalah “Hak untuk menerima pembayaran pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang.”

Menurut (Iskandar, 2013) mengemukakan bahwa “Kredit merupakan piutang bagi bank, maka pelunasannya (*repayment*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga risiko kredit macet dapat dihindarkan”.

Menurut UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dalam (Abdullah, 2013) yaitu “Penyediaan uang atau tagihan dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank

membayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil.

Unsur Kredit

Sebelum pemberian kredit kepada nasabah, bank melakukan analisis kepada nasabah agar kredit yang diberikan aman. Menurut (Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, 2014) unsur-unsur dalam pemberian kredit, yaitu (1) Kepercayaan; Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. (2) Kesepakatan; Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. (3) Jangka waktu; Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. (4) Risiko; Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu pemberian kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. (5) Balas jasa; Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dengan bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah biasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Tujuan Kredit

Dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2014) tujuan pemberian kredit, yaitu:

(1) Mencari keuntungan; Tujuan utama pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga. Keuntungan ini sangat penting bagi bank karena keuntungan dapat membesarkan usaha bank dan membiayai biaya operasional bank yang juga relatif cukup besar. (2) Membantu usaha nasabah; Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. (3) Membantu pemerintah; Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat, maka semakin besar keuntungannya bagi pemerintah.

Keuntungan yang diperoleh pemerintah dari adanya pemberian kredit, yaitu:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah.
- b. Nasabah yang menerima kredit untuk membangun atau membuka usaha baru akan membutuhkan

tenaga kerja baru. Hal itu dapat membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran.

- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d. Meningkatkan devisa negara jika produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Fungsi Kredit

Disamping memiliki tujuan, pemberian kredit juga memiliki fungsi. Menurut (Saputro, 2014) fungsi kredit, yaitu:

(1) Meningkatkan daya guna barang (*Utility of goods*); Dengan adanya aliran dana atau kredit, maka perputaran barang dan jasa makin cepat dan lancar karena tersedianya dana untuk ditukar dengan barang. (2) Meningkatkan daya guna uang (*Utility of money*); Adanya perputaran uang dan perpindahan dana dari pihak yang kelebihan ke pihak yang membutuhkan, maka dana akan menjadi efektif secara fungsi untuk alat pembayaran yang lebih tinggi. (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan; Bantuan kredit mendorong pengusaha, petani, industri serta bentuk usaha lain meningkatkan produksi dengan mengaktifkan potensi ekonomi yang dimiliki secara maksimal. (4) Meningkatkan motivasi kerja; Untuk meningkatkan motivasi agar kita lebih bergairah dan semangat dalam menjalankan aktivitas salah satunya dengan mengajukan kredit. (4) Sebagai pengendali harga; Naik turunnya harga barang dan jasa salah satunya di pengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka pengendaliannya dengan pembatasan pagu kredit. (5) Sebagai salah satu stabilitas ekonomi; Untuk menutup *deficit* anggaran belanja negara serta menjaga stabilitas ekonomi yang mantap yaitu dengan hutang luar negeri.

Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang dilakukan. Menurut (Hasibuan, 2011) jenis-jenis kredit, yaitu:

1. Berdasarkan tujuan/kegunaannya; a). Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. b). Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. c). Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.

2. Berdasarkan jangka waktu; a). Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja. b). Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun. c). Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3. Berdasarkan macamnya; a). Kredit aksep, yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafon kredit (L3/BMPK)-nya. b). Kredit penjual, yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima tetapi pembayaran kemudian, misalnya *Usance L/C*. c). Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembeli dengan uang muka, misalnya *red Usance L/C*.

4. Berdasarkan sektor perekonomian; a) Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan. b). Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar. c). Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan. d). Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang. e). Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi. f). Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka ragam profesi.

5. Berdasarkan agunan/jaminan; a). Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan. b). Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga. c). Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139. d). Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit (L/C)*.

6. Berdasarkan golongan ekonomi; a). Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang memiliki kekayaan maksimum sebesar Rp. 600jt, tidak termasuk tanah dan bangunannya. b). Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

7. Berdasarkan penarikan atau pelunasan; a). Kredit rekening koran (kredit perdangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran; bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafon kredit. b). Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafonnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum pihak bank memberikan kredit kepada nasabah, bank akan melakukan penilaian sesuai standar yang dimiliki oleh masing-masing bank. Hal ini dimaksudkan agar pihak bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar kembali. Kriteria yang dilakukan pihak bank di analisis dengan 5C dan 7P. Menurut (Abdullah, 2013) analisis 5C, yaitu: 1). *Character*; Merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan *social standing*-nya. Ini semua merupakan ukuran kematian membayar. 2). *Capacity*; Untuk melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, termasuk kekuatan yang dimiliki. Kemudian akan dilihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank. 3). *Capital*; Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif yang dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini. 4). *Collateral*; Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga tidak terjadi suatu masalah. 5). *Condition*; Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut (Abdullah, 2013) analisis 7P, yaitu: 1). *Personality*; Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. 2). *Party*; Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas berbeda sesuai golongannya. 3). *Purpose*; Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 4). *Prospect*; Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi juga nasabah. 5). *Payment*; Merupakan ukuran

bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. 6). *Profitability*; Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya. 7). *Protection*; Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan.

Kualitas Kredit

Sebagai pihak yang bertindak menjadi kreditur, maka sudah sepatutnya bank memiliki kriteria dan penggolongan terhadap kualitas kredit yang diberikan oleh bank agar mempermudah proses penanganan terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin saja timbul dalam sebuah perjanjian kredit yang telah dilakukan. Adapun penggolongan kualitas kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 dalam (Hermansyah, 2014), yaitu:

1. Kredit lancar yaitu jika memenuhi kriteria:
 - a). Pembayaran angsuran pokok dan/bunga tepat; dan b). Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu jika memenuhi kriteria: a). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau b). Kadang-kadang terjadi cerukan; atau c). Mutasi rekening relatif rendah; atau d). Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau e). Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar, yaitu jika memenuhi kriteria: a). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau b). Sering terjadi cerukan; atau c). Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau d). Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau e). Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau f). Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang diragukan, yaitu jika memenuhi kriteria: a). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau b). Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau c). Terjadi wanpresyasi lebih dari 180 hari; atau d). Terjadi kapitalisasi bunga; atau e). Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit macet, yaitu jika memenuhi kriteria: a). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau b). Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau c).

Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Jaminan Kredit

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminannya biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Adapun yang dapat dijadikan jaminan kredit menurut (Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, 2014), yaitu:

1. Jaminan seperti barang-barang seperti: Tanah; Bangunan; Kendaraan bermotor; Mesin-mesin/peralatan; Barang dagangan; Tanaman, kebun, sawah; Dan barang-barang berharga lainnya.
2. Jaminan surat berharga seperti: Sertifikat saham; Sertifikat obligasi; Sertifikat tanah; Sertifikat deposito; Promes; Wesel; Dan surat berharga lainnya.
3. Jaminan orang atau perusahaan Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atas menanggung risikonya.
4. Jaminan asuransi Yaitu bank menjamin kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Pendapatan

Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan sumber penghasilan yang penting bagi kelangsungan hidup seseorang atau kelangsungan hidup suatu usaha. Menurut (Jusup, 2013) menyimpulkan bahwa "Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa (misalnya penjualan barang dagangan atau pendapatan jasa)". Menurut Kieso, Weygandt, Warfield dalam (Nurlaili, 2013) mengemukakan bahwa "*Gross inflow of economic benefits during the period arising in the ordinary activities of an entity when those inflows result in increases in equity, other than increases relating to contributions from equity participants*".

Yang artinya adalah pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan memiliki banyak nama seperti *sales, fees, interest, dividends, and royalties*.

Jenis-jenis Pendapatan

Begitu banyak jenis pendapatan yang dapat diperoleh oleh seseorang atau badan usaha. Menurut (Iskandar, 2013) jenis-jenis pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan operasional; Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha bank. Pendapatan operasional terdiri dari: a). Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan b). Pendapatan provisi dan komisi c). Dan lain-lain
2. Pendapatan operasional lainnya; Pendapatan operasional lainnya yaitu pendapatan operasional selain bunga adalah semua pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank diluar bunga. Pendapatan operasional lainnya terdiri dari: a). POL efek-efek diperdagangkan b). POL laba penjualan surat berharga c). Pendapatan denda kredit yang diberikan d). Dan lain-lain

3. Pendapatan non operasional; Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh diluar kegiatan pokok operasional bank. Pendapatan non operasional lainnya terdiri dari: a). Hasil sewa SDB b). Hasil sewa gedung c). Penjualan asset tetap/inventaris d). Selisih kurs penjabaran e). Pendapatan bunga tagihan akseptasi

Konsep Dasar Perhitungan

Uji Koefisien Korelasi

Untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti konsep dasar perhitungan yang digunakan adalah uji koefisien korelasi. Menurut (Umar, 2011) uji koefisien korelasi adalah “Analisis korelasi berguna untuk menentukan sesuatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain.”

Menurut (Sigit, 2010) menyimpulkan bahwa “Analisis korelasi berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain.”

Menurut (Sugiarto, 2015) mengemukakan bahwa “Analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam bentuk persamaan. Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan (derajat) hubungan linier antara dua variabel.”

Menurut (Sugiyono, 2009) mengemukakan bahwa “Uji yang akan memberi gambaran untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel X dan Y.”

Menurut (Umar, 2011) rumus uji koefisien korelasi (r), yaitu:

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana:

r = Koefisien korelasi

X = Volume Pemberian kredit

Y = Pertumbuhan pendapatan bank

n = Jumlah periode yang digunakan

Nilai korelasi berkisar antara -1 dan 1, dengan kriteria sebagai berikut:

r = 0 maka kedua variabel tidak berkorelasi linier.

r = -1 kedua variabel berhubungan negatif sempurna.

r = 1 kedua variabel berhubungan positif sempurna.

Uji koefisien korelasi bertujuan untuk mencari kuat atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan akurasi kekuatan korelasi atau hubungan variabel X dan variabel Y.

Tabel 1. Tabel Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,200 - 0,399	Rendah
0,400 - 0,599	Sedang
0,600 - 0,799	Kuat
0,800 - 1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2009:257)

Uji Koefisien Determinasi

Selain menggunakan uji koefisien korelasi, penulis juga menggunakan uji koefisien determinasi. Menurut (Sigit, 2010) mengemukakan bahwa “Apabila r adalah koefisien korelasi yang menyatakan hubungan antara variabel X dan Y maka perubahan korelasi sebesar 100%, r² persen perubahan daripada variabel Y disebabkan oleh variabel X (disebut koefisien determinasi).”

Menurut (Riana, 2012) yaitu: Alat untuk mengukur tingkat kecocokan/kesempurnaan model regresi disebut koefisien determinasi (r²) misal r² = 0,90 artinya nilai duga regresi yang kita peroleh memenuhi model yang kita kehendaki atau 90% (Sembilan puluh persen) nilai-nilai Y besarnya ditentukan oleh nilai-nilai variabel X yang dimasukkan dalam model, lain di luar model, sedangkan 10% lagi ditentukan oleh variabel.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = (r)^2 \times 100\%$$

Dimana: KD = Koefisien determinasi r = Koefisien korelasi

Uji Persamaan Regresi

Selain menggunakan uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, penulis juga menggunakan uji persamaan regresi. Menurut (Sugiarto, 2015) mengemukakan bahwa “Analisis regresi adalah suatu tehnik statistic yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel, sedangkan analisis korelasi adalah suatu

teknik statistic yang berguna untuk mengetahui keamatan hubungan variabel-variabel yang menjadi perhatian.”

Menurut (Sugiyono, 2009) menyimpulkan bahwa “Persamaan regresi digunakan untuk memberikan gambaran seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah atau dinaik turunkan.”

Menurut (Santoso, 2015) mengemukakan bahwa “Uji regresi digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen (Y) berdasar satu variabel independen (X) dalam suatu persamaan linear.”

Menurut (Riana, 2012) rumus uji persamaan regresi, yaitu:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana:

\hat{Y} = Nilai-nilai taksiran untuk variabel tak bebas (Y)

a = Nilai-nilai variabel bebas

b = Intersip (pintasan) bilamana X= 0

X = Koefisien arah atau slope dari garis regresi

Dan rumus untuk menghitung nilai a dan b, yaitu:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Dalam hal ini a dan b merupakan koefisien korelasi. Hipotesis penelitian ini dapat dilihat melalui nilai koefisien b, yaitu: 1) Jika koefisien b bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y. 2). Jika koefisien b bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh negatif terhadap variabel Y.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah teknik analisa deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan analisa regresi linear sederhana. Hipotesa dalam penelitian ini terdiri dari Ha 1: Ada hubungan antara pemberian kredit terhadap pendapatan bunga bersih pada PT Bank DKI. Ha 2: Ada pengaruh antara pemberian kredit terhadap pendapatan bunga bersih pada PT Bank DKI. Ha 3: Persamaan regresi yang terbentuk antara pemberian kredit terhadap pendapatan bunga bersih pada PT Bank DKI adalah signifikan. Sampel perusahaan yang penulis ambil adalah perusahaan PT. Bank DKI

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Koefisien Korelasi

Hipotesis:

Ho= Tidak ada hubungan antara pemberian kredit dan pendapatan bunga bersih

Ha = Ada hubungan antara pemberian kredit dan pendapatan bunga bersih

Tabel 2. Uji Koefisien Korelasi

Correlations			
		Pemberian Kredit	Pendapatan Bunga Bersih
Pemberian Kredit	Pearson Correlation	1	.980**
	Sig. (2-tailed)		0
	N	11	11
Pendapatan Bunga Bersih	Pearson Correlation	.980**	1
	Sig. (2-tailed)	0	
	N	11	11

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Dioah Penulis 2017

Berdasarkan Tabel Korelasi di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, maka Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian kredit terhadap pendapatan bunga bersih.

Hubungan antara pemberian kredit terhadap pendapatan bunga bersih dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,980, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit mempunyai hubungan yang kuat dan searah terhadap pendapatan bunga bersih.

Kesimpulan: Hubungan korelasi antara pemberian kredit dan pendapatan bunga bersih signifikan, kuat, dan searah.

Uji Koefisien Determinasi

Hipotesis:

Ho= Tidak ada pengaruh antara pemberian kredit dan pendapatan bunga bersih

Ha = Ada pengaruh antara pemberian kredit dan pendapatan bunga bersih

Tabel 3. Uji Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.980 ^a	0,6673611	0,66388889	0,11099	0,6673611	220,199	1	9	0

a. Predictors: (Constant), Pemberian Kredit

Sumber: Data Olahan Penulis 2017

Berdasarkan Tabel *Summary* di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, maka Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian kredit terhadap pendapatan bunga bersih.

Pengaruh antara pemberian kredit terhadap pendapatan bunga dapat dilihat pada nilai *R Square*, yaitu sebesar 0,961 atau 96,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan bunga bersih dipengaruhi oleh pemberian kredit sebesar 96,1% dan sisanya sebesar 3,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Persamaan Regresi

Hipotesis:

Ho = Persamaan regresi yang terbentuk antara pemberian kredit dan pendapatan bunga bersih tidak signifikan.

Ha = Persamaan regresi yang terbentuk antara pemberian kredit dan pendapatan bunga bersih signifikan.

Tabel 4. Uji Determinasi Model Anova

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.713	1	2.713	220.199	.000 ^b
Residual	.111	9	.012		
Total	2.823	10			

a. Predictors: (Constant), Pemberian Kredit

b. Dependent Variable: Pendapatan Bunga Bersih

Berdasarkan Tabel Anova di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, maka Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk antara pemberian kredit terhadap pendapatan bunga bersih signifikan.

Persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat pada tabel koefisien di bawah ini:

Tabel 5. Tabel Koefisien Uji Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.131	1.378		5.175	.001
Pemberian Kredit	.685	.046	.980	14.839	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Bunga Bersih

Sumber: Data olahan Penulis 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut: $\hat{Y} = a + bX$, $\hat{Y} = 7,131 + 0,685X$

Kesimpulannya adalah persamaan regresi signifikan, sehingga persamaan yang dapat dibentuk $\hat{Y} = 7,131 + 0,685X$, dimana X adalah pemberian kredit dan \hat{Y} adalah pendapatan bunga bersih.

Berdasarkan persamaan regresi $\hat{Y} = 7,131 + 0,685X$, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 7,131 menyatakan bahwa jika ada pemberian kredit oleh perusahaan maka pendapatan bunga bersih sebesar 0,685 satuan,
2. Koefisien regresi X sebesar 0,685 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan pemberian kredit maka akan meningkatkan pendapatan bunga bersih sebesar 0,685 satuan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menganalisis pemberian kredit terhadap pendapatan bunga bersih pada PT Bank DKI, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan korelasi antara pemberian kredit dan pendapatan bunga bersih signifikan karena nilai Sig.

sebesar $0,000 < 0,05$, maka Ha diterima dan pemberian kredit mempunyai hubungan yang kuat dan searah terhadap pendapatan bunga bersih karena nilai koefisien korelasi yang terbentuk sebesar 0,980.

2. Pengaruh antara pemberian kredit dan pendapatan bunga bersih signifikan karena nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, maka Ha diterima dan pendapatan bunga bersih dipengaruhi oleh pemberian kredit sebesar 96,1% dan sisanya sebesar 3,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Persamaan regresi yang terbentuk antara pemberian kredit terhadap pendapatan bunga bersih signifikan karena nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, maka Ha diterima, dan persamaan yang terbentuk yaitu $\hat{Y} = 7,131 + 0,685X$.

REFERENSI

- Abdullah, T. d. (2013). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. (2011). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iskandar, S. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: In Media.
- Jusup, A. H. (2013). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurlaili. (2013). *Prosedur Pemberian Kredit Mikro pada Palaku Usaha Kecil Menengah terhadap Peningkatan Pendapatan Bank XYZ*. Jakarta: Skripsi.
- Riana, D. (2012). *Statistika Deskriptif Itu Mudah*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Santoso, S. (2015). *Menguasai Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saputro, S. D. (2014). *Banking and Non Banking Practice*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Sigit, C. (2010). *Seri Belajar Kilat SPSS 18*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiarto. (2015). *Metode Statistika Bisnis*. Tangerang: PT Mantana Publising Utama.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Financial Leverage, Operating Leverage dan Stock Return

As'ad Syaifullah

Universitas Airlangga
asad_bolo@yahoo.com

Abstract - Competition in the manufacturing industry requires companies to be more competitive in order not to get caught in the slump of competition. In this case the company requires a large cost in order to stay awake in improving company performance. The financial problem faced by the company is the problem of corporate financing. The way to finance a company's funding needs is from external sources of funds such as loan capital. Companies using loan capital mean the company has leveraged. The more use of loan capital poses a risk to the company, as investors in determining investment decisions often see the capital structure within the company. When companies do a lot of production using debt, investors tend to shift to other sectors or negotiate to management to provide big rewards. This study aimed to examine the effect of financial leverage and operating leverage on stock return. The population of this study were 135 industrial manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a sample of 11 companies during the years 2011-2015. This study used purposive sampling method. The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis. The results of this study concluded that concludes that the financial leverage and operating leverage no significant effect on stock return. While partially operating leverage effect on stock return, but no effect of financial leverage on stock return.

Key word: Stock returns, financial leverage and operating leverage.

I. PENDAHULUAN

Persaingan industri manufaktur di Indonesia semakin ketat. Di Indonesia perkembangan perusahaan manufaktur cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode ke periodenya semakin bertambah, dari jumlah emiten yang terdaftar di BEI sebanyak 480 emiten sebanyak 135 emiten yang termasuk perusahaan manufaktur, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga prospeknya akan menguntungkan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Selain itu dapat dikatakan bahwa persaingan industri manufaktur menjadi semakin ketat karena banyaknya produk impor yang dengan mudahnya masuk ke pasar Indonesia dan menjadi alternatif pilihan para konsumen di Indonesia serta semakin maraknya produk-produk ilegal yang menjadi hambatan bagi perusahaan di industri manufaktur untuk menguasai pasar.

Meningkatnya persaingan saat ini menuntut setiap perusahaan untuk mampu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dan menuntut setiap perusahaan untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan sehingga dapat lebih unggul dalam persaingan yang dihadapi. Pada dasarnya perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya, apapun bentuk bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut dalam setiap kegiatan operasionalnya selalu memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki secara optimal untuk memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan menjaga kelangsungan hidup

usahanya dengan cara meningkatkan nilai perusahaan.

Persaingan industri manufaktur menuntut perusahaan untuk dapat lebih berkompetisi agar tidak terjebak dalam kemerosotan persaingan tersebut. Dalam hal ini perusahaan membutuhkan biaya yang besar agar tetap terjaga dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga harus mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. Kebijakan manajemen merupakan salah satu hal yang dapat memengaruhi perusahaan untuk dapat bersaing. Salah satu fungsi manajemen adalah dalam hal pendanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Kebijaksanaan manajemen mengenai pengelolaan keuangan salah satunya adalah mengenai struktur modal perusahaan.

Permasalahan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan adalah masalah pembiayaan perusahaan. Cara untuk membiayai kebutuhan dana suatu perusahaan adalah berasal dari sumber dana eksternal seperti modal pinjaman. Perusahaan menggunakan modal pinjaman berarti perusahaan telah melakukan *leverage*. Semakin banyak penggunaan modal pinjaman menimbulkan risiko bagi perusahaan, karena investor dalam menentukan keputusan berinvestasi sering melihat struktur modal dalam perusahaan. Ketika perusahaan banyak melakukan produksi dengan menggunakan utang maka biasanya investor mengalihkan ke sektor lain.

Riyanto (2001) menyatakan bahwa pemenuhan dana tersebut berasal dari intern (*internal source*) maupun ekstern (*external source*). Dana yang berasal dari sumber internal adalah dana yang terbentuk atau dihasilkan oleh perusahaan sendiri yaitu laba ditahan (*retained earnings*) dan depresiasi (*depreciations*). Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari kreditur, pemilik dan pengambil bagian dalam perusahaan. Modal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan yang sering disebut sebagai modal asing. Oleh karena itu, setiap manajer keuangan perlu menentukan keputusan struktur modal yaitu berkaitan dengan penetapan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri atau modal asing.

Sumber dana yang diperoleh memiliki beban tetap dan dana tersebut dipergunakan perusahaan dengan harapan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham. Keadaan tersebut menjelaskan perubahan *stock return* sebagai akibat dari perubahan keuntungan perusahaan. *Leverage* juga dapat meningkatkan variabilitas keuntungan karena jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Konsep *leverage* sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analisis keuangan dalam melihat *trade off* antara risiko dan keuntungan (Sartono, 2008).

Konsep *operating leverage* dan *financial leverage* bermanfaat untuk analisis, perencanaan dan pengendalian keuangan. Dalam manajemen keuangan, *leverage* adalah penggunaan *asset* dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Jika semua biaya bersifat variabel, maka akan memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menghasilkan laba. Tapi karena sebagai biaya perusahaan bersifat tetap, maka untuk menghasilkan laba diperlukan tingkat penjualan minimum tertentu.

Perusahaan menggunakan *operating leverage* dan *financial leverage* dengan tujuan uang diperoleh lebih besar daripada biaya *asset* dan sumber dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya *leverage* juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuntungan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham.

Rasio *Financial leverage* dan *Operating Leverage* terjadi akibat penggunaan sumber dana yang berasal dari utang, sehingga menyebabkan perusahaan harus menanggung utang serta dibebani oleh biaya

bunganya. Rasio *leverage* merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh *asset* perusahaan dibiayai dengan utang. Hal tersebut akan memengaruhi keputusan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, semakin rendah rasio *leverage* maka perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus, oleh karena itu permintaan akan saham tersebut akan meningkat sehingga akan meningkatkan harga saham tersebut. Begitu sebaliknya ketika rasio *leverage* perusahaan tinggi maka perusahaan itu kinerjanya kurang bagus sehingga akan menurunkan permintaan terhadap saham perusahaan sehingga harga saham akan cenderung turun.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *leverage* terhadap *stock return* memberikan hasil yang kontradiktif. Seperti penelitian yg dilakukan oleh Ozdagli (2009) menyatakan bahwa *financial leverage* berpengaruh terhadap *stock return*. Dimitrov dan Jain (2007) menyatakan bahwa *financial leverage* berpengaruh terhadap *return* saham dan *operating performace* karena semakin tinggi rasio *leverage* akan memengaruhi volume penjualan sehingga dengan tinggi volume penjualan akan juga memengaruhi laba yang diperoleh, hal ini investor akan semakin termotivasi untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, dengan banyak permintaan saham tersebut maka akan menaikkan harga saham.

Tabari (2010) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *stock return*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Medeiros (2005) menyatakan bahwa *operating leverage* tidak memberikan kontribusi terhadap *return* saham karena perusahaan-perusahaan yang diteliti bukanlah perusahaan-perusahaan yang modalnya sangat tinggi dan memiliki tenaga kerja uang sedikit.

Sambora (2013) menyatakan bahwa *leverage* dan profibilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2011-2015 menyatakan bahwa secara parsial *leverage* tidak signifikan berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan secara simultan *leverage* mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap harga saham.

Hasil beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian, karena alasan tersebut maka dilakukan penelitian tentang pengaruh *operating leverage* dan *financial leverage* terhadap *stock return* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh *Operating Leverage* dan *Fiancial Leveragesecara* simultan terhadap *Stock Return* di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. (2) Untuk mengetahui pengaruh *Operating Leverage* dan *Fiancial Leveragesecara* parsial terhadap *Stock Return* di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

Signaling Theory

Teori sinyal merupakan dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dorongan ini disebabkan karena terjadi asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri hendaknya perusahaan mengungkapkan informasi yang dimiliki oleh perusahaan, informasi keuangan maupun non keuangan. Jika informasi laba tersebut relevan bagi para pelaku pasar modal, maka informasi tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan nilai saham perusahaan.

Menurut Jogyanto (2000) informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Sumber Dana

Menurut Martono dan Harjito (2008) “berdasarkan sumbernya, dana berasal dari sumber internal (*internal financing*) dan sumber eksternal (*external financing*)”. Sumber pendanaan dari dalam perusahaan atau sering disebut dengan modal sendiri merupakan modal yang akan terus tertanam di dalam perusahaan selama masa operasi perusahaan. Sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan dapat berupa laba yang tidak dibagikan dan digunakan kembali menjadi modal serta penarikan modal melalui penjualan saham kepada investor. Sedangkan sumber pendanaan dari luar perusahaan atau sering disebut dengan modal asing adalah modal yang hanya bekerja sementara di dalam perusahaan dan merupakan beban bagi perusahaan karena harus mengembalikan nominal nilai utang tersebut beserta bunganya. Dana dari luar perusahaan bisa didapatkan dengan meminjam dana dari pihak kreditur seperti bank dan lembaga keuangan bukan bank atau dengan menerbitkan obligasi.

Operating Leverage

Menurut Brigham dan Houtson (2001) *operating leverage* adalah seberapa besar biaya tetap digunakan dalam operasi suatu perusahaan. Irawati (2006:173) menyatakan bahwa *leverage* operasi merupakan penggunaan aktiva dengan biaya tetap yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel serta dapat meningkatkan profibilitas. Hanafi (2004) menyatakan bahwa *Operating Leverage* diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional.

Leverage operasi juga dapat memperlihatkan pengaruh pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi perusahaan. Mengetahui tingkat

leverage operasi, maka manajemen bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat adanya perubahan penjualan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *leverage* operasi berkaitan dengan penjualan perusahaan dan laba sebelum bunga dan pajak. Ukuran *leverage* operasi adalah tingkat *leverage* operasi yang disebut dengan *Degree of Operating Leverage* (DOL).

Martono dan Hartijo (2008) mendefinisikan tingkat *leverage* operasi atau *degree of operating leverage* (DOL) adalah persentase perubahan dalam laba operasi (EBIT) yang disebabkan perubahan satu persen dalam output (penjualan). Artinya jika hasil *Degree of Operating Leverage* (DOL) adalah 2 maka bila penjualan naik atau turun 10% keuntungan bisa diprediksikan akan naik atau turun sebesar 2 kali kenaikan atau penurunan penjualan.

Analisis *operating leverage* digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan penjualan terhadap EBIT. *Operating leverage* ini dimungkinkan karena terdapatnya biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan. Apabila tingkat *leverage* perusahaan semakin besar, maka semakin besar fluktuasi naik turunya laba operasi terhadap perubahan volume penjualan. Maka semakin tinggi *operating leverage* perusahaan, maka semakin tinggi pula sensitivitas EBIT terhadap tingkat penjualan. Sebuah perusahaan dengan *operating leverage* yang rendah, lebih sanggup menghadapi risiko atas penggunaan hutang. Hal tersebut dikarenakan tingkat *operating leverage* yang rendah, menunjukkan adanya kestabilan yang lebih baik pada pendapatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan dianggap lebih mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul akibat penggunaan hutang dalam sumber pembiayaannya, begitu juga sebaliknya.

Finacial Leverage

Menurut Sartono (2008) *financial leverage* adalah “Penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.” Martono dan Harjito (2008) mengemukakan bahwa “*Leverage* keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham (*earning per share*).”

Financial leverage terjadi akibat penggunaan sumber dana yang berasal dari utang, sehingga menyebabkan perusahaan harus menanggung utang serta dibebani oleh biaya bunganya. Rasio *leverage* merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Husnan dan Pudjiastuti, 2006). Apabila perusahaan menggunakan utang semakin

banyak, maka semakin besar beban tetap yang berupa bunga dan angsuran pokok pinjaman yang harus dibayar.

Earning Per Share

Menurut Darmadji dan Hendy (2001) pengertian laba per lembar saham atau EPS yaitu merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (laba) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan, karena itu para pemodal seringkali memusatkan perhatian pada besarnya *earning per share* (EPS) dalam melakukan analisis saham. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham.

Untuk menganalisis penyebab perubahan EPS dapat digunakan analisis rasio laba (Fabozzi, 1999). Rasio laba menunjukkan dampak gabungan dari likuiditas serta manajemen aktiva dan kewajiban terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba.

Stock Return

Tujuan Corporate finance adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan ini menimbulkan konflik potensial antara pemilik perusahaan dengan kreditur. Ketika perusahaan mendapatkan keuntungan laba yang besar, nilai pasar saham (dana pemilik) akan meningkat pesat, sementara nilai hutang perusahaan (dana kreditur) tidak berpengaruh. Indikasi nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk mengukur efektifitas perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan juga berarti memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Pradhono, 2004).

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi di pasar modal. *Return* sendiri dapat berupa *return* realisasi (*actual return*) dan *return* ekspektasi (*expected return*). *Return* realisasi merupakan *return* yang telah terjadi dan dapat dihitung dengan data historis (Halim, 2005). *Return* ini penting karena disamping merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan juga digunakan sebagai dasar dalam penentuan *return* ekspektasi dan resiko di masa yang akan datang. Sedangkan *return* ekspektasi adalah *return* yang diharapkan nantinya akan diperoleh investor dari investasinya di pasar modal.

Menurut Tandelilin (2007) tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan *return*, tanpa melupakan faktor resiko investasi yang harus dihadapinya. *Return* merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan tas keputusan investor dalam menanggung resiko investasi yang dilakukan. Sumber-sumber *return* investasi terdiri dari dua komponen utama, antara lain: *Dividen* dan *Capital Gain (Loss)*.

Leverage dan Stock Return

Menurut Syamsudin (2007) *operating leverage* adalah sebagai kemampuan perusahaan di dalam menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh dari volume penjualan terhadap *earning before interest and tax* (EBIT).

Nilai DOL yang merupakan hasil dari perhitungan *Operating Leverage* meningkat, hal tersebut berarti bahwa tingkat DOL perusahaan semakin besar, maka semakin besar fluktuatifnya naik turunnya laba operasi terhadap perubahan volume penjualan. Semakin tinggi *operating leverage* perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat penjualan. Pertumbuhan penjualan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya banyak permintaan saham perusahaan ini harga saham akan naik, sehingga akan meningkatkan *return* saham bagi pemegang saham perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak didukung oleh Medeiros (2005) mengenai pengaruh *Operating leverage* terhadap *return* saham pada pasar bursa di Brazil menyatakan bahwa *operating leverage* tidak memberikan kontribusi terhadap *return* saham.

Menurut Warsono (2001) *Financial Leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan potensial biaya-biaya keuangan tetap untuk meningkatkan pengaruh perubahan dalam laba sebelum bunga dan pajak EBIT terhadap EPS. Sehingga akan mempengaruhi permintaan terhadap saham perusahaan oleh investor sehingga harga saham perusahaan akan juga meningkat, hal ini akan menguntungkan bagi para pemegang saham perusahaan.

DFL yang merupakan hasil dari perhitungan analisis *Financial Leverage* meningkat, hal tersebut bahwa DFL, tersebut mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk menghasilkan EPS yang tinggi pula. Dan bila EPS naik, maka akan juga meningkatkan laba yang tersedia untuk pemegang saham. Demikian juga sebaliknya, jika DFL menurun daya ungkit untuk menghasilkan EPS juga akan turun. Hal tersebut juga berarti laba yang tersedia untuk para pemegang saham mengalami penurunan.

Jika EPS untuk para pemegang saham meningkat, selain untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham lama, juga akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi akan keberhasilan perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut dan juga dapat menarik investor baru untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Pada dasarnya perusahaan untuk melaksanakan kegiatannya memerlukan dana untuk membiayai operasinya. Pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan biasanya berasal dari modal perusahaan sendiri (*equity*) maupun diperoleh dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka

panjang, besar kecilnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang merupakan cerminan tingkat *leverage* keuangan (*financial leverage*) dari suatu perusahaan, dan tingkat *leverage* ini nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya *Earning Per Share* (EPS) yang akan diterima oleh setiap lembar sahamnya, sehingga dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tiap lembar sahamnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh Dimitrov and Jain (2007) meneliti mengenai *The Value Relevance of Changes in Financial Leverage* menyatakan bahwa *financial leverage* berpengaruh terhadap *return* saham dan *operating performance*.

Hipotesis

Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Operating Leverage* dan *Financial Leverage* secara simultan dan secara parsial terhadap *Stock Return*.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan terikat. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang listing di BEI periode waktu tahun 2011-2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor manufaktur yang listing di BEI jumlah populasi penelitian ini sebanyak 135 perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Populasi diseleksi untuk mendapatkan sampel yang sesuai. Dari 135 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang masuk populasi, 121 perusahaan manufaktur dikeluarkan dari sampel karena perusahaan tersebut belum pernah masuk LQ45. Setelah diseleksi, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 11 perusahaan manufaktur yang masuk LQ45.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *stock return*. Di lain sisi, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu *Operating Leverage* dan *Financial Leverage*.

Warsono (2003) *Operating Leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan potensial biaya-biaya operasi untuk memperbesar pengaruh perubahan dalam penjualan terhadap laba sebelum bunga dan pajak perusahaan. Berikut ini akan

dijabarkan perhitungan *degree of operating leverage* menurut Sutrisno (2008:214), yaitu:

$$DOL = \frac{\% \text{ perubahan dalam EBIT}}{\% \text{ perubahan dalam sales}}$$

Sartono (2008) *financial leverage* adalah: "Penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham". Martono dan Harjito (2008) mengemukakan bahwa, "*Leverage* keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham (*earning per share*, EPS)".

Berikut ini akan dijabarkan perhitungan *degree of financial leverage* yaitu:

$$DFL = \frac{\% \text{ perubahan dalam EPS}}{\% \text{ perubahan dalam EBIT}}$$

Dimana:

% Δ EPS = persentase perubahan laba per lembar saham

% Δ EBIT = persentase perubahan laba sebelum bunga dan

pajak

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis digunakan regresi linear ganda. Tahap-tahap analisis data antara lain melakukan pengukuran variabel-variabel yang akan dianalisis, melakukan empat uji asumsi klasik (normalitas, uji multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas). Tahap penelitian selanjutnya melakukan analisis regresi linear berganda, menentukan koefisien determinasi (R²) dan pembuktian hipotesis (uji F dan uji t dengan level signifikansi (α) = 5%).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur yang listing di BEI periode waktu 2011-2015. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan *purpose sampling* yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu dalam melakukan pemilihan sampel. Kriteria sampel yang telah ditentukan, maka perusahaan sektor manufaktur yang memenuhi kriteria sampel berjumlah 11 perusahaan.

Pengujian Normalitas menggunakan uji *kolmogorov-smirnov test* dengan ketentuan nilai probabilitas yang ditunjukkan melalui nilai *Asym. Sig (2tailed)* sama dengan atau lebih dari 0,05 nilai *Asym. Sig (2tailed)* ini lebih dari maka data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya, pengujian multikolinearitas menghasilkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) masing-masing < 10 pada variabel *Operating Leverage* dan *Financial Leverage*. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Pada uji

autokorelasi menunjukkan angka 1.898 berada pada area bebas autokorelasi. Oleh karena itu data tersebut berdistribusi normal. Pengujian terakhir yaitu pengujian heteroskedastisitas. Metode uji ini menggunakan korelasi Spearman's rho yaitu mengorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual*. Nilai signifikansi variabel independen lebih dari 0.05, sehingga tidak terjadi masalah heteskedastisitas pada model regresi.

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.161 + 0.003X_1 + 0.002X_2 + \varepsilon$$

Nilai konstanta berdasarkan hasil regresi adalah sebesar 0.161, ini menunjukkan bahwa jika variabel independen *operating leverage* dan *financial leverage* dianggap konstan. Maka *stock return* yang diprosikan dengan *capital gain/loss* dapat bernilai 0.161. Variabel *operating leverage* berpengaruh terhadap *stock return* dengan koefisien regresi sebesar 0.003 yang berarti, bahwa setiap peningkatan 1 satuan *operating leverage* akan meningkatkan *stock return* sebesar 0.003(0.03%) dengan asumsi variabel lain konstan. Variabel *financial leverage* tidak berpengaruh terhadap *stock return*, dengan koefisien 0.001 dan nilai signifikansi sebesar 0.575.

Penilaian hasil analisis regresi linear berganda menggunakan uji F dan uji t. Hasil uji F dan uji t menunjukkan nilai sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized coefficients		Nilai sig. F	Nilai t	Sig t
	B	Standard Error			
Regression			2.751		0.760
Constant	.161	.055		2.914	.006
DOL	.003	.001		2.256	.030
DFL	.002	.003		.566	.575

Sumber: diolah penulis (2015).

Nilai F adalah 2.751 dengan nilai signifikansi 0,76. Nilai signifikansi 0,76 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu DOL dan DFL tidak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *stock return*. Terbukti bahwa variabel DOL berpengaruh terhadap *stock return*. Variabel DFL tidak berpengaruh terhadap *stock return*. Terbukti bahwa variabel DOL berpengaruh terhadap EPS. Variabel DFL tidak berpengaruh terhadap *stock return*. Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing variabel:

H_0 = DOL berpengaruh terhadap *stock return*

Variabel DOL diketahui bahwa nilai t hitung adalah 2.914 dengan nilai signifikan 0,030. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikan yang kurang dari nilai 0,05, berarti DOL berpengaruh terhadap *stock return*. Hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yang berarti variabel DOL berpengaruh terhadap *stock return*.

H_1 = DFL berpengaruh terhadap *stock return*

Variabel DFL diketahui bahwa nilai t adalah 0.566 dengan nilai signifikansi sebesar 0.575. Nilai signifikansi 0,575 lebih besar dari nilai 0,05, berarti DFL tidak berpengaruh terhadap *stock return*. Maka dapat disimpulkan pada hasil regresi tersebut bahwa H_1 ditolak, yang berarti DFL tidak berpengaruh terhadap *stock return*.

Financial Leverage dan Operating Leverage Terhadap Stock Return

Analisis data yang telah dilakukan menunjukkan hasil penelitian yang menjawab hipotesis. Pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

Hasil penelitian secara simultan membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap *stock return*. Uji F yang mempunyai nilai 2.751 dengan nilai signifikansi 0.076. Nilai signifikansi 0.076 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu DOL dan DFL tidak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *stock return*.

Analisa data dan pengaruh hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa DOL dan DFL tidak berpengaruh terhadap *stock return*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan tingkat *leverage* perusahaan semakin besar, maka semakin besar fluktuatif naik turunnya laba operasi terhadap perubahan volume penjualan. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi pula sensitifitas EBIT terhadap tingkat penjualan.

Semakin tinggi struktur *leverage* perusahaan, semakin besar keuntungan yang akan diperoleh, dan semakin besar pula tingkat risiko yang dihadapi investor nantinya. Atas dasar analisis informasi inilah investor dapat mengetahui bahwa suatu perusahaan mempunyai nilai perusahaan yang tinggi dengan semakin tingginya harga saham perusahaan tersebut di pasar modal. *Financial leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memperoleh tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. *Financial leverage* dengan demikian menunjukkan perubahan *return* saham sebagai akibat dari perubahan laba perusahaan dan kemudian akan menaikkan permintaan

terhadap saham perusahaan sehingga akan menaikkan harga saham.

Hasil ini sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Medeiros (2005) menyatakan bahwa *operating leverage* tidak memberikan kontribusi terhadap *return* saham karena perusahaan-perusahaan yang diteliti bukanlah perusahaan-perusahaan yang modalnya sangat tinggi dan memiliki tenaga kerja yang sedikit.

Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh terhadap *stock return*.

Pengaruh *Operating Leverage* terhadap *Stock Return*

Analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa *operating leverage* berpengaruh terhadap *stock return*. *Operating leverage* berpengaruh terhadap *stock return* karena perusahaan yang menggunkan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan leverage yang menguntungkan atau efek yang positif pendapatan yang diterima dari penggunaan dana yang bersangkutan. Sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Tabari (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *stock return*.

Pengaruh *Financial Leverage* terhadap *Stock Return*

Analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa *financial leverage* tidak berpengaruh terhadap *stock return*. Tidak berpengaruhnya *financial leverage* terhadap *stock return* dikarenakan investor DFL yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penggunaan hutang dalam modal perusahaan sangat fluktuatif, *Financial leverage* yang terlalu tinggi juga tidak memberikan dampak yang cukup baik bagi tingkat keuntungan yang diperoleh investor dikarenakan adanya kemungkinan perusahaan mengalami gagal bayar atas utang-utangnya. Sehingga hal tersebut cenderung dipandang oleh investor sebagai suatu risiko yang dapat mengancam investasinya. Sehingga investor cenderung akan mengalihkan ke sektor yang lain, hal ini akan menurunkan permintaan saham teradap perusahaan tersebut, sehingga harga saham akan cenderung turun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Korteweg (2004) yang menyatakan bahwa *Financial leverage* berpengaruh terhadap *stock return*.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pengaruh *operating leverage* dan

financial leverage terhadap *stock return* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan 11 perusahaan dalam industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Secara simultan *operating leverage* dan *financial leverage* tidak berpengaruh pada *stock return* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Hal ini karena *leverage* yang terlalu tinggi tidak memberikan dampak yang cukup baik bagi tingkat keuntungan yang diperoleh investor dikarenakan adanya kemungkinan perusahaan mengalami gagal bayar atas utang-utangnya. Sehingga hal tersebut cenderung dipandang oleh investor sebagai suatu risiko yang dapat mengancam investasinya. Secara parsial *operating leverage* berpengaruh terhadap *stock return*. Sedangkan *financial leverage* tidak berpengaruh pada *stock return*. Perusahaan yang memiliki *operating leverage* tinggi akan dipertahankan oleh investor sehingga laba tetap bisa tumbuh.

REFERENSI

- Al-Sakran, SA. 2001. "Leverage Determinants in the Absence of Corporate Tax System: The Case of Non-Financial Publicly Traded Corporations in Saudi Arabia". *Accounting journal*. Vol 9. No 1, hal 57-69.
- Bambang, Sudiyatno. 2010. "Pengaruh Kebijakan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Perusahaan Sebagai Variabel Intervening. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*". *Jurnal Managemen*, Vol 2. No 1, hal 19-21.
- Brealey, R.A. dan Stewart, C.M. 2006. *Corporate Finance*, New York:Mc. Graw Hill
- Brigham, Eugene F. dan Houtson, Joel F. 2006 *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi kesepuluh. Buku Satu. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Darmadji, T dan Fakhruddin, H.M. 2006. *Pasar Modal Di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Erlangga Empat
- Firani, Mira 2007. " Analisis Pengaruh *Financial Leverage* Terhadap pada Emiten *Earning Per Share* Sektor Infrastruktur di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Ekonomi*. Vol 15. No 2, hal 23-25.
- Fitru, VN. 2010. "Pengaruh *financial leverage* dan *total asset turnover* terhadap *earning per share* pada bank yang listing di BEI periode 2006-2009". Indonesia. *Jurnal keuangan*. Vol 6. No 6, hal 12-15.

- Halim, Abdul. 2007. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Malang: Ghalia Indonesia
- Horne, James C. 2002. *Financial Managemen and Policy*. Edisi Keduabelas. New Jersey: Prentice Hall
- Horne, James C. Van and John, M. Wachowiecz. 2005. *Fundamental of Financial Management*, Jakarta: Salemba Empat
- Ismanu, S. 2008. “ Analisis *Leverage* dan Pengaruh *Leverage* Terhadap EPS Pada Perusahaan Go Publik Di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, Vol 16. No 1, hal 57-69.
- Jones, Charles P. 2004. *Investment Analisis and Management*. Edisi Kesembilan. Danvers: WILEY
- Malhotra, Naresh. 2009. *Riset Pemasaran Pendekatan Terapan*. Jakarta: PT. Indeks
- Martono dan Harjito. 2008. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BEPF
- Medeiros, dkk. 2005. “*The Impact of the Degree of Operating Leverage on Stock Returns: An Empirical Study in the Brazilian Market*”. *Management Journal*. Vol 4. No 5, hal 15-18.
- Korteweg, A. 2004. “*Financial Leverage and Expected Stock Returns: Evidence from Pure Exchange Offers*”. *Management Journal*. Vol 4. No 1, hal 18-22.
- Ozgali, Ali. 2009. “*Financial Leverage, Corporate Investment, and Stock Return*”. *Federal Reserve Bank of Boston, Management Journal*. Vol 4. No 1, hal 18-22.
- Riyanto, Bambang. 2008. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: Gadjah Madah
- Robert , dkk. 2011. “*The operating leverage impact on systematic risk within a context of choice An analysis of the US trucking industry*”. *Accounting Journal*. Vol 2. No 3, hal 12-15.
- Sawir, Agnes. 2004. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta
- Tandelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I. Yogyakarta: BPFE
- Tabari, Seyed Hossein. 2011. “*An Empirical Research On Leverage and Stock Returns in Teheran Stock Exchange (TSE)*”. *Jurnal Accounting*, Volume GB88.No 6, hal 19-20.
- Usman, Mohammad. 2001.”*Pengaruh Cyclicalit, Operating Leverage, Firm Size, dan Financial Leverage Terhadap Business Risk*. *Jurnal Ekonomi*, Vol 2. No 6, hal 7-10.
- Warsono.2003. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Ke-3. Malang: Bayumedia Widodoatmodjo, Sawidji. 2005. *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.